

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT FEBRUARI 2023





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Kalimantan Barat

FEBRUARI 2023

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
Provinsi Kalimantan Barat

VISI BANK INDONESIA

Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan yang Berkontribusi Nyata Terhadap Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara Negara *Emerging Markets* untuk Indonesia Maju

MISI BANK INDONESIA

- Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
- Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
- Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
- Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
- Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
- Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
- Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.

Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi:

Tim Perumusan dan Implementasi KEKDA
Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Ahmad Yani No. 2, Pontianak
Telp : 0561 - 734134
Faks : 0561 – 732033

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat edisi Februari 2023. Laporan Perekonomian yang sebelumnya bernama Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional ini memiliki empat fungsi utama, yaitu: (i) merupakan pandangan Bank Indonesia terhadap dinamika perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat; (ii) menyajikan informasi terkini mengenai kondisi makroekonomi, keuangan pemerintah daerah (Pemda), stabilitas sistem keuangan, inflasi, sistem pembayaran, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan serta prospek perekonomian Provinsi Kalimantan Barat ke depan untuk mendukung pembentukan ekspektasi masyarakat yang menjadi pertimbangan penting dalam perumusan berbagai kebijakan di Bank Indonesia; (iii) sebagai media bagi Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai berbagai pertimbangan yang melandasi keputusan kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia; dan (iv) menjadi referensi penting bagi seluruh

stakeholders dalam melakukan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Dalam penyusunan Laporan Perekonomian ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat telah mendapatkan banyak dukungan data dan informasi dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang kami perlukan dalam menyusun buku ini.

Sebagai penutup, kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Perekonomian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca agar kualitas kajian ini dapat terus ditingkatkan.

Pontianak, 28 Februari 2023
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Nur Asyura Anggini Sari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR TABEL	x
RINGKASAN UMUM	x

BAB 1 • PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH 01

1.1. Kondisi Umum	3
1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Penawaran: Lapangan Usaha (LU)	4
1.2.1. Perdagangan Besar dan Eceran	5
1.2.2. Transportasi dan Pergudangan	6
1.2.3. Industri Pengolahan	7
1.2.4. Konstruksi	8
1.2.5. Pertanian	9
1.3. Perkembangan Ekonomi Sisi Permintaan	12
1.3.1. Konsumsi Rumah Tangga	13
1.3.2. Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR)	15
1.3.3. Konsumsi Pemerintah	15
1.3.4. Investasi	15
1.3.5. Ekspor-Impor	18
1.3.5.1. Ekspor	18
1.3.5.2. Impor	20
1.3.5.3. Neraca Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Barat	22

BAB 2 • KEUANGAN PEMERINTAH 25

2.1. APBD Provinsi Kalimantan Barat	27
2.1.1. Anggaran Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat	27
2.1.2. Anggaran Belanja Provinsi Kalimantan Barat	29
2.2. APBD Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	30

2.2.1. Anggaran Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	30
2.2.2. Anggaran Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	31
2.3. Alokasi APBN di Kalimantan Barat	32

BAB 3 • PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH 35

3.1. Gambaran Umum	37
3.2. Inflasi Bulanan (mtm)	38
3.3. Inflasi Tahunan (yoy)	39
3.4. Inflasi Kota	42
3.5. Program Pengendalian Inflasi Tahun 2022	44

BAB 4 • PEMBIAYAAN DAERAH, SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM 47

4.1. Perkembangan Perbankan Secara Umum	49
4.1.1. Dana Pihak Ketiga (DPK)	49
4.1.2. Penyaluran Kredit	51
4.2. Ketahanan Sektor Korporasi	56
4.3. Ketahanan Sektor Rumah Tangga	59
4.4. Ketahanan Sektor UMKM	62

BAB 5 • PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 67

5.1. Perkembangan Transaksi Non Tunai	69
5.1.1. Transaksi Kliring dan <i>Real Time Gross Settlement</i>	69
5.1.2. Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	69
5.2. Penyediaan Uang Layak Edar	70
5.3. Perkembangan Temuan Uang Rupiah yang Diragukan Keasliannya	70

5.4.	Perkembangan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) dan Penyelenggara Transfer Dana (PTD)	71
5.5.	Program Elektronifikasi Transaksi Keuangan	72

BAB 6 • KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN **77**

6.1.	Gambaran Umum	79
6.2.	Ketenagakerjaan Kalimantan Barat	79
6.3.	Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan	82
6.3.1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	82
6.3.2.	Perbandingan dengan NTP Provinsi Lain di Kalimantan	82
6.4.	Inflasi Pedesaan	83
6.5.	Profil Kemiskinan dan Pemerataan Penduduk Kalimantan Barat	84
6.6.	Indeks Pembangunan Manusia	85

BAB 7 • PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH **87**

7.1.	Prospek Pertumbuhan Ekonomi Dunia	89
7.2.	Prospek Ekonomi triwulan I 2023 dan Tahun 2023	90
7.3.	Prakiraan Inflasi Daerah triwulan I 2023 dan Tahun 2023	92
7.4.	Rekomendasi	93

DAFTAR ISTILAH **97**

TIM PENYUSUN **99**

• • • DAFTAR GRAFIK • • •

BAB 1 • Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Grafik 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Kalimantan Barat dan Nasional 2018-2022	3
Grafik 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kalimantan Barat dan Nasional 2015-2022	3
Grafik 1.3.	Pemetaan Matriks Komponen PDRB Sisi Penawaran Triwulan IV 2022	5
Grafik 1.4.	Hasil Survei Konsumen (Triwulan)	6
Grafik 1.5.	Perkembangan Kredit Kendaraan dan Multiguna Prov. Kalimantan Barat	6
Grafik 1.6.	Kedatangan Orang melalui Transportasi Udara ke Bandara Supadio	6
Grafik 1.7.	Keberangkatan Orang melalui Transportasi Udara dari Bandara Supadio	6
Grafik 1.8.	Perkembangan Jumlah Bongkar Barang pada Pelabuhan di Kalimantan Barat	7
Grafik 1.9.	Perkembangan Jumlah Muat Barang pada Pelabuhan di Kalimantan Barat	7
Grafik 1.10.	Perkembangan Produksi Karet	7
Grafik 1.11.	Volume Ekspor Alumina Triwulanan	8
Grafik 1.12.	Kredit LU Industri Pengolahan	8
Grafik 1.13.	Volume Ekspor CPO Triwulanan	8
Grafik 1.14.	Volume Produksi CPO Triwulanan	8
Grafik 1.15.	Konsumsi Semen	9
Grafik 1.16.	Impor Material Konstruksi	9
Grafik 1.17.	Kredit LU Konstruksi	9
Grafik 1.18.	Perkembangan Produksi TBS Kelapa Sawit	10
Grafik 1.19.	Perkembangan Harga TBS (Kelapa Sawit) Prov. Kalimantan Barat	10
Grafik 1.20.	Perkembangan Luas Lahan Tanam Sawah	10
Grafik 1.21.	Perkembangan Luas Lahan Panen Sawah	10
Grafik 1.22.	Perkembangan Produksi Karet	11
Grafik 1.23.	Perkembangan Harga Karet	11
Grafik 1.24.	Analisis Curah Hujan Kalimantan Barat Triwulan IV 2022	11
Grafik 1.25.	Pemetaan Matriks Komponen PDRB Sisi Permintaan Triwulan IV 2022	13
Grafik 1.26.	Hasil Survei Konsumen (Triwulan)	14
Grafik 1.27.	Perkembangan Harga Karet	13
Grafik 1.27.	Perkembangan NTP	14
Grafik 1.28.	Perkembangan NTP Subkategori	14
Grafik 1.29.	Kredit Konsumsi Prov. Kalimantan Barat	14
Grafik 1.30.	Perkembangan Kredit RT Prov. Kalimantan Barat Berdasarkan Kategori	14

Grafik 1.31.	Persentase Realisasi Belanja APBD Pemprov + Kab/Kota & APBN Kalimantan Barat	15
Grafik 1.32.	Perkembangan Realisasi PMDN	16
Grafik 1.33.	Perkembangan Realisasi PMA	16
Grafik 1.34.	Perkembangan Jumlah Proyek PMDN	16
Grafik 1.35.	Perkembangan Jumlah Proyek PMA	16
Grafik 1.36.	Komposisi PMDN	16
Grafik 1.37.	Komposisi PMA	16
Grafik 1.38.	Perkembangan Kredit Investasi	17
Grafik 1.39.	Realisasi PMDN per Kabupaten/Kota	18
Grafik 1.40.	Realisasi PMA per Kabupaten/Kota	18
Grafik 1.41.	Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor	19
Grafik 1.42.	Perbandingan Proporsi Nilai Ekspor Komoditas	19
Grafik 1.43.	Perkembangan Nilai Ekspor Karet (SITC)	19
Grafik 1.44.	Perkembangan Nilai Ekspor Alumina (SITC)	19
Grafik 1.45.	Perkembangan Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit (SITC)	20
Grafik 1.46.	Perkembangan Nilai Ekspor Bauksit (SITC)	20
Grafik 1.47.	Perkembangan Pangsa Negara Tujuan Ekspor per Triwulan	20
Grafik 1.48.	Perkembangan Volume dan Nilai Impor	21
Grafik 1.49.	Perkembangan Nilai Impor Barang Bahan Baku	21
Grafik 1.50.	Perkembangan Nilai Impor Barang Modal	21
Grafik 1.51.	Perkembangan Komposisi Komponen Impor	21
Grafik 1.52.	Pergerakan Pertumbuhan Komponen Impor	21
Grafik 1.53.	Perkembangan Pangsa Negara Asal Impor per Triwulan	22
Grafik 1.54.	Impor Material Konstruksi	22
Grafik 1.55.	Neraca Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Barat	22

BAB 2 • Keuangan Pemerintah

Grafik 2.1.	APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	27
Grafik 2.2.	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2016-2022	29
Grafik 2.3.	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Provinsi Kalimantan Barat Periode 2016-2022	30
Grafik 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2022	31
Grafik 2.5.	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Kab/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2022	31

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.6. Anggaran dan Realiasi Belanja Per Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat Periode 2022	31	Grafik 4.12. Perkembangan Rasio NPL Perbankan Berdasarkan Jenis Penggunaan	54
Grafik 2.7. Proporsi Belanja Kab/Kota di Kalimantan Barat Periode 2022	31	Grafik 4.13. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Berdasarkan Kegiatan Bank	56
Grafik 2.8. Rincian Belanja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat per Jenis Belanja s.d triwulan III 2022	32	Grafik 4.14. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan	56
Grafik 2.9. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat s.d. triwulan IV 2022	32	Grafik 4.15. Perkembangan <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Pembiayaan Syariah	56
BAB 3 • Perkembangan Inflasi Daerah		Grafik 4.16. Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Ekonomi Utama Kalimantan Barat	57
Grafik 3.1. Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional	37	Grafik 4.17. Komposisi Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor Ekonomi	57
Grafik 3.2. Laju Inflasi Antarprovinsi di Kalimantan dan Nasional triwulan IV 2022	37	Grafik 4.18. Perkembangan <i>Likert Scale</i> Penjualan Domestik	57
Grafik 3.3. Perkembangan Inflasi Kota Sampel Kalimantan Barat	37	Grafik 4.19. Penyaluran Kredit kepada Sektor Korporasi di Kalimantan Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan	58
Grafik 3.4. Pergerakan Inflasi bulanan 3 Kota di Kalimantan Barat	42	Grafik 4.20. NPL Kredit kepada Sektor Korporasi di Kalimantan Barat	58
Grafik 3.5. Perkembangan Inflasi Tahunan 3 Kota di Kalimantan Barat	42	Grafik 4.21. Perkembangan Jenis DPK Korporasi Kalimantan Barat	59
BAB 4 • Pembiayaan Daerah, Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM		Grafik 4.22. Perkembangan DPK Sektor Korporasi pada KC/ KCP di Kalimantan Barat Berdasarkan Golongan Pemilik	59
Grafik 4.1. Perkembangan Jenis DPK Perbankan	49	Grafik 4.23. Pangsa DPK Sektor Korporasi pada KC/KCP di Kalimantan Barat Berdasarkan Golongan Pemilik	59
Grafik 4.2. Perkembangan SBT DPK Perbankan	49	Grafik 4.24. Perkembangan Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Kerja di Kalimantan Barat	60
Grafik 4.3. Posisi Valuta DPK Perbankan TW III 2022 (Rp triliun)	50	Grafik 4.25. Perkembangan IKK, IKE, dan IEK Survei Konsumen di Kalimantan Barat	60
Grafik 4.4. Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Kegiatan Bank	50	Grafik 4.26. Pertumbuhan DPK Perseorangan Berdasarkan Jenis Penempatan	60
Grafik 4.5. Pangsa Penghimpunan DPK Kalimantan Barat berdasarkan Golongan Nasabah	51	Grafik 4.27. Perkembangan Kredit Rumah Tangga	61
Grafik 4.6. Pertumbuhan Penghimpunan DPK Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat	51	Grafik 4.28. Nominal dan NPL Kartu Kredit Rumah Tangga	61
Grafik 4.7. Lokasi Bank Asal Penyalur Kredit berdasarkan Lokasi Proyek di Kalimantan Barat	52	Grafik 4.29. Perkembangan Rasio NPL Kredit RT Berdasarkan Sektor	62
Grafik 4.8. Lokasi Penyaluran Kredit oleh Perbankan Asal Kalimantan Barat	53	Grafik 4.30. Pertumbuhan Nominal Kartu Kredit Rumah Tangga	62
Grafik 4.9. Jenis Kredit Perbankan di Kalimantan Barat	54	Grafik 4.31. Pembiayaan UMKM Kalimantan Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan	62
Grafik 4.10. Suku Bunga Tertimbang (SBT) Kredit Perbankan di Kalimantan Barat	54		
Grafik 4.11. Perkembangan LDR dan Rasio NPL Perbankan	54		

• • • DAFTAR GRAFIK • • •

Grafik 4.32. Perkembangan Pembiayaan UMKM (dalam triliun)	62
Grafik 4.33. Pangsa Pembiayaan UMKM Kalimantan Barat TW IV 2022 berdasarkan Jenis Penggunaan	63
Grafik 4.34. Pendorong Pertumbuhan Pembiayaan UMKM triwulan IV 2022 Berdasarkan Lapangan Usaha	63
Grafik 4.35. Nominal (Rp Triliun) dan Pangsa Pembiayaan UMKM Kalimantan Barat Berdasarkan Lapangan Usaha	63
Grafik 4.36. Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Kategori Debitur	64
Grafik 4.37. Perkembangan NPL Kredit UMKM	64
Grafik 4.38. Perkembangan NPL Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha	64

BAB 5 • Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Grafik 5.1. Perkembangan Transaksi RTGS di Kalimantan Barat	69
Grafik 5.2. Perkembangan Transaksi Kliring di Kalimantan Barat	69
Grafik 5.3. Penggunaan transaksi APMK ATM/Debet di Kalimantan Barat	70
Grafik 5.4. Penggunaan transaksi APMK Kartu Kredit di Kalimantan Barat	70
Grafik 5.5. Perkembangan Inflow-Outflow di KPwBI Prov. Kalimantan Barat	70
Grafik 5.6. Transaksi Valuta Asing di Prov. Kalimantan Barat	71
Grafik 5.7. Andil penjualan valas di Kalimantan Barat per jenis mata uang	71
Grafik 5.8. Andil pembelian valas di Kalimantan Barat per jenis mata uang	71
Grafik 5.9. Nominal Transaksi PTD di Kalimantan Barat	72
Grafik 5.10. Volume Transaksi PTD di Kalimantan Barat	72
Grafik 5.11. Pangsa <i>Merchant</i> QRIS berdasarkan Kategori Usaha di Prov. Kalimantan Barat	72

BAB 6 • Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Grafik 6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	80
Grafik 6.2. Tingkat Pertumbuhan Indikator Ketenagakerjaan	80
Grafik 6.3. Perkembangan Tingkat Penyerapan Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Barat dan Nasional	80
Grafik 6.4. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat dan Nasional	80
Grafik 6.5. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal dan Informal	81
Grafik 6.6. Perkembangan NTP Kalimantan Barat	82
Grafik 6.7. Perkembangan NTP Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Klasifikasi Sublapangan Usaha	82
Grafik 6.8. Pergerakan NTP Antar Provinsi di Kalimantan	83
Grafik 6.9. Perbandingan Inflasi Pedesaan Kalimantan Barat dan Nasional (mtm)	84
Grafik 6.10. Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan dan Nasional	84
Grafik 6.11. Perkembangan Presentase Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Barat	84
Grafik 6.12. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat dan Nasional	85

DAFTAR TABEL

BAB 1 • Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Tabel 1.1.	Nominal PDRB Triwulan IV 2022 Wilayah Kalimantan dan Nasional	3
Tabel 1.2.	Pertumbuhan PDRB Triwulan IV 2022 Sisi Penawaran	5
Tabel 1.3.	Penyerapan Belanja Modal APBD Kalimantan Barat dan APBN s/d. Triwulan IV 2022 (Rp miliar)	9
Tabel 1.4.	Perkembangan Luas Lahan Panen Sawah Kabupaten/Kota (Ha)	11
Tabel 1.5.	Pertumbuhan PDRB Triwulan IV 2022 Sisi Permintaan	12
Tabel 1.6.	Perkembangan Realisasi PMA per Sektor	17
Tabel 1.7.	Perkembangan Realisasi PMDN per Sektor	18

BAB 2 • Keuangan Pemerintah

Tabel 2.1.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan 2022	28
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan 2022	29
Tabel 2.3.	Anggaran dan Realisasi Alokasi Belanja APBN di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan 2022	33

BAB 3 • Perkembangan Inflasi Daerah

Tabel 3.1.	Perkembangan Inflasi bulanan (mtm)	38
Tabel 3.2.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi bulanan (mtm)	39
Tabel 3.3.	Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy)	40
Tabel 3.4.	Perkembangan Andil Inflasi Tahunan (yoy)	41
Tabel 3.5.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan (yoy)	41
Tabel 3.6.	Perkembangan Inflasi Kota di Provinsi Kalimantan Barat (yoy)	42
Tabel 3.7.	Andil Inflasi Tahunan 3 Kota di Kalimantan Barat	43
Tabel 3.8.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi bulanan di 3 Kota Sampel (mtm)	43

BAB 4 • Pembiayaan Daerah, Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Tabel 4.1.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)	49
Tabel 4.2.	Perkembangan nominal DPK Kalimantan Barat Per Kabupaten/Kota (Rp Triliun)	51
Tabel 4.3.	Perkembangan Kredit Perbankan (Rp Triliun)	52
Tabel 4.4.	Perkembangan Nominal Kredit Berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp Miliar)	55
Tabel 4.5.	Perkembangan NPL Berdasarkan Kabupaten/Kota	55

BAB 6 • Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tabel 6.1.	Indikator Ketenagakerjaan (Ribuan Jiwa)	79
Tabel 6.2.	Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha (Ribuan Jiwa)	81
Tabel 6.3.	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Status Utama Pekerja (Ribuan Jiwa)	81
Tabel 6.4.	Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Barat	83
Tabel 6.5.	Perbandingan NTP dengan Provinsi Lain di Kalimantan dan Nasional	83
Tabel 6.6.	Perkembangan Inflasi Pedesaan	84
Tabel 6.7.	IPM Provinsi wilayah Kalimantan 2015-2022	86
Tabel 6.8.	Perkembangan IPM Kalimantan Barat berdasarkan Komponennya	86
Tabel 6.9.	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat	86

RINGKASAN UMUM

LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FEBRUARI 2023

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01% (yoy), melanjutkan pertumbuhan positif dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi penawaran, kinerja lapangan usaha pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi menjadi kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan IV 2022 pendorong pertumbuhan positif.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan impor.

Keuangan Pemerintah

Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan perbaikan. Persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan tercatat sebesar 107,86% dari pagu atau sebesar Rp6.103,47 miliar. Realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang sebesar 99,91% dari pagu atau Rp6.429 miliar.

Realisasi belanja APBD Provinsi Kalimantan Barat triwulan IV 2022 secara nominal sebesar Rp5.726,86 miliar atau 95,53% dari pagu. Secara nominal, realisasi belanja APBD hingga triwulan IV 2022 menunjukkan penurunan namun lebih tinggi secara persentase jika dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang mencapai Rp6.158,32 miliar atau 92,01% dari pagu.

Sementara itu, persentase realisasi belanja Kementerian/Lembaga di Kalimantan Barat hingga triwulan IV 2022 sebesar 95,07% dari pagu anggaran atau Rp10.249,67 miliar. Pencapaian tersebut menurun secara persentase maupun nominal dibandingkan dengan realisasi belanja triwulan IV 2021 yang sebesar Rp10.594,75 miliar atau 96,87% dari pagu.

Perkembangan Inflasi Daerah

Tekanan inflasi Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tekanan inflasi pada triwulan IV 2022 tercatat 6,3% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 5,71% (yoy). Peningkatan ini disebabkan oleh:

- Konsumsi dalam tren meningkat di tengah mobilitas masyarakat menghadapi periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru).
- *Second round effect* penyesuaian harga BBM yang masih memberikan tekanan pada kelompok *volatile food*.
- Berbagai event di Kalimantan Barat pada akhir November 2022.

Inflasi Kalimantan Barat di tahun 2023 diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain dampak dari pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), faktor cuaca ekstrim La Nina, kenaikan cukai rokok, tren peningkatan harga komoditas energi, isu wabah penyakit, dan peningkatan PPN yang dilakukan secara bertahap. Namun demikian, walaupun menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga stabilisasi harga, inflasi Kalimantan Barat akan tetap terjaga dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ di 2023.

Pembiayaan Daerah, Serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Intermediasi perbankan Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 terus tumbuh dengan risiko kredit yang terjaga. Kredit perbankan tumbuh sebesar 0,83% (yoy), meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 11,36% (yoy). Pada perbankan syariah, pembiayaan tumbuh lebih tinggi mencapai 15,10% (yoy). Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga terus berlanjut. Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Kalimantan Barat juga terus bertumbuh, didorong oleh peningkatan simpanan deposito sejalan dengan suku bunga deposito yang meningkat. Sementara itu, risiko kredit bermasalah tetap berada dalam level yang terjaga, didorong oleh perbaikan *Non Performing Loan* (NPL) semua jenis penggunaan kredit.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat mengalami net outflow sebesar Rp3,64 triliun pada triwulan IV 2022. Permintaan uang dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pada periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru menjadi penyebab terjadinya arus balik aliran uang di triwulan ini. Sementara itu, penurunan transaksi BI-RTGS dan SKNBI dari sisi nominal transaksi maupun volume turut dipengaruhi oleh perkembangan implementasi BI-Fast.

Perkembangan implementasi Bantuan Sosial Non Tunai melalui PKH berjalan dengan lancar. Tingkat penyerapan PKH sudah mencapai 100%. Selanjutnya, upaya akselerasi elektronifikasi transaksi keuangan di Kalimantan Barat terus dilakukan terutama pada percepatan perluasan QRIS dan menjaga kelancaran penyaluran program bantuan sosial. Hingga Desember 2022 terdapat 232.411 *merchant* QRIS di Kalimantan Barat, meningkat 6,66% dibandingkan posisi September 2022 yang berjumlah 217.95 *merchant*.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2022 berada pada angka 5,11%, membaik dibandingkan Agustus 2021 sebesar 5,82%. Sejalan dengan TPT, rasio kemiskinan juga mengalami perbaikan menjadi 6,81% pada September 2022, dibandingkan September 2021 yang tercatat sebesar 6,84%. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2022 mengalami peningkatan menjadi 142,73, dibandingkan triwulan III 2022 sebesar 136,05.

Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan I 2023 diperkirakan melanjutkan pertumbuhan positif. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), peningkatan kinerja ekonomi diperkirakan bersumber dari LU perdagangan, transportasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Selain itu, LU pertanian dan industri pengolahan yang selama ini menjadi penopang perekonomian diperkirakan akan kembali memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja ekonomi. Pada sisi pengeluaran, kinerja konsumsi rumah tangga diperkirakan menjadi pendorong perekonomian di triwulan I 2023. Hal ini sejalan dengan peningkatan mobilitas dan konsumsi masyarakat pada masa perayaan hari besar keagamaan dan nasional (HBKN) Imlek, Cap Go Meh, dan Ramadhan.

Secara keseluruhan tahun 2023, perekonomian Kalimantan Barat diperkirakan tumbuh positif. Kinerja lapangan usaha utama dan tingkat konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih tumbuh menjadi faktor pendorong perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2023.

TABEL INDIKATOR MAKROEKONOMI

Indikator	2020				2021				2022			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Ekonomi Makro Regional												
Produk Domestik Regional Bruto (% yoy)	2,81	-3,49	-4,31	-2,22	-0,10	10,81	4,60	4,31	4,15	4,58	6,53	5,01
Berdasarkan Sektor (%-YoY) :												
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,63	2,78	0,07	1,46	4,17	11,45	5,52	-4,08	-5,13	-1,39	4,46	12,39
- Pertambangan dan Penggalian	20,87	41,26	12,77	11,35	-4,81	-22,15	-6,05	42,98	44,81	9,28	4,64	-28,93
- Industri Pengolahan	1,19	-2,66	-6,80	-1,17	2,89	11,85	8,17	-2,13	1,51	-1,26	6,46	9,61
- Pengadaan Listrik dan Gas	4,23	13,47	16,89	15,41	4,67	0,21	-8,11	8,16	5,90	3,64	3,76	4,19
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,36	6,72	5,63	5,19	5,55	6,58	5,77	5,42	6,26	6,80	5,67	7,84
- Konstruksi	0,81	-6,95	-8,47	-4,26	-2,02	22,23	10,71	8,30	7,78	0,86	-7,33	2,92
- Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,97	-18,16	-11,48	-9,36	-7,16	15,58	3,56	6,41	9,26	21,34	14,18	5,42
- Transportasi dan Pergudangan	2,61	-30,82	-24,34	-22,58	-25,1	6,04	-11,42	1,24	10,21	32,95	40,03	14,44
- Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman	-1,73	-40,86	-18,76	-15,04	-9,19	45,84	0,82	10,34	10,70	12,36	16,57	3,66
- Informasi dan Komunikasi	9,41	7,88	9,70	6,52	5,51	7,54	4,03	9,13	6,13	6,51	7,64	10,42
- Jasa Keuangan dan Asuransi	5,27	-5,59	-0,92	0,04	3,12	10,79	1,99	2,66	3,91	-5,74	3,35	2,34
- Real Estate	4,86	-0,74	0,70	-0,15	-1,7	4,71	2,22	8,67	-0,02	-0,09	-2,89	4,89
- Jasa Perusahaan	-2,01	-6,14	-5,72	-3,90	-5,47	-4,33	-2,61	14,22	14,01	21,06	15,73	0,63
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,49	8,05	-0,98	-5,96	-7,11	7,90	-2,84	-1,55	-3,36	-7,92	5,09	-0,14
- Jasa Pendidikan	-1,64	-11,29	-6,57	-13,47	4,75	8,57	7,79	-0,95	0,86	3,40	6,19	14,33
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,72	12,92	19,75	65,43	61,44	56,58	37,95	6,23	3,91	10,81	11,46	2,24
- Jasa lainnya	-0,34	-20,89	-20,23	-13,69	-2,57	9,93	-13,16	10,52	6,70	14,25	28,81	8,51
Berdasarkan Permintaan (%-YoY) :												
- Konsumsi Rumah Tangga	2,29	-2,03	-0,01	-0,97	-1,5	1,56	0,06	3,17	2,38	4,82	4,35	2,93
- Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,75	-6,14	-3,70	1,54	0,89	7,05	3,38	-9,79	-1,82	0,31	0,46	19,11
- Konsumsi Pemerintah	0,12	-1,60	2,58	-3,52	-0,34	10,73	-0,40	-7,46	-6,53	-7,84	-4,60	-6,64
- PMTB	4,77	-1,60	-5,17	-2,09	-2,56	3,11	6,95	3,84	1,89	3,50	3,28	3,52
- Ekspor	22,21	1,29	19,65	-9,95	5,25	30,07	-4,95	69,97	49,50	46,12	53,97	-10,92
- Impor	27,17	-27,70	-31,34	-41,64	-40,37	-1,86	-0,81	19,18	6,95	10,83	9,86	21,57
Ekspor												
- Nilai Ekspor Non Migas (USD Juta)	391,55	550,92	617,44	417,91	440,31	534,62	516,13	786,31	809,28	804,43	748,28	604,87
- Volume Ekspor Non Migas (ribu ton)	4.231,54	5.478,27	4.953,91	4.313,90	3.498,78	4.996,63	4.600,60	8.111,91	5.874,00	4.431,85	4.342,35	4.068,06
Impor												
- Nilai Impor Non Migas (USD Juta)	114,81	91,19	84,61	98,60	67,11	54,04	41,92	55,83	60,11	50,40	60,68	60,06
- Volume Impor Non Migas (ribu ton)	81,18	47,24	40,34	54,25	35,75	32,19	26,99	45,46	51,12	32,81	35,90	44,19
Indeks Harga Konsumen												
- Provinsi Kalimantan Barat	105,22	106,03	105,42	106,42	106,3	107,24	107,54	107,96	109,62	111,87	113,68	114,77
- Kota Pontianak	105,27	106,04	105,5	106,17	106,21	107,08	107,27	107,40	109,10	111,11	113,10	114,22
- Kota Singkawang	102,46	103,24	102,48	104,1	103,8	105,5	106,38	106,75	107,83	110,27	111,91	113,11
- Kabupaten Sintang	109,56	110,72	109,82	112,26	111,21	111,46	111,59	114,37	116,74	120,45	121,18	121,80
Laju Inflasi Tahunan (%yoy)												
- Provinsi Kalimantan Barat	3,16	2,07	1,74	2,46	1,02	1,15	2,01	1,45	3,13	4,31	5,71	6,30
- Kota Pontianak	2,77	2,21	1,91	2,11	0,89	0,98	1,68	1,16	2,72	3,76	5,43	6,35
- Kota Singkawang	1,47	0,93	0,45	2,72	1,31	2,19	3,81	2,55	3,88	4,52	5,20	5,96
- Kabupaten Sintang	9,21	2,85	2,58	4,68	1,51	0,67	1,61	1,88	4,97	8,07	8,59	6,50

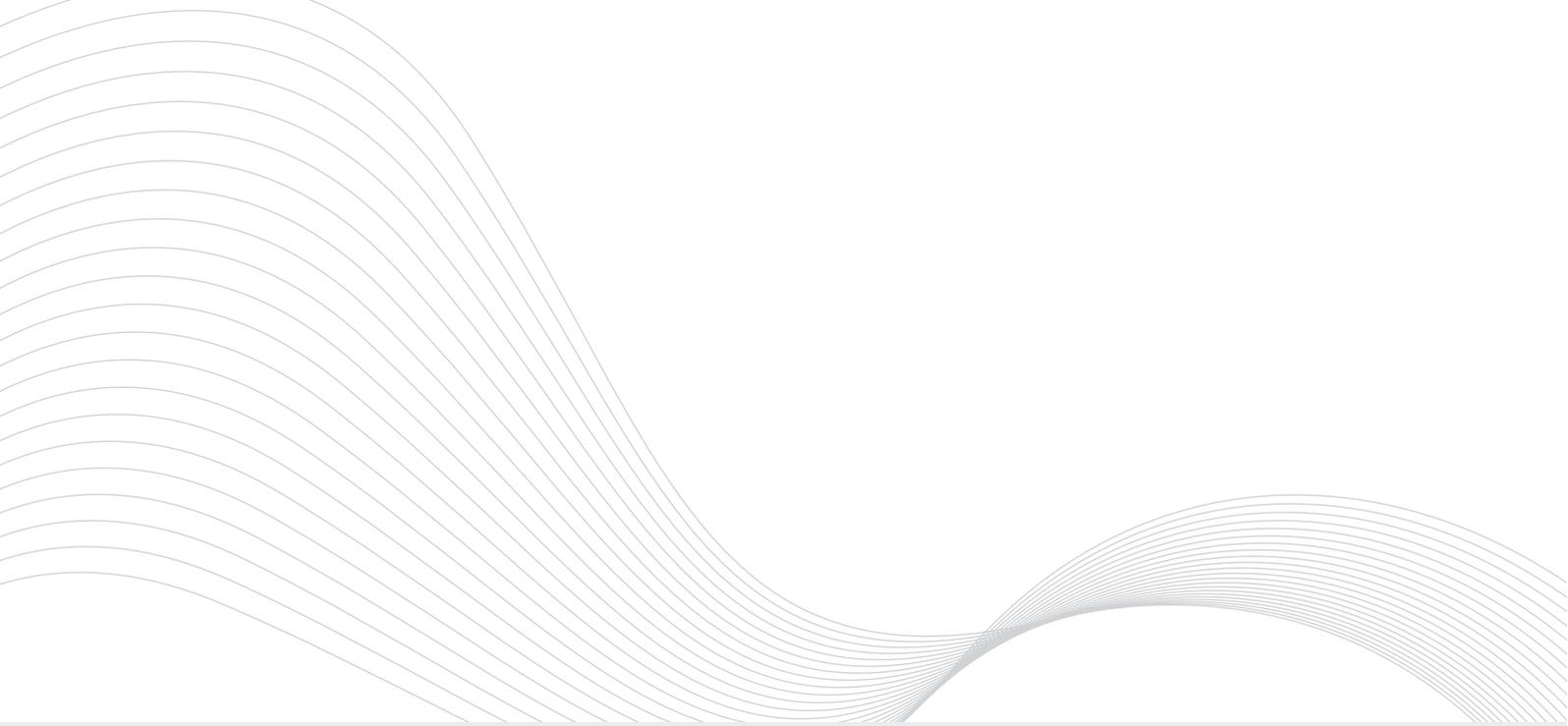
TABEL INDIKATOR MAKROEKONOMI

Indikator	2020				2021				2022			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Stabilitas Keuangan Daerah												
Perbankan Secara Umum (Rp Miliar)												
Aset (Berdasarkan Lokasi Bank)	78.104	81.130	84.773	84.314	87.143	87.796	89.488	93.185	90.393	93.185	91.659	93.849
Dana Pihak Ketiga (Berdasarkan Lokasi Bank)	61.050	63.512	66.972	65.550	65.687	68.262	68.597	71.829	72.211	73.552	73.281	74.045
Kredit (Berdasarkan Lokasi Bank)	53.354	52.919	53.942	55.952	55.826	57.241	56.662	58.138	85.438	86.574	85.493	86.401
Kredit Korporasi (Rp Miliar)	40.317	38.355	38.877	40.343	40.280	40.772	35.982	43.046	41.762	41.288	38.954	37.943
- Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	24.432	23.365	24.501	25.761	26.095	26.380	20.954	26.526	25.947	24.969	25.176	25.269
- Pertambangan dan Penggalian	935	976	836	770	933	933	853	1.086	1.083	813	717	715
- Industri Pengolahan	4.823	4.325	4.498	4.361	4.144	4.114	5.228	5.509	5.274	6.180	4.102	2.742
- Listrik, Gas dan Air Bersih	216	237	226	217	207	196	201	405	402	404	412	403
- Bangunan	1.143	1.073	1.246	1.354	1.248	1.254	1.398	1.359	1.608	1.650	1.289	1.250
- Perdagangan, Hotel, dan Restoran	4.495	4.307	3.956	4.340	4.470	4.532	4.290	4.544	4.585	4.436	4.466	4.628
- Pengangkutan dan Komunikasi	922	927	853	881	878	927	792	1.005	969	1.052	999	1.124
- Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3.120	2.922	2.519	2.412	2.284	2.267	2.102	2.332	1.618	1.574	1.609	1.623
- Jasa-Jasa	209	200	216	208	156	159	140	180	200	131	122	144
- Lainnya	21	23	28	41	14	10	23	99	78	80	62	44
Kredit Perseorangan (Rp Miliar)	40.678	41.357	41.835	41.515	41.163	40.213	40.777	42.300	43.523	45.176	46.431	47.977
- Modal Kerja	9.271	9.175	9.584	10.247	10.307	10.651	11.049	11.451	11.579	12.005	12.538	12.872
- Investasi	6.289	6.294	6.185	4.868	4.845	4.108	4.067	4.172	4.475	4.648	4.659	4.926
- Konsumsi / Sektor Rumah Tangga	25.117	25.888	26.066	26.400	26.010	25.454	25.660	26.677	27.470	28.523	29.234	30.179
Kredit Rumah Tangga (Rp Miliar)	25.117	25.888	26.066	26.400	26.009	25.454	25.660	26.677	27.470	28.523	29.234	30.179
- Perumahan	6.780	6.881	7.008	7.159	7.250	7.486	7.713	7.736	7.926	7.999	8.256	8.457
- Ruko/Rukan	703	675	674	665	655	642	622	591	594	612	571	549
- Kendaraan	2.266	2.042	1.867	1.707	1.615	1.608	1.589	1.636	1.717	1.816	1.927	2.123
- Peralatan	151	148	147	143	139	143	143	146	155	167	184	197
- Multiguna	14.577	15.577	15.784	16.143	15.770	14.970	14.915	15.902	16.284	17.001	17.205	17.594
- Lainnya	641	564	585	583	577	604	679	666	794	928	1.092	1.259
Kredit UMKM (Rp Miliar)	22.069	21.701	22.040	22.652	22.088	22.611	23.267	24.023	24.156	25.268	25.809	26.523
- Mikro	3.887	3.704	3.398	3.117	2.734	2.703	2.776	5.902	6.213	6.566	7.733	8.014
- Kecil	8.093	7.579	7.891	8.316	8.320	8.657	9.063	8.907	9.157	9.692	9.163	9.484
- Menengah	10.089	10.417	10.749	11.219	11.032	11.251	11.427	9.214	8.786	9.010	8.914	9.025
NPL Umum (%)	1,55	1,75	1,63	1,56	1,64	1,78	1,81	2,26	1,96	2,01	2,06	1,82
NPL Korporasi (%)	1,19	1,50	1,55	1,60	1,62	1,79	1,72	2,75	2,02	2,08	2,16	1,89
NPL Rumah Tangga (%)	0,85	0,98	0,88	0,75	0,82	0,87	0,86	0,75	0,73	0,73	0,72	0,6
NPL UMKM (%)	3,07	3,36	3,16	6,30	3,25	3,51	3,58	2,77	3,1	3,65	3,52	3,21
Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah												
Kliring												
- Volume (lembar)	161.483	159.775	167.753	178.630	147.749	154.943	149.793	180.455	135.724	138.682	134.050	146.261
- Nominal (Rp miliar)	8.632	7.770	8.479	9.666	8.761	8.808	8.458	10.303	8.566	8.268	7.383	7.826
RTGS												
- Volume (lembar)	7.048	8.284	11.447	12.013	10.972	12.367	11.996	13.410	12.630	11.990	10.992	11.829
- Nominal (Rp miliar)	24.939	24.094	20.927	18.459	33.952	50.738	40.118	33.827	31.270	39.879	27.165	30.118
Tunai (Rp Miliar)												
- Inflow	3.352	2.677	2.038	1.227	3.831	2.713	1.851	822	3.326	3.037	2.525	1.217
- Outflow	(1.670)	(3.547)	(2.992)	(5.277)	(1.318)	(3.929)	(2.657)	(4.822)	(1.385)	(3.813)	(1.978)	(4.858)
- Netflow	1.683	(870)	(953)	(4.050)	2513	(1.216)	(545)	(4.000)	1.941	(0,775)	548	(3.641)

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT FEBRUARI 2023





Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01% (yoy), melanjutkan pertumbuhan positif triwulan sebelumnya.

Dari sisi penawaran, kinerja lapangan usaha pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi menjadi pendorong pertumbuhan positif.

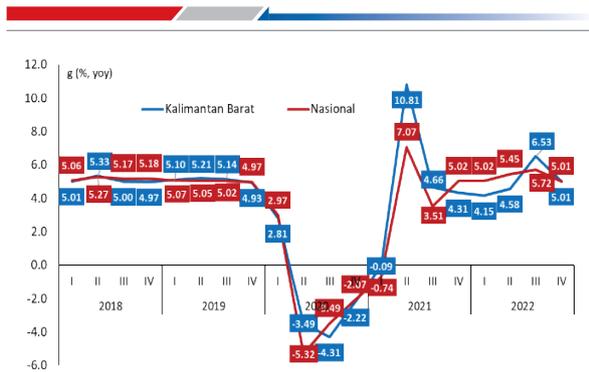
Dari sisi permintaan, pertumbuhan didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan impor.



1.1. KONDISI UMUM

Ekonomi Kalimantan Barat tumbuh melambat pada pada Triwulan IV 2022. Perekonomian Kalimantan Barat tumbuh sebesar 5,01% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,53% (yoy)¹. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional kawasan Kalimantan yang tumbuh 5,97% (yoy), besaran pertumbuhan Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 tercatat lebih rendah. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat ini searah dengan pertumbuhan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 tercatat sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,01% (yoy).

Provinsi Kalimantan Barat memiliki pangsa sebesar 15,09% terhadap perekonomian kawasan Kalimantan pada triwulan IV 2022. Pangsa tersebut menurun



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

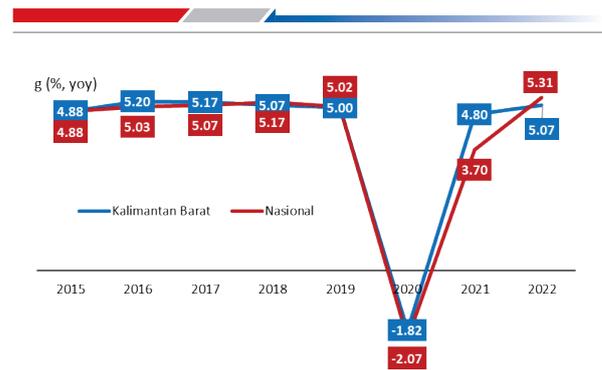
Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Kalimantan Barat dan Nasional 2018-2022

Tabel 1.1. Nominal PDRB Triwulan IV 2022 Wilayah Kalimantan dan Nasional

PDRB (Rp miliar)	2020	2021				2021	2022				2022
		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Kalimantan Barat	134.743	34.670	35.297	35.046	36.199	141.212	36.110	36.913	37.335	38.011	148.369
Kalimantan Tengah	98.934	24.664	25.410	25.365	27.042	102.481	26.337	27.131	27.043	28.584	109.095
Kalimantan Selatan	130.864	31.924	33.691	34.900	34.907	135.423	33.045	35.660	36.870	36.765	142.339
Kalimantan Timur	472.393	118.305	120.555	122.310	123.269	484.439	121.145	124.923	128.847	131.243	506.159
Kalimantan Utara	60.746	15.271	15.617	15.983	16.291	63.163	15.980	16.405	16.852	17.297	66.534
Kalimantan	897.681	224.835	230.570	233.604	237.709	926.718	232.617	241.033	246.947	251.900	972.496
Nasional	10.837.541	2.736.846,0	2.789.075,7	2.830.807,2	2.882.564,9	11.239.294	2.869.413	2.945.400	2.994.112	3.030.856	11.839.781

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

1 BPS Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Kalimantan Barat dan Nasional 2015-2022

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 15,12%. Di sisi lain, kontribusi total perekonomian kawasan Kalimantan terhadap perekonomian nasional pada triwulan IV 2022 sebesar 8,31%, meningkat dibandingkan dengan kontribusi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 8,25%. Hal tersebut terjadi seiring peningkatan kinerja beberapa sektor utama kawasan Kalimantan terutama pertambangan, industri pengolahan, dan konstruksi.

Secara kumulatif, perekonomian Kalimantan Barat tumbuh 5,07% (yoy) pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh 4,80% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat 2022 terutama didorong oleh peningkatan kinerja perdagangan, transportasi, industri pengolahan, dan pertanian. Namun demikian, pertumbuhan Kalimantan Barat pada 2022 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,31% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 didukung oleh lapangan usaha (LU) pertanian dan industri pengolahan. Hal ini sejalan dengan beberapa faktor pendukung antara lain: (1) ketersediaan bahan baku tandan buah segar (TBS) yang meningkat akibat siklus musim panen dan pemupukan pada semester I 2022, (2) perpanjangan kebijakan penghapusan pungutan ekspor (PE) *crude palm oil* (CPO) mulai 15 Juli 2022 s/d. 31 Desember 2022, (3) produksi produk substitusi CPO yang *underperform* seiring dengan musim dingin pada sentra produksi, serta (4) peningkatan kapasitas produksi *Smelter Grade Alumina* (SGA) di Kabupaten Ketapang yang beroperasi dengan kapasitas optimal. Selain itu, LU terkait konsumsi turut mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat Triwulan IV 2022. Hal ini sejalan dengan peningkatan konsumsi dan mobilitas masyarakat di tengah hari besar keagamaan dan nasional (HBKN) Nataru dan liburan sekolah, maraknya kegiatan massal, serta pemanfaatan lebih luas *open border* Kalimantan Barat-Serawak. Pada triwulan IV 2022, pertumbuhan perekonomian terutama bersumber dari pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan (LU), serta konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) (Pengeluaran).

1.2. PERKEMBANGAN EKONOMI SISI PENAWARAN: LAPANGAN USAHA (LU)

Dari sisi penawaran, kinerja LU triwulan IV 2022 melanjutkan perbaikan pada beberapa komponen. Secara triwulanan, sebagian besar komponen penawaran melanjutkan pertumbuhan positif secara *year-on-year* (yoy) kecuali LU pertambangan dan administrasi pemerintahan yang mengalami kontraksi. Kinerja LU pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi menjadi kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan IV 2022 dengan andil masing-masing 1,18%, 0,81%, 0,74%, serta 0,51%. Peningkatan kinerja LU pertanian dan industri pengolahan sejalan dengan ketersediaan bahan baku tandan buah segar (TBS) dan utilisasi pabrik CPO yang membaik

di tengah harga CPO yang masih pada level tinggi. Kinerja LU perdagangan besar dan eceran didorong oleh mobilitas dan konsumsi yang terjaga pada HBKN Nataru dan libur sekolah. Sedangkan, kinerja LU konstruksi didorong oleh siklus pembangunan yang terfokus pada triwulan IV 2022.

Beberapa LU yang mengalami kontraksi pada triwulan IV 2022, yaitu LU pertambangan dan administrasi pemerintahan yang mengalami -28,93% dan -0,14% (yoy). Penurunan kinerja pada LU pertambangan disebabkan penurunan produksi bauksit di tengah pencabutan izin tambang beberapa perusahaan. Di sisi lain, kinerja LU administrasi pemerintahan mengalami kontraksi sejalan dengan realisasi belanja APBD Kab/Kota di Kalimantan Barat yang berkontraksi secara nominal dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan pangsa terhadap PDRB, perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 masih didominasi oleh empat LU utama, yaitu LU pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi, dengan total pangsa sebesar 64,52%. LU pertanian masih mendominasi pangsa PDRB yaitu sebesar 20,80% diikuti oleh industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran serta konstruksi masing-masing sebesar 16,44%, 13,27% dan 14,01%.

Berdasarkan pemetaan matriks komponen sisi penawaran, LU pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan berada pada kuadran potensial (kanan atas) pada Triwulan IV 2022. Kuadran potensial didefinisikan sebagai klasifikasi pemetaan LU dengan tingkat pertumbuhan *year-on-year* yang tinggi serta memiliki pangsa terhadap perekonomian yang cukup besar² sehingga LU ini diharapkan dapat terus menopang perekonomian Kalimantan Barat. Lebih lanjut, industrialisasi memerlukan berbagai akselerasi agar turut mendukung LU yang terkait (*backward-forward linkage*). Sebagai salah satu contoh, untuk memulihkan kinerja LU pertambangan yang

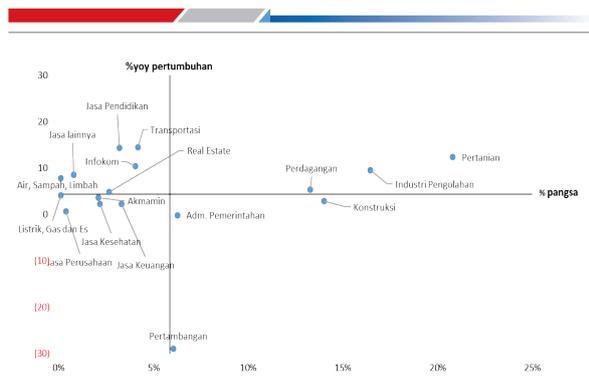
2. *Threshold* yang digunakan dalam pemetaan matriks adalah 4,40% sebagai batas pada pertumbuhan ekonomi daerah dan 5,88% sebagai batas pada pangsa komponen PDRB. Penentuan batas *threshold* yang digunakan merupakan rata-rata pertumbuhan dan pangsa lapangan usaha pada triwulan berjalan.

Tabel 1.2. Pertumbuhan PDRB Triwulan IV 2022 Sisi Penawaran

Lapangan Usaha	2020				2021*				2022*				Triwulan IV 2022	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	Pangsa	Andil Pertumbuhan (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,67	3,07	0,08	1,57	4,11	11,52	5,51	-2,92	-5,13	-1,39	4,46	12,39	20,80%	1,18
Pertambangan dan Penggalian	20,87	38,67	12,77	11,35	-3,22	-20,09	-5,12	41,60	44,81	9,28	4,64	-28,93	6,05%	0,28
Industri Pengolahan	1,19	-2,87	-6,99	-1,23	2,52	12,06	7,96	-2,44	1,51	-1,26	6,46	9,61	16,44%	0,81
Konstruksi	0,81	-3,76	-8,47	-4,26	-2,08	17,43	9,91	8,43	7,78	0,86	-7,33	2,92	14,01%	0,51
Perdagangan Besar dan Eceran	1,97	-18,16	-11,48	-9,42	-7,15	15,49	3,45	6,37	9,26	21,34	14,18	5,42	13,27%	0,74
Transportasi dan Pergudangan	2,75	-30,82	-24,34	-22,44	-23,99	9,70	-7,18	1,93	10,21	32,95	40,03	14,44	4,20%	0,19
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	-1,73	-40,85	-18,76	-15,04	-9,19	45,84	0,82	10,34	10,70	12,36	16,57	3,66	2,09%	0,11
Informasi dan Komunikasi	9,30	7,87	9,70	6,24	5,62	7,54	3,68	9,42	6,13	6,51	7,64	10,42	4,04%	0,30
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,44	-5,59	-0,92	0,05	2,96	10,78	1,99	2,65	3,91	-5,74	3,35	2,34	3,31%	0,18
Real Estate	4,86	-0,74	0,70	-0,15	-1,70	4,71	2,22	8,67	-0,02	-0,09	-2,89	4,89	2,67%	0,14
Jasa Perusahaan	-2,01	-6,14	-5,72	-3,90	-5,47	-4,33	-2,61	14,22	14,01	21,06	15,73	0,63	0,40%	0,02
Administrasi Pemerintahan	5,17	4,10	-0,43	-5,96	-7,84	8,46	-3,65	-1,84	-3,36	-7,92	5,09	-0,14	6,28%	0,23
Jasa Pendidikan	-1,64	-11,29	-6,57	-13,47	4,75	8,57	9,30	-4,61	0,86	3,40	6,19	14,33	3,21%	0,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,72	12,92	19,75	65,43	61,24	56,58	37,95	6,23	3,91	10,81	11,46	2,24	2,19%	0,13
Jasa lainnya	-0,34	-20,89	-20,23	-13,69	-2,57	9,93	-13,16	10,52	6,70	14,25	28,81	8,51	0,79%	0,05
Total (yoy)	2,81	-3,49	-4,31	-2,22	-0,09	10,81	4,66	4,31	4,15	4,58	6,53	5,01	100,00	5,01

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

* Penyesuaian berdasarkan publikasi terakhir oleh BPS Prov. Kalimantan Barat



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.3. Pemetaan Matriks Komponen PDRB Sisi Penawaran Triwulan IV 2022

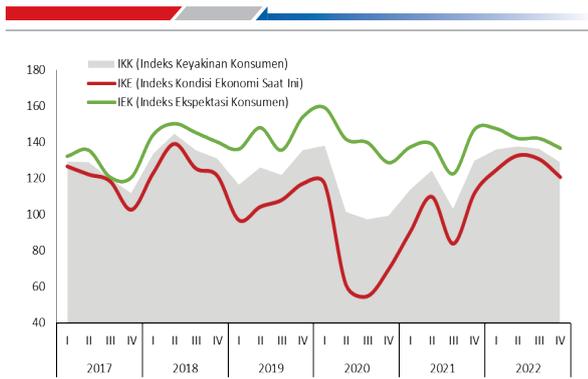
terkontraksi pada triwulan IV 2022, dapat dilakukan dengan upaya menyerap excess produksi bauksit Kalimantan Barat yang sebelumnya ditujukan untuk ekspor.

1.2.1. Perdagangan Besar dan Eceran

Kinerja LU perdagangan besar dan eceran terpantau melanjutkan tren pertumbuhan positif, meskipun melambat dari triwulan sebelumnya. LU perdagangan besar dan eceran tumbuh 5,42% (yoy) pada triwulan IV 2022, melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,18% (yoy). Kinerja LU perdagangan besar

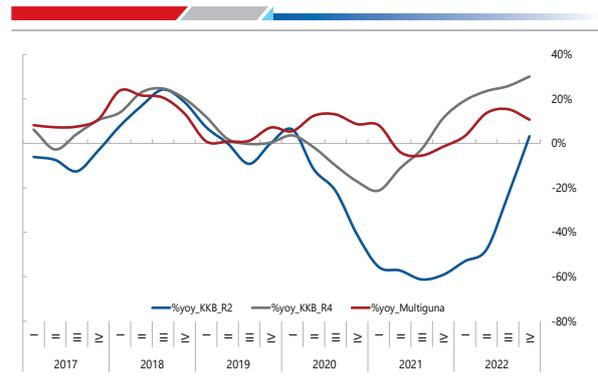
dan eceran yang positif ini sejalan dengan konsumsi rumah tangga (RT) dan mobilitas masyarakat di tengah optimisme yang terjaga pada HBKN Nataru dan libur sekolah. Aktivitas perdagangan melalui perbatasan Kalimantan Barat-Serawak dan pemanfaatan bantuan sosial turut mendorong kinerja LU perdagangan besar dan eceran. Kinerja LU tersebut tercermin dari rata-rata Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada pada level optimis (128,78), walaupun melambat dari rata-rata IKK triwulan III 2022 yang sebesar 136.50. Hal ini didukung oleh ekspektasi dan kondisi eksisting penghasilan, dan pengeluaran tahan lama masyarakat yang masih pada level optimis.

Kinerja baik LU perdagangan besar dan eceran turut dipicu oleh pertumbuhan kredit konsumsi yang tumbuh 12,88% (yoy) pada Triwulan IV 2022, tetap tinggi meskipun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 14,07% (yoy). Pertumbuhan kredit konsumsi terutama ditopang oleh peningkatan pertumbuhan kredit kendaraan roda 4 dan roda 2, serta kredit multiguna yang masing-masing tumbuh 30,03%, 3,19%, serta 10,64% (yoy) pada triwulan IV 2022. Peningkatan konsumsi turut didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat akibat harga tandan buah segar (TBS) yang berangsur pulih di tengah produktivitas yang lebih baik.



Sumber: Survei Konsumen KPwBI Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.4. Hasil Survei Konsumen (Triwulan)



Sumber: Cognos Bank Indonesia, diolah

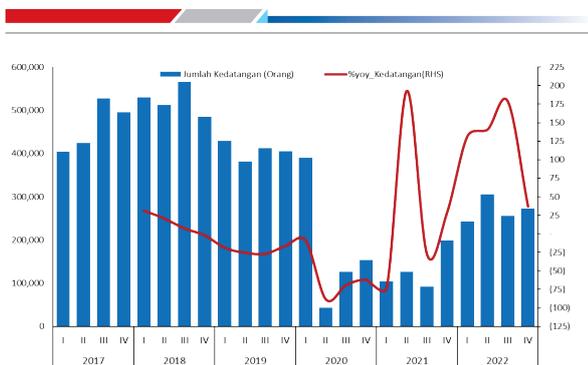
Grafik 1.5. Perkembangan Kredit Kendaraan dan Multiguna Prov. Kalimantan Barat

1.2.2. Transportasi dan Pergudangan

Kinerja LU transportasi dan pergudangan pada triwulan IV 2022 tumbuh 14,44% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang tumbuh 40,03% (yoy). Pertumbuhan LU transportasi dan pergudangan yang melambat pada Triwulan IV 2022 tercermin dari perlambatan pertumbuhan *traffic* kedatangan dan keberangkatan ke/dari Bandara Supadio. Jumlah kedatangan orang melalui Bandara Supadio tercatat tumbuh 36,90% (yoy) pada triwulan IV 2022, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 178,68% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, jumlah keberangkatan orang dari Bandara Supadio tercatat tumbuh 33,64% (yoy) pada triwulan IV 2022, melambat dibandingkan dengan triwulan

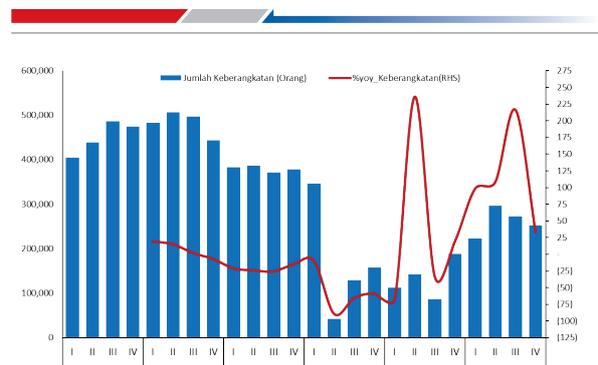
sebelumnya yang tumbuh 216,57% (yoy). Meskipun melambat, kinerja LU transportasi dan pergudangan tetap tumbuh impresif ditopang oleh mobilitas masyarakat di tengah pelonggaran syarat perjalanan dalam negeri, libur sekolah, dan HBKN Natal.

Kinerja LU transportasi dan pergudangan Triwulan IV 2022 juga ditopang oleh perkembangan aktivitas bongkar muat barang pelabuhan di Kalimantan Barat. Jumlah bongkar melalui pelabuhan tercatat tumbuh 91,61% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 121,87% (yoy). Sementara, jumlah muat barang pelabuhan tercatat tumbuh sebesar 123,58% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 93,90% (yoy).



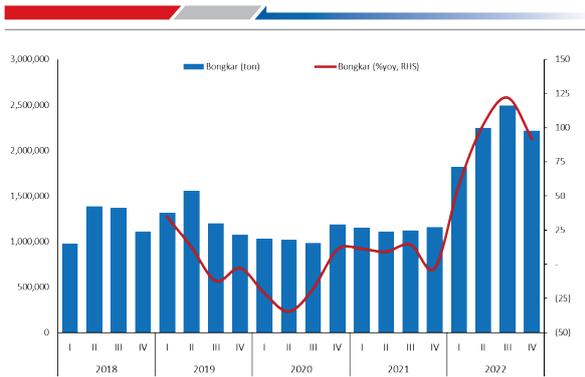
Sumber: Angkasa Pura II, diolah

Grafik 1.6. Kedatangan Orang melalui Transportasi Udara ke Bandara Supadio



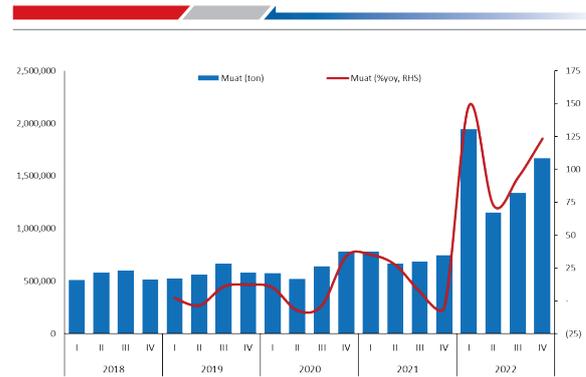
Sumber: Angkasa Pura II, diolah

Grafik 1.7. Keberangkatan Orang melalui Transportasi Udara dari Bandara Supadio



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.8. Perkembangan Jumlah Bongkar Barang pada Pelabuhan di Kalimantan Barat



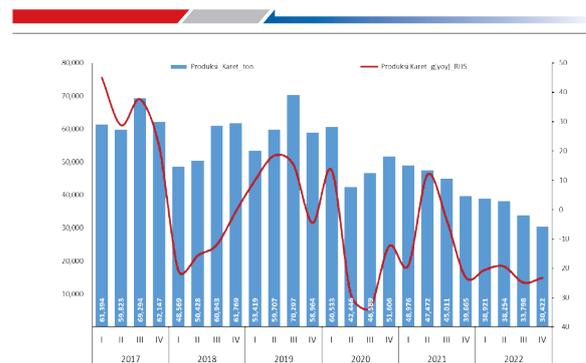
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.9. Perkembangan Jumlah Muat Barang pada Pelabuhan di Kalimantan Barat

1.2.3. Industri Pengolahan

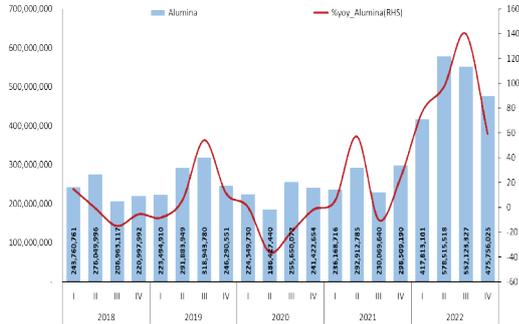
LU industri pengolahan mengalami peningkatan pertumbuhan pada triwulan IV 2022. Kinerja industri pengolahan tercatat tumbuh 9,61% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang tumbuh 6,46% (yoy). Peningkatan pertumbuhan LU industri pengolahan dipengaruhi oleh volume produksi industri pengolahan CPO yang tumbuh 40,69% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 40,05% (yoy). Peningkatan volume produksi CPO sejalan dengan beberapa faktor antara lain (1) ketersediaan bahan baku tandan buah segar (TBS) yang meningkat akibat siklus musim panen dan pemupukan pada semester I 2022, (2) perpanjangan kebijakan penghapusan pungutan ekspor (PE) *crude palm oil* (CPO) mulai 15 Juli 2022 s/d. 31 Desember 2022, serta (3) produksi produk substitusi CPO yang *underperform* seiring dengan musim dingin pada sentra produksi. Peningkatan kapasitas produksi alumina di Kalimantan Barat turut mendorong kinerja industri pengolahan. Hal ini tercermin dari volume ekspor alumina Kalimantan Barat yang tercatat 475 ribu ton, atau tumbuh 59,38% (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Selain itu, peningkatan kinerja LU industri pengolahan turut tercermin dari jumlah KWh listrik industri yang tumbuh 15,99% (yoy) pada triwulan IV, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,69% (yoy).

Peningkatan kinerja LU industri pengolahan triwulan IV 2022 yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja industri pengolahan karet yang melanjutkan kontraksi produksi. Faktor yang memengaruhi adalah masih berlanjutnya kesulitan memperoleh bahan baku di tengah penurunan produktivitas karet alam dan konversi lahan karet menjadi komoditas lainnya karena perkembangan *margin* karet yang *inferior* dibandingkan komoditas lainnya. Volume produksi karet tercatat terkontraksi 23,30% (yoy), relatif sama dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 24,91% (yoy). Pada sisi pembiayaan, kredit LU industri pengolahan mengalami kontraksi 44,15% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang -18,10% (yoy).



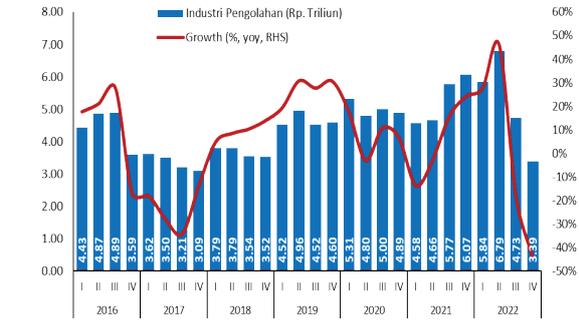
Sumber: Gapkindo Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.10. Perkembangan Produksi Karet



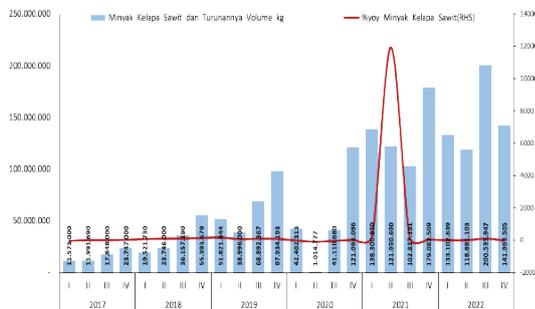
Sumber: Bea Cukai Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.11. Volume Ekspor Alumina Triwulanan



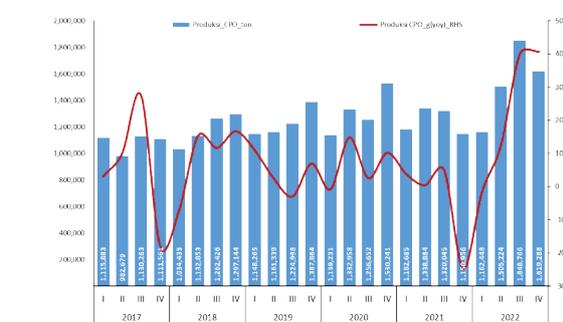
Sumber: Cognos BI, diolah

Grafik 1.12. Kredit LU Industri Pengolahan



Sumber: Bea Cukai Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.13. Volume Ekspor CPO Triwulanan



Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Barat, diolah

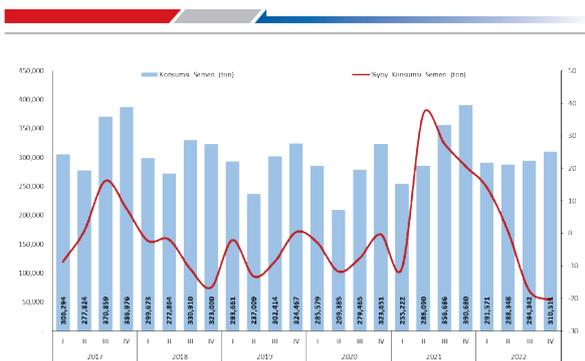
Grafik 1.14. Volume Produksi CPO Triwulanan

1.2.4. Konstruksi

LU konstruksi pada triwulan IV 2022 tumbuh 2,92% (yoy), berbalik dari triwulan sebelumnya yang -7,33% (yoy). Perbaikan kinerja LU konstruksi tercermin dari peningkatan impor material *lime, cement & fabricated construction materials* (SITC 661) dan *iron & steel* (SITC 67) yang masing-masing tumbuh 115,19% dan 176,38% (yoy). Peningkatan kinerja LU konstruksi juga didorong oleh pembangunan infrastruktur yang masih berlangsung seperti Jembatan Sungai Sambas Besar, perbaikan jalan Serawak-Aruk-Simpang Tanjung-Galing & Temajuk-Merbau, dan pembangunan beberapa sekolah negeri. Beberapa proyek yang masuk dalam tahap konstruksi pada triwulan sebelumnya juga turut menopang kinerja LU

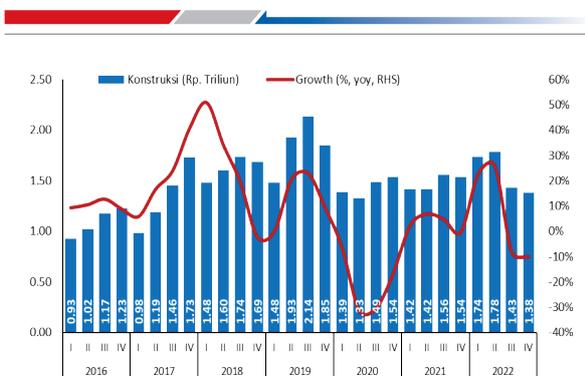
konstruksi, antara lain pelebaran jalan menuju standar ruas Sekadau-Tebelian dan pembangunan jembatan Nanga Pinoh-Ela Hilir-Batas Kalteng CS, serta duplikasi jembatan Kapuas I.

Peningkatan kinerja LU konstruksi triwulan IV 2022 yang lebih tinggi tertahan oleh kontraksi konsumsi semen di Kalimantan Barat terkontraksi 20,52% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 17,48% (yoy). Selain itu, pembiayaan LU konstruksi turut mengalami penurunan kinerja, tercermin dari kredit LU konstruksi yang terkontraksi 9,96% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 8,15 (yoy). Realisasi belanja modal APBN Kementerian/Lembaga dan APBD Pemprov dan



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 1.15. Konsumsi Semen



Sumber: Cognos Bank Indonesia, diolah

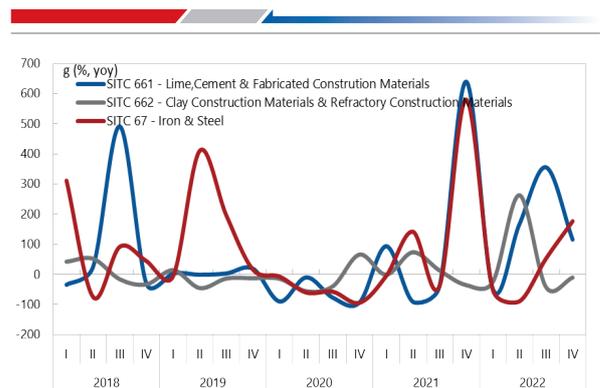
Grafik 1.17. Kredit LU Konstruksi

Kab/Kota di Kalimantan Barat pada Triwulan IV 2022, turut lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja modal APBN Kementerian/Lembaga dan APBD Pemrov dan Kab/ Kota di Kalimantan Barat masing-masing -22,85% dan -15,89% (yoy).

Tabel 1.3. Penyerapan Belanja Modal APBD Kalimantan Barat dan APBN s/d. Triwulan IV 2022 (Rp miliar)

Belanja Modal	Pagu		Realisasi s.d Tw IV		% Realisasi Tw III		% Perubahan (yoy)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Pagu	Realisasi
APBD Pemprov + Kab/Kota	5,297.36	4,150.99	4,601.78	3,550.29	86.87	85.53	-21.64	-22.85
APBN	3,164.50	2,624.11	3,003.67	2,526.38	94.92	96.28	-17.08	-15.89

Sumber: Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat, diolah

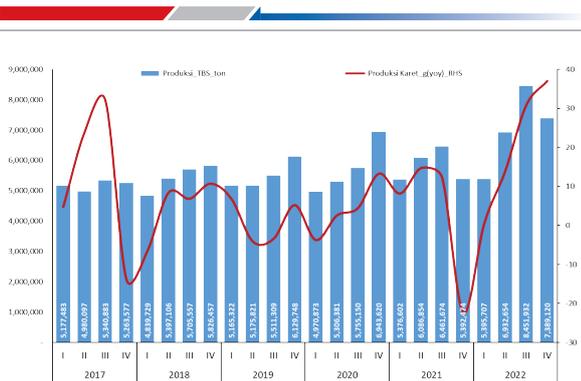


Sumber: Bea Cukai Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.16. Impor Material Konstruksi

1.2.5. Pertanian

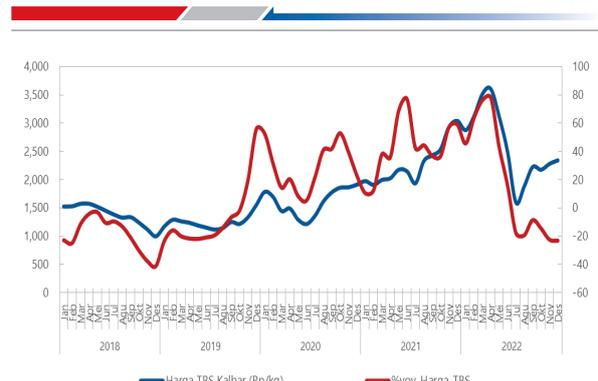
Kinerja LU pertanian pada triwulan IV 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan. LU pertanian tercatat tumbuh 12,39% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,46% (yoy). Peningkatan kinerja LU pertanian ditopang oleh peningkatan volume produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Barat. Volume produksi TBS tercatat tumbuh 37,03% (yoy) pada triwulan IV 2022, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 30,80% (yoy). Peningkatan pertumbuhan volume produksi TBS didorong oleh produktivitas TBS yang lebih baik karena penurunan dampak musim trek 2019. Selain itu, kondisi cuaca yang lebih kondusif dan program mitigasi banjir oleh pemerintah daerah, mendorong aktivitas panen TBS yang lebih intensif dibandingkan TW IV 2021 yang terdampak banjir. Perpanjangan kebijakan pemerintah pusat berupa relaksasi pungutan ekspor CPO hingga akhir Triwulan IV 2022 turut mendorong peningkatan serapan TBS Kalimantan Barat yang diolah. Perpanjangan kebijakan ini juga mendorong perbaikan harga TBS Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022.



Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.18. Perkembangan Produksi TBS Kelapa Sawit

Produksi padi pada triwulan IV 2022 mengalami peningkatan kinerja dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2022, luas lahan panen padi tumbuh 25,40% (yoy), berbalik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 24,24% (yoy). Hal ini sejalan dengan aktivitas panen padi pada sentra produksi yang lebih intensif di tengah cuaca yang mendukung dan dampak banjir yang tidak separah di triwulan IV 2021 lalu. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas tanam padi sawah pada triwulan IV 2022 turut mengalami pertumbuhan. Luas tanam padi sawah mengalami pertumbuhan 5,74% (yoy), melanjutkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 10,33% (yoy). Pertumbuhan luas tanam padi sawah ini diperkirakan akan berdampak positif pada luas lahan panen/produksi padi pada triwulan I 2023



Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.19. Perkembangan Harga TBS (Kelapa Sawit) Prov. Kalimantan Barat

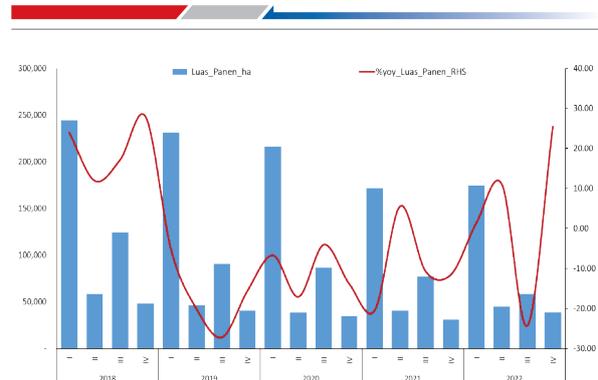
yang merupakan puncak panen padi berdasarkan dinas terkait.

Peningkatan pertumbuhan LU pertanian triwulan IV 2022 tertahan oleh tren penurunan produksi karet di Kalimantan Barat yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Produksi karet mengalami penurunan secara nominal. Volume produksi karet tercatat sebesar 30,42 ribu ton atau berkontraksi 23,30% (yoy), lebih rendah dari triwulan III 2022 yang sebesar 33,79 ribu ton atau berkontraksi 24,91% (yoy). Tren penurunan yang berlanjut ini disebabkan oleh produktivitas karet alam yang menurun karena usia tanaman yang sudah tua, kondisi cuaca kemarau basah, serta alih lahan pertanian ke komoditas yang saat ini menawarkan *margin* lebih tinggi.



Sumber: Dinas Pertanian Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.20. Perkembangan Luas Lahan Tanam Sawah



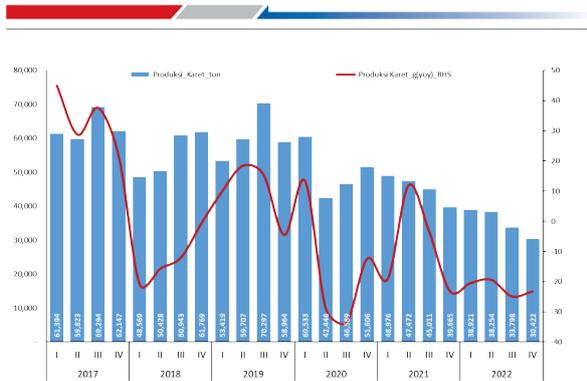
Sumber: Dinas Pertanian Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.21. Perkembangan Luas Lahan Panen Sawah

Tabel 1.4. Perkembangan Luas Lahan Panen Sawah Kabupaten/Kota (Ha)

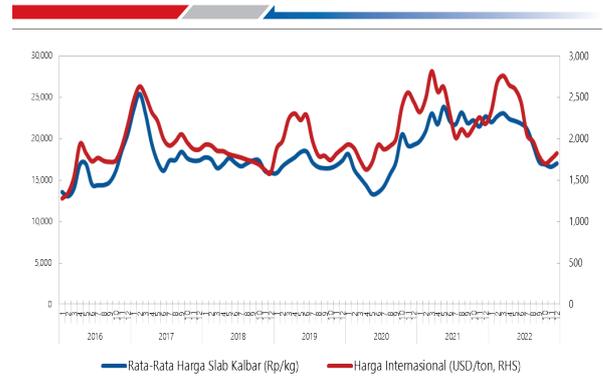
Kab/Kota	2020				2021				2022				Perubahan Luas Panen Thd			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	Tw IV 2021 (ha)	Tw IV 2021 (%) (yoy)	Tw III 2022 (ha)	Tw III 2022 (%) (qta)
Sambas	56.542	5.448	37.913	11.531	45.873	5.341	34.840	5.349	47.667	9.817	21.509	10.994	5.645	105,53	(10.515)	(48,89)
Bengkayang	8.087	190	5.622	1.649	8.373	10	6.270	847	8.097	22	4.102	1.218	371	43,80	(2.884)	(70,31)
Landak	24.929	5.632	15.974	8.506	28.642	4.873	17.156	11.569	29.917	8.521	16.237	18.009	6.440	55,67	1.772	10,91
Mempawah	10.661	2.004	6.431	3.419	8.313	2.534	4.989	4.611	7.509	3.024	4.768	4.528	(83)	(1,80)	(240)	(5,03)
Sanggau	35.959	3.376	3.303	6.294	15.018	532	1.799	4.254	18.830	1.618	984	881	(3.373)	(79,29)	(103)	(10,47)
Ketapang	14.808	10.649	3.696	428	13.787	8.030	1.978	682	12.398	7.653	2.624	494	(188)	(27,57)	(2.130)	(81,17)
Sintang	12.116	1.379	1.784	247	7.923	4.378	2.375	33	6.814	3.002	1.534	694	662	2.035,38	(840)	(54,76)
Kapuas Hulu	7.170	43	1.447	198	6.790	234	1.458	6	6.835	256	1.048	22	16	266,67	(1.026)	(97,90)
Sekadau	7.868	1.221	1.481	485	6.844	1.565	1.039	103	5.055	1.855	1.335	107	4	3,88	(1.228)	(91,99)
Melawi	4.498	125	725	28	3.177	0	411	42	3.066	0	550	75	33	78,57	(475)	(86,36)
Kayong Utara	6.393	4.494	2.242	724	4.460	6.826	945	739	3.889	6.437	1.111	868	129	17,46	(243)	(21,87)
Kubu Raya	24.716	3.877	2.877	1.642	20.378	5.742	2.356	2.851	22.130	3.065	1.382	970	(1.881)	(65,97)	(412)	(29,81)
Pontianak	71	0	86	0	146	34	33	41	164	35	6	0	(41)	(100,00)	(6)	(100,00)
Singkawang	2.145	329	2.347	37	2.166	86	2.003	105	2.103	132	1.642	288	183	174,29	(1.354)	(82,46)
Total	215.963	38.687	85.928	35.188	171.890	40.184	77.652	31.231	174.474	45.437	58.832	39.148	7.917	25,35	-19.684	-33,46

Sumber: Dinas Pertanian Prov. Kalimantan Barat, diolah



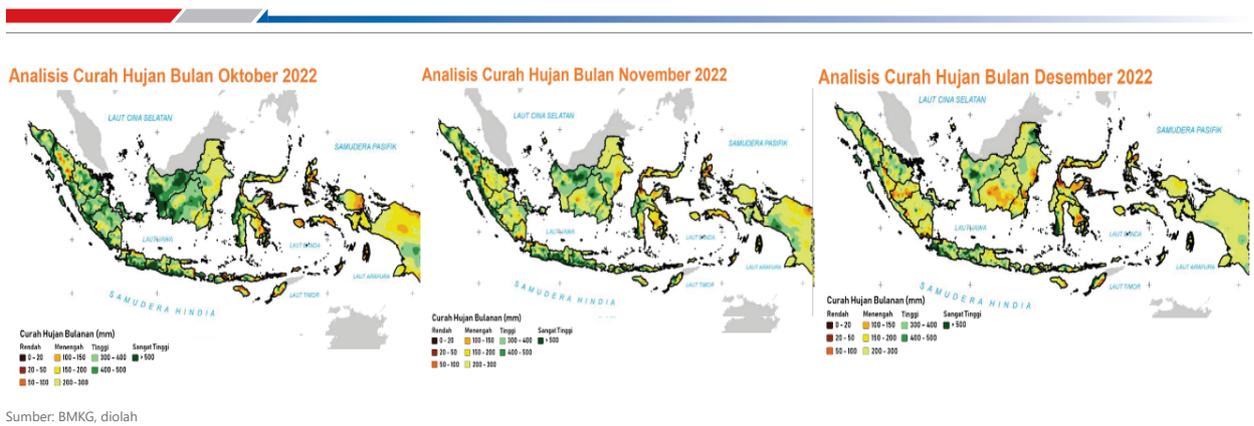
Sumber: Gapkindo Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.22. Perkembangan Produksi Karet



Sumber: Gapkindo Prov. Kalimantan Barat dan Bloomberg, diolah

Grafik 1.23. Perkembangan Harga Karet



Sumber: BMKG, diolah

Grafik 1.24. Analisis Curah Hujan Kalimantan Barat Triwulan IV 2022

Tabel 1.5. Pertumbuhan PDRB Triwulan IV 2022 Sisi Permintaan

Pengeluaran	2020				2021*				2022*				Triwulan IV 2022	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	Pangsa	Andil Pertumbuhan (%)
Konsumsi Rumah Tangga	2,23	-2,03	-0,01	-0,97	0,44	1,57	0,93	3,73	2,38	4,82	4,35	2,93	47,48%	1,49
Konsumsi LNPRT	0,75	-6,14	-3,70	1,54	0,89	7,05	3,38	-9,79	-1,82	0,31	0,46	19,11	1,27%	0,21
Konsumsi Pemerintah	0,12	-1,60	2,58	-3,52	-0,34	10,73	-0,40	-7,46	-6,53	-7,84	-4,60	-6,64	10,96%	-0,77
PMTB	4,77	-1,60	-5,17	-2,09	0,34	4,33	4,57	1,68	1,89	3,50	3,28	3,52	31,07%	1,07
Ekspor	22,21	1,31	19,65	-9,95	6,39	22,15	-14,02	62,01	49,50	46,12	53,97	-10,92	16,95%	-2,17
Impor	27,17	-27,70	-31,34	-41,64	-42,23	-11,57	-17,22	5,02	6,95	10,83	9,86	21,57	6,01%	1,15
Total (yoy)	2,81	-3,49	-4,31	-2,22	-0,09	10,81	4,66	4,31	4,15	4,58	6,53	5,01	100,00	5,01

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

* penyesuaian berdasarkan publikasi terakhir oleh BPS Prov. Kalimantan Barat

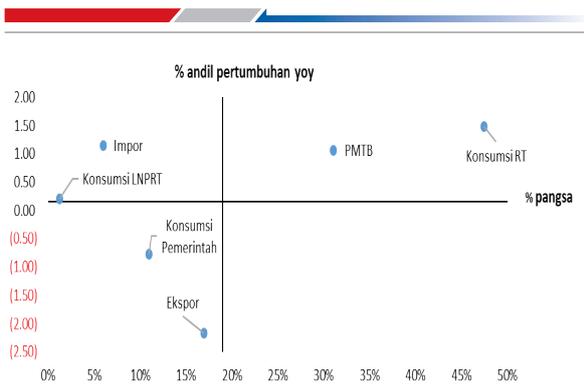
1.3. PERKEMBANGAN EKONOMI SISI PERMINTAAN

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 ditopang oleh pertumbuhan sektor konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan impor. Konsumsi rumah tangga melanjutkan tren pertumbuhan, antara lain didorong oleh kasus Covid-19 yang semakin melandai dan antusiasme di tengah hari besar keagamaan dan nasional (HBKN) Nataru dan liburan sekolah. Penyelenggaraan kegiatan massal dan *meetings, incentives, conferences, exhibitions* (MICE) yang semakin marak turut mendorong kinerja konsumsi RT. Kinerja investasi pada triwulan IV 2022 juga mengalami pertumbuhan positif, didorong oleh aktivitas investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kalimantan Barat. Kinerja konsumsi LNPRT didorong oleh peningkatan aktivitas partai politik dan komunitas non profit lainnya. Peningkatan kinerja didorong oleh peningkatan kinerja impor barang modal di tengah perkembangan konstruksi proyek pemerintah dan peningkatan investasi oleh pelaku usaha. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2022 sisi pengeluaran yang lebih tinggi tertahan oleh kontraksi konsumsi pemerintah dan ekspor. Kontraksi konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh penurunan nominal realisasi belanja APBN dan APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Sementara, penurunan ekspor terutama disebabkan oleh kontraksi nilai ekspor bauksit, minyak kelapa sawit, dan karet pada triwulan IV 2022.

Komponen konsumsi rumah tangga (RT) serta investasi pada triwulan IV 2022 memiliki pangsa terbesar dalam PDRB Kalimantan Barat dengan kumulatif 78,55% dari total PDRB Kalimantan Barat. Pangsa konsumsi RT dan investasi masing-masing tercatat sebesar 47,48% dan 31,07% pada triwulan IV 2022. Pada matriks PDRB sisi pengeluaran yang ditunjukkan pada Grafik 1.29, kinerja investasi dan konsumsi RT berada di kuadran kanan atas yaitu komponen dengan tingkat andil dan pangsa perekonomian berada di atas *threshold*³.

Sementara itu, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah melanjutkan kontraksi pertumbuhan secara berturut-turut. Hal ini menempatkan konsumsi pemerintah pada kuadran kiri - bawah (pangsa maupun andil pertumbuhan di bawah rata-rata). Oleh karena itu perlu dilakukan percepatan realisasi anggaran pemerintah dan daerah agar konsumsi pemerintah dapat berkontribusi lebih baik pada perekonomian ke depan. Selain itu, penyederhanaan prosedur realisasi anggaran dan perbaikan siklus perlu terus dipantau secara berkelanjutan. Perbaikan pada konsumsi pemerintah diharapkan dapat menopang perekonomian khususnya pada saat kinerja ekspor yang terindikasi dapat berpotensi kontraksi akibat adanya kebijakan pelarangan ekspor bauksit mentah di pertengahan 2023.

3. *Threshold* yang digunakan dalam pemetaan matriks adalah 0,16% sebagai batas pada andil pertumbuhan ekonomi daerah dan 19,00% sebagai batas pada pangsa komponen PDRB. Penentuan batas *threshold* yang digunakan merupakan rata-rata pertumbuhan dan pangsa lapangan usaha pada Triwulan berjalan.



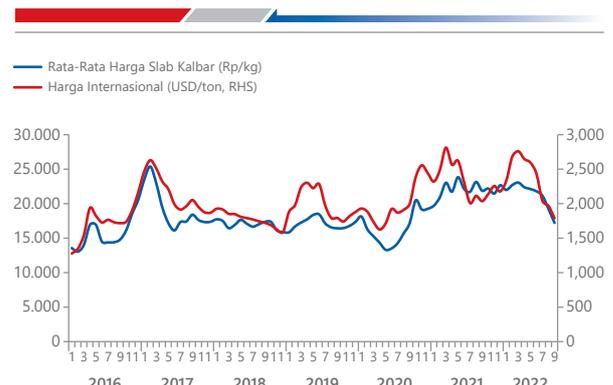
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.25. Pemetaan Matriks Komponen PDRB Sisi Permintaan Triwulan IV 2022

1.3.1. Konsumsi Rumah Tangga

Kinerja konsumsi rumah tangga (RT) melanjutkan tren pertumbuhan positif. Konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 2,93% (yoy), terkoreksi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,35% (yoy). Kinerja positif konsumsi RT antara lain didorong oleh kasus Covid-19 yang semakin melandai dan antusiasme di tengah hari besar keagamaan dan nasional (HBKN) Nataru dan liburan sekolah. Penyelenggaraan kegiatan massal dan *meetings, incentives, conferences, exhibitions* (MICE) yang semakin marak turut mendorong kinerja konsumsi RT. Di sisi mobilitas masyarakat, lalu lintas melalui angkutan udara, peningkatan aktivitas beberapa tempat hiburan, serta pemanfaatan lebih luas *open border* Kalimantan Barat-Serawak memastikan mobilitas yang tumbuh tinggi.

Berdasarkan hasil Survei Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Barat triwulan IV 2022, rata-rata IKK tetap tinggi pada level optimis 128,78, meskipun termoderasi dari rata-rata triwulan sebelumnya yang sebesar 136,5. Hasil survei juga menunjukkan peningkatan optimisme konsumen, tercermin pada rata-rata indeks ekpektasi penghasilan di level 140,67 atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 138,67. Rata-rata indeks survei konsumen lainnya juga menunjukkan level yang persisten tinggi di area optimis pada triwulan IV 2022.



Sumber: Gapkindo Prov. Kalbar dan Bloomberg, diolah

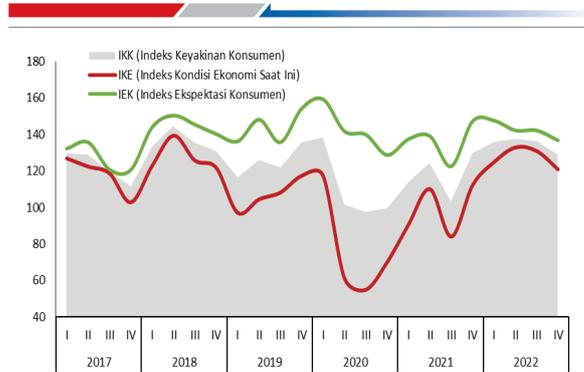
Grafik 1.27. Perkembangan Harga Karet

Kinerja positif konsumsi rumah tangga turut tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengalami peningkatan. Rata-rata NTP tercatat 140,69 pada Triwulan IV 2022, meningkat dibandingkan rata-rata triwulan sebelumnya yang sebesar 132,60. Peningkatan NTP tersebut terutama didorong oleh peningkatan indeks harga yang diterima oleh petani perkebunan rakyat (NTPR) dan hortikultura (NTPH). Rata-rata NTPR dan NTPH tercatat masing-masing 167,11 dan 100,97 pada triwulan IV 2022, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 154,37 dan 99,06. Peningkatan NTP mengindikasikan peningkatan daya beli masyarakat terutama petani pada triwulan IV 2022, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan daya beli masyarakat ini secara langsung/tidak langsung akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat di Kalimantan Barat.

Peningkatan tingkat konsumsi RT juga dapat dicermati dari perkembangan kredit konsumsi. Kredit konsumsi persisten tumbuh tinggi 12,88% (yoy), melanjutkan pertumbuhan di atas 10% dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,07% (yoy). Pertumbuhan kredit konsumsi yang tinggi ini, terutama ditopang oleh peningkatan pertumbuhan kredit kendaraan roda 2 dan roda 4 yang masing-masing meningkat menjadi 3,19% dan 30,03% (yoy) pada Triwulan IV 2022, dari -23,47% dan 25,74% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Selain itu, kredit multiguna turut tumbuh *double digit*

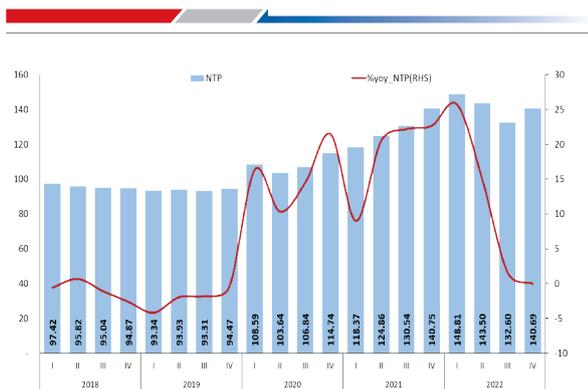
10,64% (yoy), meskipun termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 15,35% (yoy). Perkembangan kredit konsumsi yang baik ini didorong

oleh peningkatan permintaan masyarakat khususnya pada komoditas mobil di tengah perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.



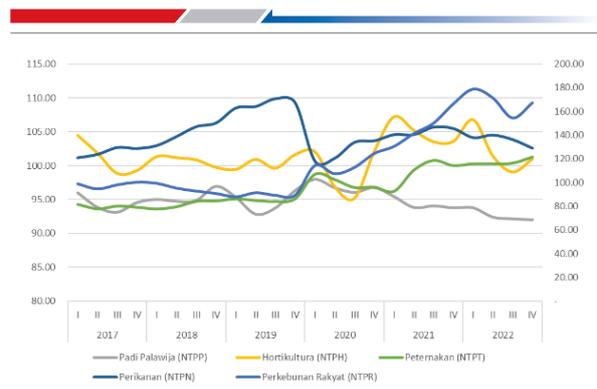
Sumber: Survei Konsumen KPwBI Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.26. Hasil Survei Konsumen (Triwulan)



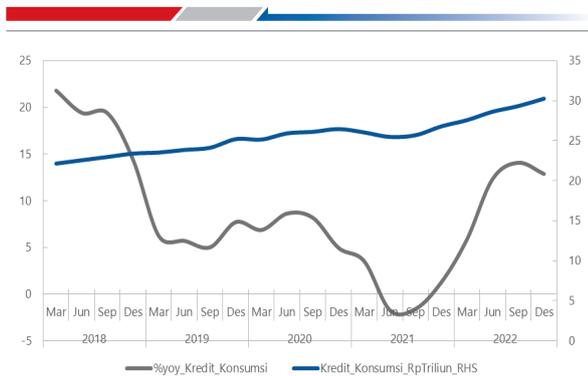
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.27. Perkembangan NTP



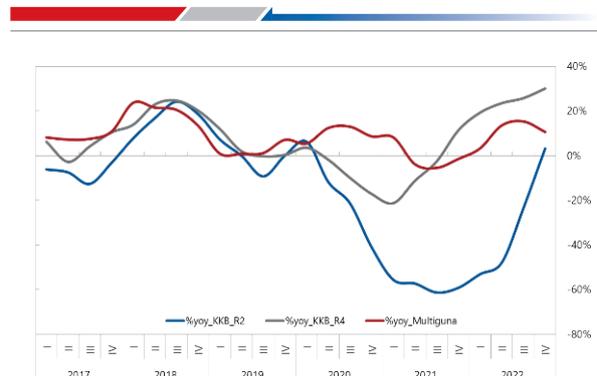
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.28. Perkembangan NTP Subkategori



Sumber: Cognos Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.29. Kredit Konsumsi Prov. Kalimantan Barat



Sumber: Cognos Bank Indonesia, diolah

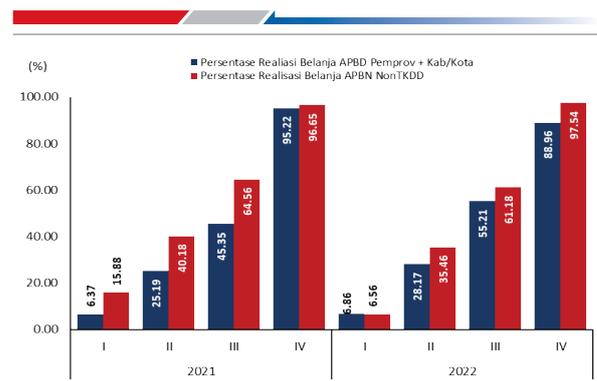
Grafik 1.30. Perkembangan Kredit RT Prov. Kalimantan Barat Berdasarkan Kategori

1.3.2. Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT)

Pertumbuhan komponen konsumsi LNPRT pada triwulan IV 2022 mengalami peningkatan. Pertumbuhan konsumsi LNPRT tercatat sebesar 19,11% (yoy) pada triwulan IV 2022, meningkat dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh 0,46% (yoy). Peningkatan aktivitas partai politik dan komunitas non profit lainnya menjadi penopang kinerja konsumsi LNPRT. Ke depan, LNPRT diperkirakan dapat melanjutkan tren peningkatan pertumbuhan pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan peningkatan intensitas penyelenggaraan aktivitas partai politik menjelang pemilihan umum di awal tahun 2024.

1.3.3. Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2022 melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Konsumsi pemerintah mengalami penurunan sebesar -6,64% (yoy) pada triwulan IV 2022, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang turun sebesar -4,60% (yoy). Kontraksi konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh penurunan nominal realisasi beberapa komponen belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Realisasi komponen belanja APBN nonTransfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp10,24 triliun (realisasi 97,54%), mengalami kontraksi 3,26% (yoy) dibandingkan dengan realisasi s.d. triwulan IV 2021 yang sebesar Rp10,59 triliun (realisasi 96,65%). Hal ini didorong oleh realisasi belanja modal APBN sampai dengan triwulan IV 2022 yang mengalami kontraksi, tercatat Rp2,52 triliun atau terkontraksi 15,89% (yoy) dibandingkan realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp3 triliun. Hal ini antara lain didorong oleh pagu anggaran belanja modal APBN di Kalimantan Barat tahun 2022 (Rp2,62 triliun) yang lebih rendah dibandingkan tahun 2021 (Rp3,16 triliun).



Sumber: Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat

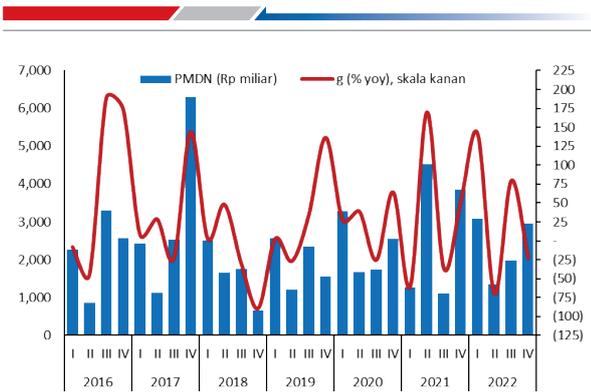
Grafik 1.31. Persentase Realisasi Belanja APBD Pemprov + Kab/Kota & APBN Kalimantan Barat

Realisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota s.d. akhir Triwulan IV 2022 tercatat Rp22,59 triliun, atau turut mengalami kontraksi 12,28% (yoy) dibandingkan realisasi s.d. akhir Triwulan IV 2021 yang sebesar Rp25,76 triliun. Penurunan realisasi belanja APBD ini terutama diakibatkan oleh kontraksi pada komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja transfer yang masing-masing -1,03%, -9,26%, -22,85%, serta -9,67% (yoy) dari periode yang sama tahun 2021.

Secara umum, terdapat penurunan pagu anggaran belanja dan transfer APBD Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Kalimantan Barat tahun 2022 sebesar -6,11% (yoy) dari Rp27,05 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp25,39 triliun pada tahun 2022. Pagu belanja nonTKDD APBN di Kalimantan Barat pada tahun 2022 juga menurun -4,14% (yoy) dari Rp10,96 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp10,50 triliun pada tahun 2022.

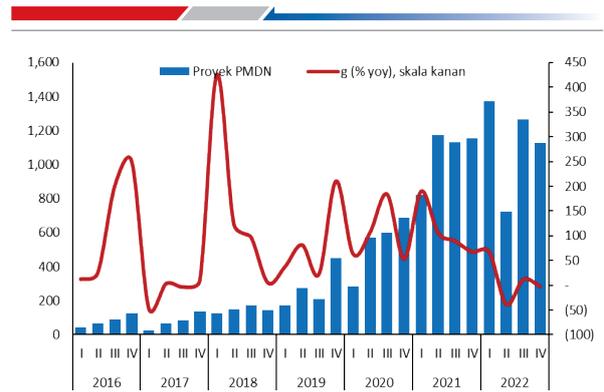
1.3.4. Investasi

Investasi pada triwulan IV 2022 melanjutkan pertumbuhan positif. Kinerja investasi yang tercermin melalui indikator PMTB tercatat tumbuh sebesar 3,52% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,55% (yoy). Hal ini didorong oleh kenaikan realisasi investasi pelaku usaha PMA di Kalimantan Barat yang tumbuh 22,73% (yoy).



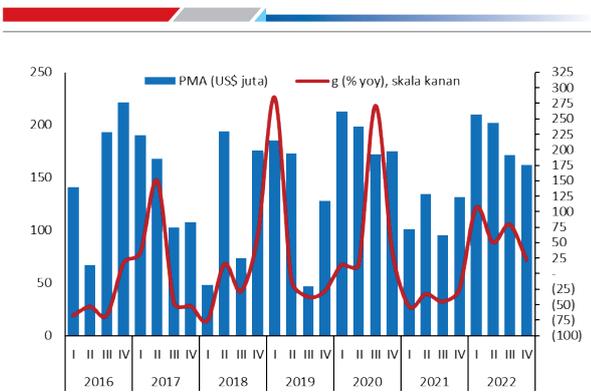
Sumber: DPMPSTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.32. Perkembangan Realisasi PMDN



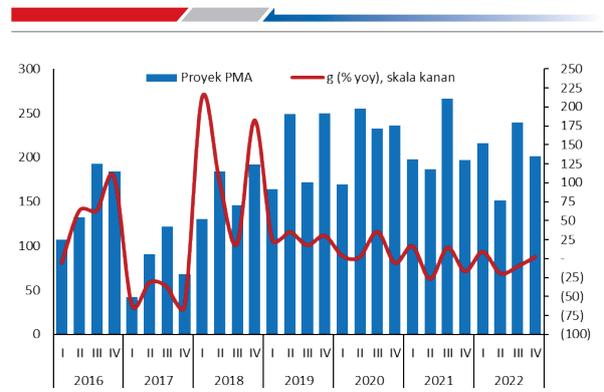
Sumber: DPMPSTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.33. Perkembangan Realisasi PMA



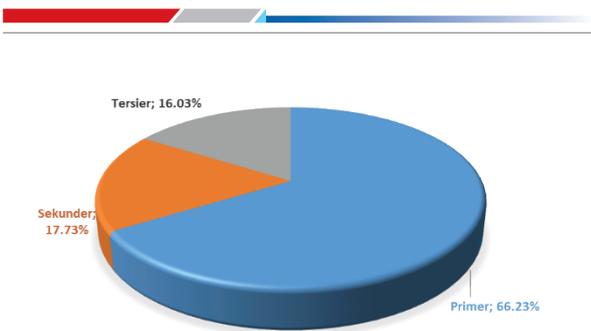
Sumber: DPMPSTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.34. Perkembangan Jumlah Proyek PMDN



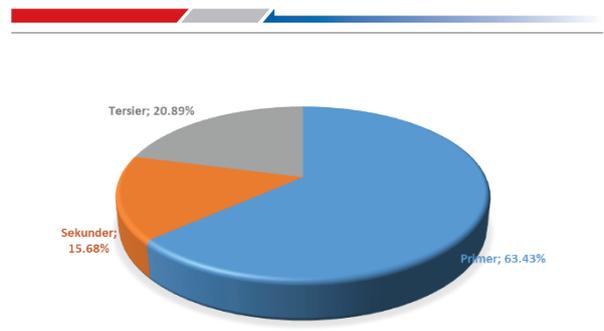
Sumber: DPMPSTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.35. Perkembangan Jumlah Proyek PMA



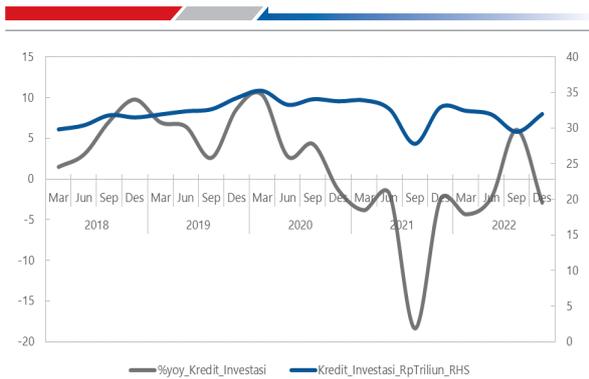
Sumber: DPMPSTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.36. Komposisi PMDN



Sumber: DPMPSTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.37. Komposisi PMA



Sumber: Bank Indonesia, Cognos

Grafik 1.38. Perkembangan Kredit Investasi

Secara kumulatif, realisasi PMA pada triwulan IV 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Realisasi PMA tercatat sebesar USD 161,91 juta atau tumbuh 22,73% (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang sebesar USD 131,92 juta. Pertumbuhan realisasi PMA terjadi pada sektor primer dan tersier dengan tingkat pertumbuhan masing-masing 22,86% (yoy) dan 156,39% (yoy). Berdasarkan bidang usaha, peningkatan PMA terutama didorong oleh investasi pada bidang usaha perkebunan, telekomunikasi, dan industri makan antara lain investasi pada perkebunan buah kelapa sawit, konstruksi infrastruktur telekomunikasi, dan konstruksi fasilitas pengolahan minyak kelapa sawit. Berdasarkan data dari DPMPSTP Provinsi Kalimantan Barat, realisasi PMA tertinggi di Kabupaten Ketapang dengan pangsa 62,72%, menurun dibandingkan pangsa Kabupaten Ketapang pada triwulan sebelumnya yang tercatat 74,84% (yoy).

Peningkatan kinerja investasi yang lebih tinggi tertahan oleh realisasi PMDN yang tercatat terkontraksi 23,14% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya, serta berbalik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 79,34% (yoy). Kontraksi realisasi PMDN terjadi pada sektor sekunder yang terkontraksi 83,29% (yoy). Hal ini didorong oleh penurunan nominal investasi industri logam dasar dibandingkan periode sama tahun lalu, di saat investasi refinery alumina sedang berlangsung. Selain itu, sektor lainnya seperti sektor primer (pertambangan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan) dan tersier (PHR, konstruksi, LGA, transportasi dan pergudangan, perumahan, dan jasa lainnya) mengalami pertumbuhan masing-masing 330,66% (yoy) dan 86,83% (yoy). Pada sektor primer, investasi pada bidang usaha perkebunan menjadi pendorong utama peningkatan, khususnya perkebunan TBS/kelapa sawit. Pada sektor tersier, peningkatan investasi bersumber dari bidang usaha transportasi, khususnya usaha pelayaran dan logistik.

Secara spasial, Kabupaten Ketapang melanjutkan tren sebagai tujuan utama PMA dan PMDN secara akumulatif pada triwulan IV 2022. Realisasi investasi PMA di Kabupaten Ketapang mencapai USD 101,55 juta, disusul oleh Kota Pontianak sebesar USD 31,09 juta. Sejalan dengan itu, realisasi investasi PMDN di Kabupaten Ketapang mencapai Rp.699,30 miliar, meningkat dari triwulan III 2022 yang sebesar Rp269,55 miliar. Sementara itu, Kabupaten Kapuas Hulu menjadi tempat realisasi PMDN terbesar kedua, dengan realisasi sebesar Rp515,32 miliar. Peningkatan

Tabel 1.6. Perkembangan Realisasi PMA per Sektor

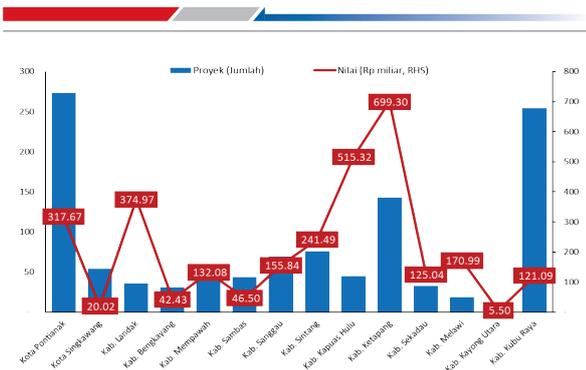
PMA (US\$ Ribuan)	2020				2020	2021				2021	2022				2022
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Primer	84,475	86,738.60	47,045.10	33,108.10	251,366.40	43,437.30	79320.5	42,761.6	83,582.6	249,102.00	120,269.6	122,143.6	127,060.7	102,692.3	472,166.20
Sekunder	94,800	77,405.90	114,357.10	109,103.10	395,665.80	57,169.70	9658.8	49,455.9	35,141.9	151,426.30	80,944.0	59,573.0	36,792.6	25,394.2	202,703.80
Tersier	33,813	34,509.50	11,056.10	32,853.40	112,232.00	970.40	45336.2	3,387.8	13,191.0	62,885.40	8,465.6	20,652.3	7,659.2	33,819.8	70,596.90
Total	213,087	198,654	172,458	175,065	759,264	101,577	134,316	95,605	131,916	463,414	209,679	202,369	171,513	161,906	745,467

Sumber: DPMPSTP Prov. Kalimantan Barat, diolah

Tabel 1.7. Perkembangan Realisasi PMDN per Sektor

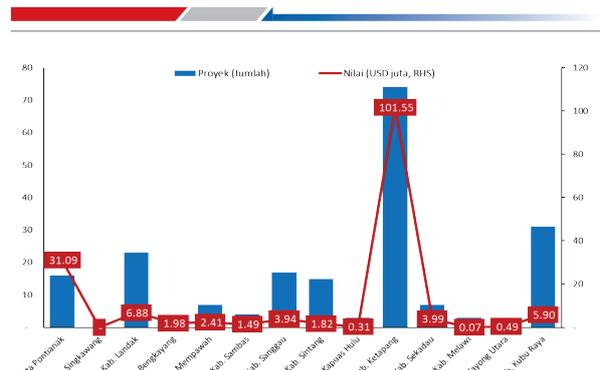
PMDN (Rp Juta)	2020				2020	2021				2021	2022				2022
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Primer	621,653	831,051	571,150	862,271	2,886,125	558,271	1,645,031	546,760	456,491	3,206,554	2,297,015	622,616	852,734	1,965,927	5,738,291.80
Sekunder	426,771	533,311	147,726	1,623,007	2,730,815	603,396	2,094,296	420,751	3,150,790	6,269,233	316,184	444,783	755,401	526,397	2,042,764.20
Tersier	2,227,819	313,553	1,029,811	68,350	3,639,531	110,709	790,403	141,757	254,737	1,297,607	462,929	281,833	381,181	475,925	1,601,867.50
Total	3,276,243	1,677,915	1,748,687	2,553,627	9,256,471	1,272,377	4,529,730	1,109,268	3,862,019	10,773,393	3,076,127	1,349,232	1,989,316	2,968,249	9,382,924

Sumber: DPMPSTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah



Sumber: DPMPSTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.39. Realisasi PMDN per Kabupaten/Kota



Sumber: DPMPSTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.40. Realisasi PMA per Kabupaten/Kota

realisasi PMDN di Kabupaten Kapuas Hulu didorong oleh investasi pada bidang usaha perkebunan, khususnya kelapa sawit.

1.3.5. Ekspor-Impor

1.3.5.1. Ekspor

Kinerja ekspor pada triwulan IV 2022 mengalami kontraksi. Ekspor Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 mengalami kontraksi 10,92% (yoy), berbalik dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh 53,97% (yoy). Kontraksi pertumbuhan kinerja ekspor terutama disebabkan oleh kontraksi nilai ekspor bauksit, minyak kelapa sawit, dan karet. Realisasi nilai ekspor berdasarkan penggolongan SITC tercatat sebesar USD 604,87 juta atau terkontraksi 23,07% (yoy), berbalik dibandingkan pertumbuhan ekspor di triwulan III 2022 yang tumbuh 44,98% (yoy).

Berdasarkan penggolongan SITC, nilai ekspor komoditas minyak kelapa sawit sepanjang triwulan IV 2022 tercatat sebesar USD 113,57 juta atau terkontraksi

42,84% (yoy), berbalik dibandingkan triwulan III 2022 yang sebesar USD 242,24 juta atau tumbuh 140,15% (yoy). Salah satu faktor pendorong penurunan nilai ekspor minyak kelapa sawit secara tahunan yaitu tingkat harga internasional yang lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu (-26,03% (yoy)). Selain itu, volume ekspor minyak kelapa sawit turut mengalami penurunan. Volume ekspor tercatat 141,99 ribu ton atau terkontraksi 20,71% (yoy) pada triwulan IV 2022, berbalik dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat 200,53 ribu ton atau tumbuh 95% (yoy).

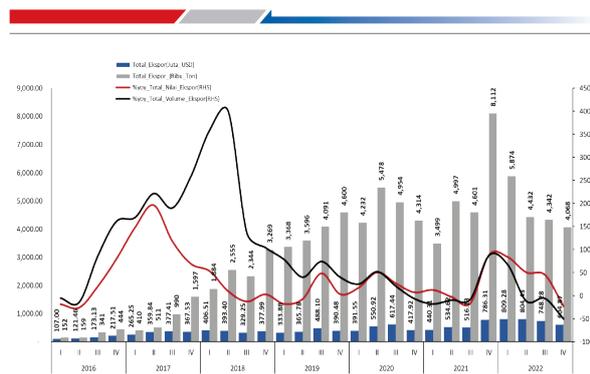
Nilai ekspor komoditas bauksit terkontraksi 50,12% (yoy) menjadi USD 120,31 juta, berbalik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,80% (yoy) atau sebesar USD 129,88 juta. Bahkan secara volume, ekspor bauksit pada triwulan IV 2022 mengalami penurunan lebih dalam, tercatat kontraksi 57,05% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 17,93% (yoy). Penurunan kinerja ekspor bauksit pada triwulan IV 2022 didorong oleh keterbatasan jumlah eksportir bauksit mentah pada

triwulan IV 2022 sejalan dengan pencabutan izin tambang beberapa perusahaan bauksit.

Penurunan kinerja ekspor Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 turut didorong oleh penurunan kinerja ekspor karet. Pada triwulan IV 2022, nilai ekspor karet tercatat sebesar USD 47,99 juta atau berkontraksi 32,38% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 26,36% (yoy) atau dengan nominal USD 57,53 juta. Secara volume, ekspor karet tercatat 30,42 ribu ton atau menurun sebesar -22,76% (yoy), melanjutkan tren dari triwulan sebelumnya yang turun sebesar -27,35% (yoy) atau dengan volume 32,66 ribu ton. Penurunan kinerja ekspor ini antara lain didorong oleh penutupan beberapa perusahaan industri pengolahan karet di tengah kesulitan mendapatkan bahan baku karet alam yang berlanjut. Hal ini didorong oleh penurunan produksi karet alam yang berlanjut sebagai akibat penurunan produktivitas pohon karet yang sudah tua,

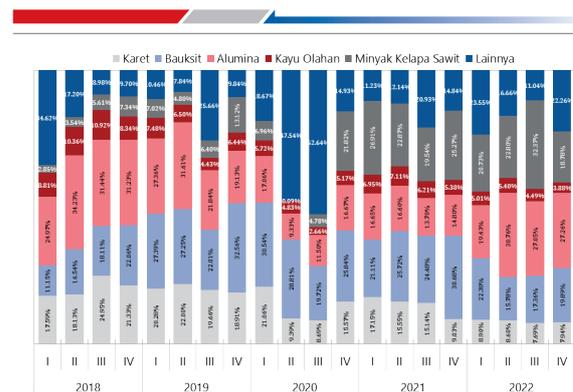
alih lahan kepada komoditas lain dengan *margin* yang lebih tinggi, dan kondisi kemarau basah.

Penurunan kinerja ekspor yang lebih dalam tertahan oleh kinerja positif ekspor komoditas alumina. Nilai ekspor alumina tercatat sebesar USD 164,88 juta atau tumbuh 41,70% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh 186,22% (yoy). Secara volume, ekspor alumina tercatat 475 ribu ton atau tumbuh 59,38% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan III 2022 yang tumbuh 139,98% (yoy). Kinerja positif ekspor komoditas alumina di Kalimantan Barat tersebut didorong oleh penambahan kapasitas produksi alumina dengan selesainya pembangunan *refinery* alumina tahap di Kabupaten Ketapang sejak akhir triwulan I 2022. Selain itu, perusahaan terkait terus mempertahankan utilisasi di tingkat yang optimal sehingga menghasilkan volume alumina yang persisten.



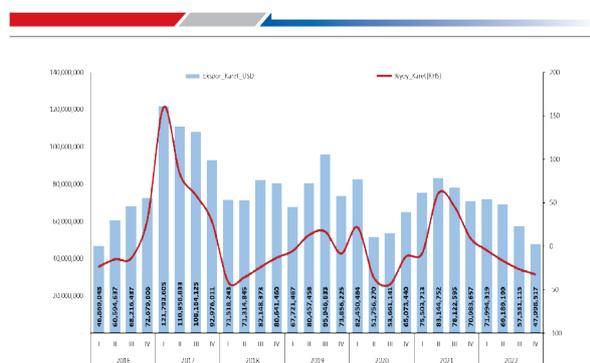
Sumber: Bea Cukai Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.41. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor



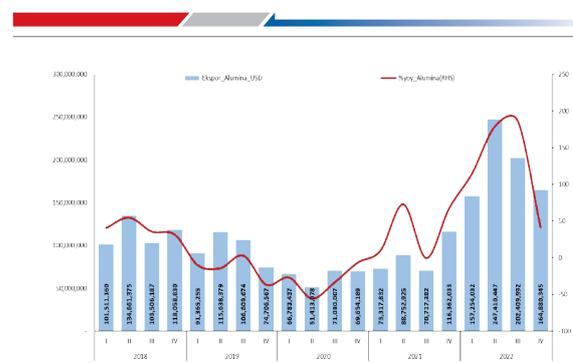
Sumber: Bea Cukai Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.42. Perbandingan Proporsi Nilai Ekspor Komoditas



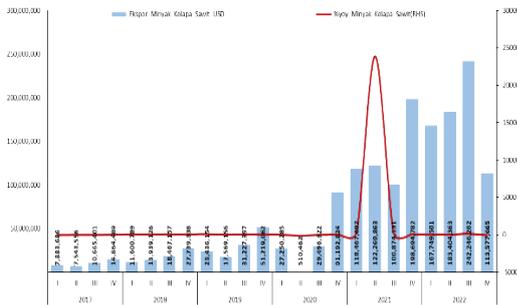
Sumber: Bea Cukai Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.43. Perkembangan Nilai Ekspor Karet (SITC)



Sumber: Bea Cukai Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.44. Perkembangan Nilai Ekspor Alumina (SITC)

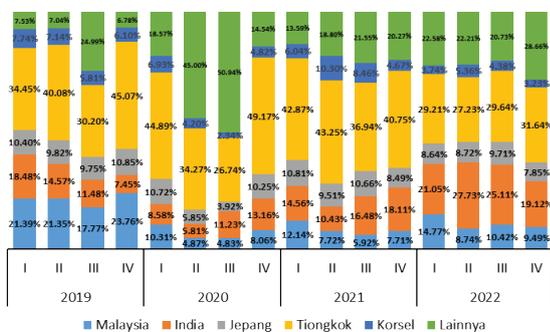


Sumber: Bea Cukai Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.45. Perkembangan Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit (SITC)

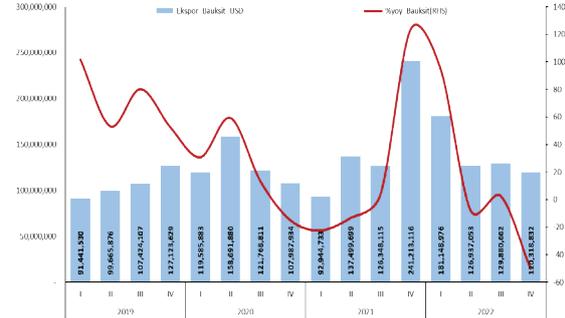
Komposisi negara tujuan ekspor utama Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 masih relatif sama seperti triwulan sebelumnya, meskipun terdapat penurunan pada pangsa serapan ekspor oleh India sejalan dengan penurunan ekspor minyak kelapa sawit dan bauksit ke negara India. Negara Tiongkok, India, dan Malaysia merupakan pasar terbesar bagi komoditas ekspor Kalimantan Barat, dengan pangsa sebesar 60,25% dari total ekspor Kalimantan Barat, meskipun menurun dibandingkan pangsa pada triwulan sebelumnya yang tercatat 65,18%.

Tiongkok dan India masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022, dengan serapan total sebesar 50,76% dari total ekspor Kalimantan Barat. Secara spasial, ekspor ke Tiongkok menjadi yang paling besar, dengan menyumbang 31,64% dari total ekspor, diikuti India



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.47. Perkembangan Pangsa Negara Tujuan Ekspor per Triwulan



Sumber: Bea Cukai Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.46. Perkembangan Nilai Ekspor Bauksit (SITC)

yang menjadi pasar komoditas terbesar kedua, terutama untuk komoditas bauksit dan minyak kelapa sawit.

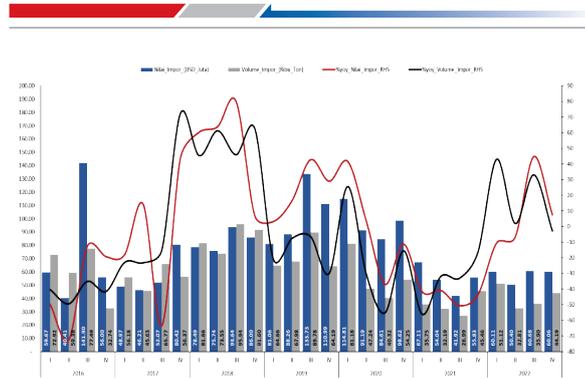
1.3.5.2. Impor

Kinerja impor Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan positif sebesar 21,57% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,86% (yoy). Kinerja positif tersebut tercermin dari nilai impor Kalimantan Barat triwulan IV 2022 yang sebesar USD 60,06 juta atau tumbuh 7,58% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 60,68% (yoy). Secara nominal, nilai impor didominasi oleh nominal impor bahan baku yaitu sebesar 62,87% dari total impor.

Kinerja impor yang positif tercermin dari impor barang modal yang tumbuh 80,52% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 51,12% (yoy). Peningkatan kinerja impor barang modal antara lain didorong oleh perkembangan konstruksi proyek pemerintah dan peningkatan investasi oleh pelaku usaha. Investasi pelaku usaha pada triwulan IV 2022 khususnya pada investasi fasilitas yang mendukung proses bisnis pihak terkait. Selain itu, juga didorong oleh impor perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter yang masih berlangsung. Di kategori bahan baku, impor barang bahan baku berkontraksi 13,04% (yoy), berbalik dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 40,57% (yoy), meskipun

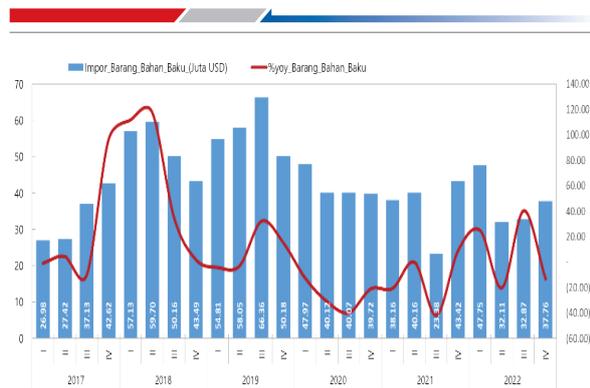
secara nominal impor meningkat. Hal ini didorong oleh perlambatan impor bahan baku pemurnian bauksit yaitu soda api sejalan dengan kinerja lapangan usaha pertambangan bauksit yang mengalami kontraksi pada triwulan IV 2022.

Berdasarkan negara asal, Malaysia dan Tiongkok menjadi negara asal impor terbesar dengan proporsi masing-masing sebesar 38,79% dan 29,55% pada triwulan IV 2022. Sementara itu, proporsi impor dari Singapore mengalami tren penurunan dari 21,16%



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.48. Perkembangan Volume dan Nilai Impor



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.49. Perkembangan Nilai Impor Barang Bahan Baku



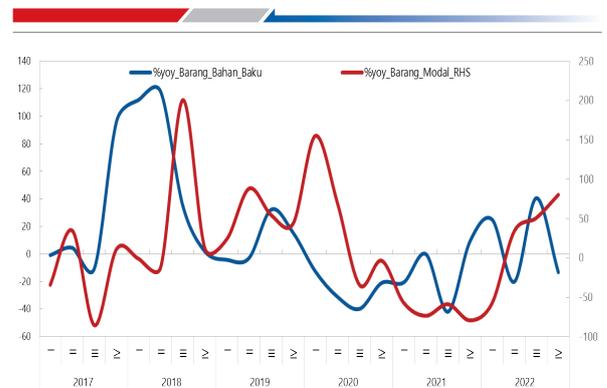
Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.50. Perkembangan Nilai Impor Barang Modal



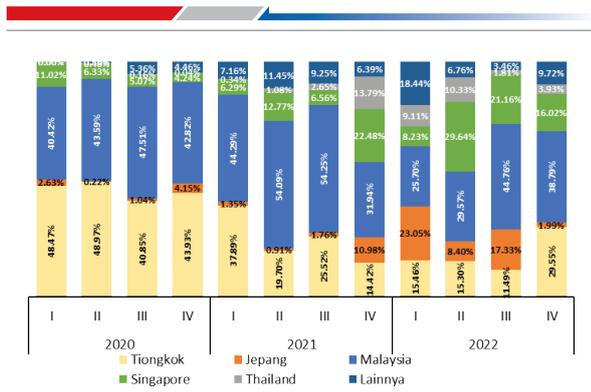
Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.51. Perkembangan Komposisi Komponen Impor



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.52. Pergerakan Pertumbuhan Komponen Impor



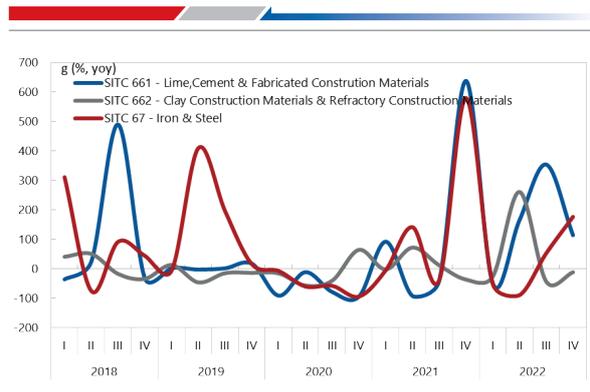
Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 1.53. Perkembangan Pangsa Negara Asal Impor per Triwulan

menjadi 16,02% pada triwulan IV 2022. Impor material konstruksi antara lain impor material *lime, cement & fabricated construction materials* (SITC 661) dan *iron & steel* (SITC 67) mengalami pertumbuhan positif masing-masing 115,19% dan 176,38% (yoy) pada Triwulan IV 2022. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan bahan konstruksi yang meningkat sejalan dengan perkembangan proyek konstruksi pemerintah dan swasta.

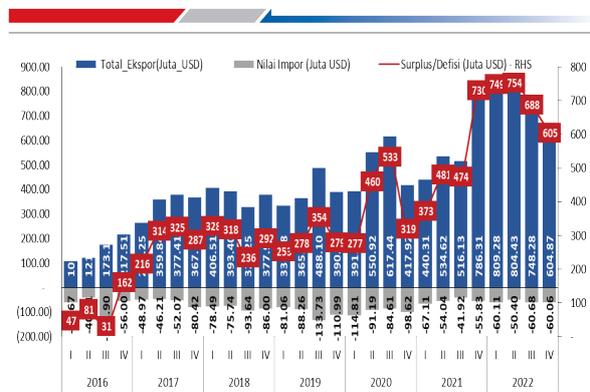
1.3.5.3. Neraca Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Barat

Berdasarkan perkembangan ekspor dan impor luar negeri sepanjang triwulan IV 2022, neraca perdagangan luar negeri Kalimantan Barat terpantau positif walaupun melambat. Neraca perdagangan luar negeri mengalami surplus sebesar USD 605 juta, menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang surplus sebesar USD 688 juta. Penurunan surplus neraca perdagangan disebabkan oleh peningkatan nilai impor dan penurunan nilai ekspor komoditas bauksit, minyak kelapa sawit, dan karet di Triwulan IV 2022.



Sumber: Bea Cukai Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.54. Impor Material Konstruksi



Sumber: Bea Cukai Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 1.55. Neraca Perdagangan Luar Negeri Kalimantan Barat

BOKS 1

Hilirisasi Bauksit Kalimantan Barat di Tengah Rencana Penerapan Larangan Ekspor Bauksit

Kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor bauksit pada Juni 2023 semakin memperkuat komitmen pemerintah dalam melipatgandakan nilai SDA domestik. Kebijakan tersebut akan semakin mengakselerasi hilirisasi bauksit nasional, termasuk di Kalimantan Barat. Cadangan bauksit Indonesia berada di peringkat ke-6 dunia, yaitu sebanyak 1,2 miliar juta ton atau sebesar 4% dari total cadangan bauksit dunia. Di Indonesia sendiri, cadangan bauksit tersebar di berbagai wilayah antara lain Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah. Adapun jumlah cadangan terbesar yaitu di Kalimantan Barat yang mencapai 66,77%. Potensi bauksit tersebut tersebar di beberapa daerah seperti di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang serta beberapa daerah lainnya.

Hilirisasi bauksit di Kalimantan Barat sampai saat ini dilakukan dengan memurnikan bauksit menjadi alumina yang terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu *Smelter Grade Alumina (SGA)* dan *Chemical Grade Alumina (CGA)*. Penjualan alumina baik domestik maupun ekspor saat ini didominasi dalam bentuk SGA. Berangkat dari fakta bahwa harga jual bauksit akan meningkat delapan kali lipat apabila dimurnikan menjadi SGA, maka hal tersebut akan meningkatkan nilai ekspor domestik dan sekaligus memperkuat kinerja LU industri pengolahan. Alumina merupakan komoditas yang prospektif dan memiliki nilai jual tinggi di pasar global seiring kegunaannya di berbagai bidang antara lain industri kosmetik, metalurgi, otomotif, plastik, electrical filler, dan aluminium. Produksi SGA dan CGA pada triwulan IV 2022 di Kalimantan Barat cenderung stabil masing masing sebesar 500 ribu ton/triwulan dan 30,4 ribu ton/triwulan dan diperkirakan relatif tetap sama hingga 2023.

Prospek dan Tantangan

Konversi bauksit menjadi alumina terbukti memiliki prospek tinggi dalam mendukung peningkatan nilai tambah. Berdasarkan data Kantor Wilayah DJBC Provinsi Kalimantan Barat, kontribusi bea keluar bauksit saat ini mendominasi yaitu sekitar 54% dari total pemasukan dari bea keluar untuk seluruh komoditas di Kalimantan Barat. Apalagi kalau dikonversi menjadi alumina maupun aluminium maka berpotensi akan lebih besar lagi kontribusinya terhadap bea keluar. Selain itu, bauksit dan produk turunannya berperan penting dalam menciptakan ekosistem mobil listrik yang saat ini sedang didorong produksinya secara nasional oleh pemerintah. Misalnya, aluminium sebagai bahan untuk membuat *body* mobil yang lebih ringan atau sebagai bahan untuk produksi baterai. Bahkan, baterai aluminium dikatakan 50 kali lebih *powerfull* dibanding Lithium Ion. Pada 2022, ekspor alumina Kalimantan Barat mengalami peningkatan 108% (yoy). Ke depan, negara importir seperti India dan Tiongkok berpotensi terus menyerap pasokan alumina Kalimantan Barat.

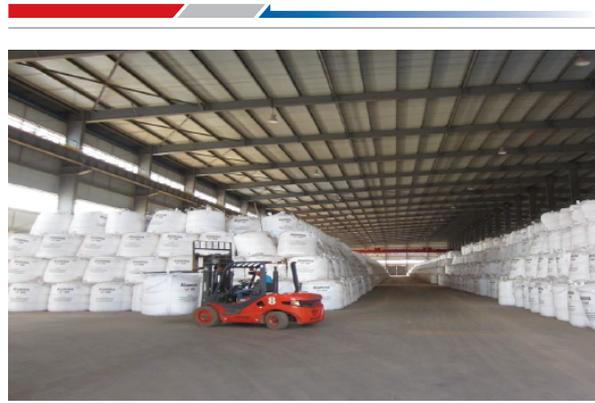
Namun tidak dipungkiri masih terdapat tantangan yang memerlukan solusi praktis mengingat larangan ekspor bauksit tersebut akan mulai diberlakukan di akhir Juni 2023. Pertama, jumlah *refinery* alumina yang beroperasi di Kalimantan Barat masih terbatas (hanya 2 *refinery*) yaitu PT WHW yang memproduksi SGA dan PT ICA yang memproduksi CGA. Sementara PT BAI saat ini belum beroperasi. Rencana pelarangan ekspor bauksit yang akan diberlakukan pada 2023 menimbulkan potensi tidak terserapnya bauksit. Produksi bauksit nasional saat ini sekitar 25,8 juta ton/tahun, sedangkan yang mampu diserap untuk menjadi alumina khusus di Kalimantan Barat hanya sekitar 4 juta ton bauksit.

Apabila pelarangan ekspor bijih bauksit diimplementasikan, maka setidaknya perlu ada beberapa *refinery* alumina lagi untuk menyerap produksi bauksit saat ini yang sebelumnya diekspor. Jika tidak, maka akan terdapat *potential loss* yang dapat merugikan perekonomian Provinsi Kalimantan Barat. Adapun rata-rata investasi yang diperlukan untuk membangun 1 (satu) unit *refinery* alumina berkapasitas 1 juta ton/tahun yaitu 7,7 triliun. Kedua, waktu yang diperlukan untuk membangun *refinery* alumina mulai dari *land clearing* hingga tahap beroperasi cukup lama yaitu sekitar 2 hingga 4 tahun.

Terkait dengan upaya memitigasi tantangan akselerasi hilirisasi bauksit di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong perbankan untuk memberikan dukungan pembiayaan kepada perusahaan tambang yang hendak membangun unit pemurnian bauksit. Selain itu, perlu adanya insentif fiskal bagi pelaku usaha yang mengembangkan hilirisasi bauksit. Insentif fiskal tersebut dapat berupa insentif perpajakan seperti *tax allowance*, *tax holiday*, atau insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin atau barang.



Gambar 1. PT Well Harvest Winning – Kalimantan Barat



Gambar 2. Produk Smester Grade Alumina

BAB II KEUANGAN PEMERINTAH

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT FEBRUARI 2023





Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan perbaikan. Persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 mengalami peningkatan. Realisasi pendapatan tercatat sebesar 107,86% dari pagu atau sebesar Rp6.103,47 miliar. Persentase realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang sebesar 99,91% dari pagu atau Rp6.429 miliar.

Realisasi belanja APBD Provinsi Kalimantan Barat triwulan IV 2022 secara total sebesar Rp5.726,86 miliar atau 95,53% dari pagu. Secara nominal, realisasi nominal belanja menunjukkan penurunan namun lebih tinggi secara persentase jika dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang mencapai Rp6.158,32 miliar atau 92,01% dari pagu.

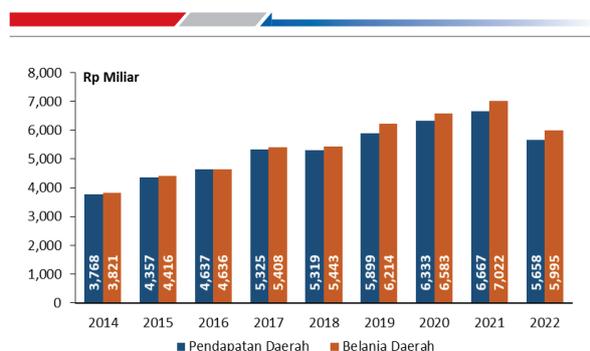
Sementara itu, persentase realisasi belanja Kementerian/Lembaga di Kalimantan Barat hingga triwulan IV 2022 sebesar Rp10.249,67 miliar atau 95,07% dari pagu anggaran. Pencapaian tersebut menurun secara persentase maupun nominal dibandingkan dengan realisasi belanja triwulan IV 2021 yang sebesar Rp10.594,75 miliar atau 96,87% dari pagu.



2.1. APBD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pagu anggaran pendapatan dan belanja pada APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Pagu anggaran pendapatan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 mengalami kontraksi -12,07% (yoy) menjadi Rp5.658,49 miliar. Penurunan pagu anggaran pendapatan tersebut bersumber dari penurunan komponen Dana Alokasi Khusus, Retribusi Daerah, dan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya yang masing-masing tercatat turun sebesar -55,24% (yoy), -74,30% (yoy) dan -1,85% (yoy). Sejalan dengan penurunan pagu pendapatan, pagu anggaran belanja APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar -10,43% (yoy) menjadi Rp5.994,65 miliar. Penurunan pagu anggaran belanja tersebut bersumber dari penurunan pada komponen hibah, belanja modal, belanja tidak terduga, dan bantuan keuangan masing-masing tercatat turun sebesar -79,70% (yoy), -3,25% (yoy), -35,90% (yoy) dan -43,61% (yoy).

Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan triwulan IV 2022 menunjukkan kinerja yang baik. Pada sisi pendapatan, terjadi peningkatan persentase realisasi menjadi sebesar 107,86%, lebih tinggi dari triwulan IV 2021 yang sebesar 99,91%. Sementara dari sisi belanja terjadi peningkatan persentase realisasi dari 92,01% pada triwulan IV 2021 menjadi 95,53% pada triwulan IV 2022.



Sumber: BKAD Prov. Kalimantan Barat

Grafik 2.1. APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

2.1.1. Anggaran Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat

Pagu pendapatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 mengalami kontraksi. Pagu Dana Perimbangan mengalami penurunan sebesar 27,99% (yoy) dari Rp3.748,84 miliar di tahun 2021 menjadi Rp2.699,52 miliar di tahun 2022. Kontraksi Dana Perimbangan didorong oleh penurunan pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar -55,24% dari Rp1.944,51 miliar di tahun 2021 menjadi Rp870,31 miliar di tahun 2022. Selain itu, pagu Retribusi Daerah dan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya juga mengalami pertumbuhan negatif dari tahun sebelumnya yaitu masing-masing sebesar -74,30% (dari Rp36,23 miliar menjadi Rp9,31 miliar) dan -1,85% (dari Rp16,64 miliar menjadi 16,33 miliar).

Sebaliknya pagu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 9,96% dari Rp2.621,96 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2.883,23 miliar pada tahun 2022. Selanjutnya, Lain-lain Pendapatan yang Sah juga mengalami peningkatan sebesar 24,89% dari Rp47,57 miliar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp59,41 miliar tahun 2022.

Persentase realisasi pendapatan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 mengalami peningkatan. Persentase realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp6.103,47 miliar atau 107,86% dari pagu anggaran. Angka persentase realisasi ini lebih tinggi secara persentase apabila dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang sebesar Rp6.429 miliar atau 99,91% dari pagu anggaran. Peningkatan tersebut bersumber dari peningkatan realisasi pada hampir seluruh komponen pendapatan kecuali komponen Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Alokasi Umum yang mengalami penurunan persentase.

Realisasi PAD Provinsi Kalimantan Barat triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp3.217,81 miliar atau sebesar 111,60% dari pagu anggaran. Capaian realisasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi PAD di triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar Rp2.504,67 miliar atau sebesar 95,53% dari pagu anggaran. Berdasarkan pangasanya, pajak daerah merupakan

Tabel 2.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan 2022

Uraian Pos APBD	Pagu		Realisasi s.d. Tw IV		% Realisasi Tw IV		% Perubahan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	APBD	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	2.621,96	2.883,23	2.504,67	3.217,81	95,53	111,60	9,96	28,47
- Pajak Daerah	2.209,65	2.427,16	2.121,95	2.671,66	96,03	110,07	9,84	25,91
- Retribusi Daerah	36,23	9,31	32,04	14,33	88,44	153,84	(74,30)	(55,29)
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	95,73	101,03	95,73	101,12	100,00	100,10	5,53	5,63
- Lain-Lain PAD Yang Sah	280,34	345,73	254,94	430,70	90,94	124,58	23,33	68,94
Dana Perimbangan	3.748,84	2.699,52	3.861,80	2.810,21	103,01	104,10	(27,99)	(27,23)
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	232,08	256,97	429,04	410,15	184,86	159,61	10,72	(4,40)
- Dana Alokasi Umum	1.572,25	1.572,25	1.572,25	1.553,30	100,00	98,80	-	(1,20)
- Dana Alokasi Khusus	1.944,51	870,31	1.860,52	846,76	95,68	97,29	(55,24)	(54,49)
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	16,64	16,33	16,64	16,33	100,00	100,00	(1,85)	(1,85)
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	47,57	59,41	45,89	59,12	96,47	99,51	24,89	28,83
- Hibah	47,57	59,41	45,89	59,12	96,47	124,28	24,89	28,83
- Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bantuan Keuangan dari Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Pendapatan Daerah	6.435,00	5.658,49	6.429,00	6.103,47	99,91	107,86	(12,07)	(5,06)

*) Data unaudited **) Dalam Rp miliar
Sumber: BKAD Prov. Kalimantan Barat

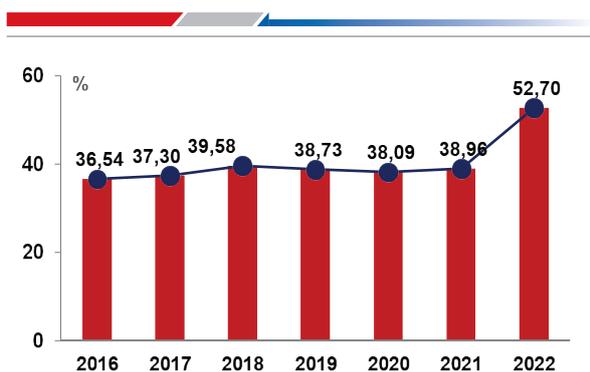
komponen PAD dengan porsi realisasi terbesar, mencapai 83,03% dari total realisasi PAD Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan triwulan IV 2022.

Persentase realisasi pajak daerah hingga triwulan IV 2022 sebesar 110,07%, meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang sebesar 96,03%.

Peningkatan juga terjadi secara nominal, di mana realisasi pajak daerah hingga triwulan IV 2022 mencapai Rp2.671,66 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp2.121,95 miliar pada triwulan IV 2021. Realisasi komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan mencapai Rp101,12 miliar atau 100,10% dari pagu anggaran, lebih tinggi dari triwulan IV 2021 yang realisasinya sebesar Rp95,73 miliar atau 100% dari pagu anggaran. Komponen lain-lain PAD yang sah juga mengalami peningkatan secara nominal dari Rp254,94 miliar atau 90,94% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2021 menjadi Rp430,70 miliar atau 124,58% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2022. Sementara itu, komponen retribusi daerah mengalami penurunan secara nominal dari Rp32,04 miliar menjadi Rp14,33 miliar pada triwulan IV 2022, namun realisasinya meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 dari 88,44%

menjadi 153,84%. Realisasi komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah juga mengalami peningkatan sebesar 28,83% dari Rp45,89 miliar atau 96,47% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2021 menjadi Rp59,12 miliar atau 99,51% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2022.

Realisasi Dana Perimbangan hingga triwulan IV 2022 mengalami penurunan secara nominal namun meningkat secara persentase realisasi yaitu dari sebesar Rp3.861,80 miliar atau 103,01% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2021 menjadi Rp2.810,21 miliar atau 104,10% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2022. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan realisasi secara nominal pada komponen Dana Alokasi Khusus dari Rp1.860,52 miliar atau 95,68% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2021 menjadi Rp846,76 atau 97,29% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2022. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak juga mengalami penurunan dari Rp429,04 miliar atau 184,86% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2021 menjadi Rp410,15 miliar atau 159,61% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2022. Sejalan dengan hal tersebut, Dana Alokasi Umum juga mengalami penurunan dari Rp1.572,25 miliar atau 100% dari pagu



*) Data unaudited
Sumber: BKAD Prov. Kalimantan Barat

Grafik 2.2. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2016-2022

anggaran pada triwulan IV 2021 menjadi Rp1.553,30 miliar atau 98,80% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2022. Selanjutnya, realisasi komponen Transfer Pemerintah Pusat Lainnya turut mengalami penurunan dari Rp16,64 miliar atau 100% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2021 menjadi sebesar Rp16,33 miliar atau 100% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2022.

Rasio Kemandirian Fiskal Provinsi Kalimantan Barat triwulan IV 2022 tercatat sebesar 52,70%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode triwulan IV 2021 yang sebesar 38,96%. Dapat diinformasikan bahwa secara nominal realisasi PAD Provinsi Kalimantan Barat sudah lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Dana Perimbangan. Nominal realisasi PAD pada triwulan IV 2022 tercatat

Rp3.217,81 miliar, lebih tinggi dibandingkan dari realisasi Dana Perimbangan yang sebesar Rp2.810,21 miliar. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan ketergantungan Kalimantan Barat terhadap anggaran dari pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah.

2.1.2. Anggaran Belanja Provinsi Kalimantan Barat

Pagu anggaran belanja pada APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 sebesar Rp5.994,65 miliar atau tumbuh negatif sebesar -10,43% dari anggaran belanja tahun 2021 yang sebesar Rp6.693,02 miliar. Penurunan terjadi pada sebagian besar komponen anggaran belanja kecuali belanja pegawai, belanja barang, bantuan sosial, dan bagi hasil pajak.

Pagu anggaran hibah menurun signifikan sebesar -79,70% dari Rp1.222,21 miliar di tahun 2021 menjadi Rp248,12 miliar di tahun 2022. Komponen Belanja Modal juga mengalami penurunan signifikan sebesar -3,25% dari Rp1.080,86 di tahun 2021 menjadi Rp1.045,72 miliar di tahun 2022. Belanja Tidak Terduga juga turun sebesar -35,90% dari Rp14,98 miliar di tahun 2021 menjadi Rp9,60 miliar di tahun 2022. Sementara itu, komponen belanja yang mengalami peningkatan adalah belanja pegawai, belanja barang, bantuan sosial, dan bagi hasil pajak dengan peningkatan

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan 2022

Uraian Pos APBD	Pagu		Realisasi s.d. Tw IV		% Realisasi Tw IV		% Perubahan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	APBD	Realisasi
Belanja	5.528,03	4.799,01	5.011,66	4.547,37	90,66	94,76	(13,19)	(9,26)
- Belanja Pegawai	1.455,11	1.600,97	1.394,41	1.510,99	95,83	94,38	10,02	8,36
- Belanja Barang	1.749,00	1.886,14	1.514,45	1.785,37	86,59	94,66	7,84	17,89
- Hibah	1.222,21	248,12	1.200,29	238,16	98,21	95,99	(79,70)	(80,16)
- Bantuan Sosial	5,88	8,46	5,79	8,42	98,58	99,59	43,91	45,38
- Belanja Modal	1.080,86	1.045,72	894,92	1.003,97	82,80	96,01	(3,25)	12,18
- Belanja Tidak Terduga	14,98	9,60	1,793	0,47	11,97	4,85	(35,90)	(74,02)
Transfer	1.164,99	1.195,64	1.146,65	1.179,49	123,85	101,24	2,63	2,86
- Bagi Hasil Pajak	1.080,79	1.148,16	1.073,86	1.140,66	115,99	105,54	6,23	6,22
- Bantuan Keuangan	84,20	47,48	72,80	38,83	86,45	81,78	(43,61)	(46,66)
Total Belanja Daerah	6.693,02	5.994,65	6.158,32	5.726,86	92,01	95,53	(10,43)	(7,01)

*) Data unaudited **) Dalam Rp miliar
Sumber: BKAD Prov. Kalbar

masing-masing tercatat sebesar Rp1.600,97 miliar atau 10,02% (yoy), Rp1.886,14 miliar atau 7,84% (yoy), Rp8,46 miliar atau 45,38% (yoy) dan Rp1.148,16 miliar atau 6,23% (yoy).

Realisasi belanja APBD Provinsi Kalimantan Barat triwulan IV 2022 secara total sebesar Rp5.726,86 miliar atau 95,53% dari pagu anggaran. Realisasi nominal belanja APBD tersebut menunjukkan penurunan secara nominal namun lebih tinggi secara persentase jika dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang mencapai Rp6.158,32 miliar atau 92,01% dari pagu anggaran. Penurunan realisasi belanja Provinsi Kalimantan Barat bersumber dari penurunan realisasi pada komponen belanja hibah, belanja tidak terduga, dan bantuan keuangan. Realisasi belanja hibah mengalami penurunan secara nominal menjadi Rp238,16 miliar atau 95,99% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2022 yang sebelumnya sebesar Rp1.200,29 miliar atau 98,21% dari pagu anggaran. Belanja tidak terduga juga menurun dari Rp1,79 miliar atau 11,97% (yoy) dari pagu anggaran pada triwulan IV 2021 menjadi Rp0,47 miliar atau 4,85% (yoy) dari pagu anggaran pada triwulan IV 2022. Selanjutnya, realisasi bantuan keuangan yang sebelumnya sebesar Rp72,80 miliar atau 86,45% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2021 menjadi Rp38,83 miliar atau 81,78% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2022.

Sementara itu, realisasi belanja pegawai, belanja barang, bantuan sosial, belanja modal dan bagi hasil pajak rata-rata mencapai target dari pagu yang telah

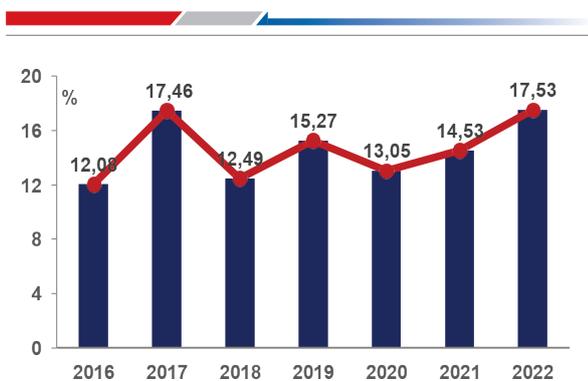
ditentukan pada triwulan IV 2022. Realisasi belanja pegawai tercatat 94,38% dari pagu anggaran, realisasi belanja barang tercatat 94,66% dari pagu anggaran, realisasi bantuan sosial tercatat 99,59% dari pagu anggaran, realisasi belanja modal tercatat 96,01% dari pagu anggaran, dan hanya bagi hasil pajak yang realisasinya diatas pagu anggaran yaitu tercatat sebesar 105,54%.

Rasio realisasi Belanja Modal terhadap total realisasi belanja hingga triwulan IV 2022 tercatat meningkat dari 14,53% pada triwulan IV 2021 menjadi 17,53% pada triwulan IV 2022. Realisasi belanja modal juga mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase dari Rp894,92 miliar atau 82,80% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2021 menjadi Rp1.003,97 miliar atau 96,01% dari pagu anggaran pada triwulan IV 2022. Hal ini mengindikasikan adanya upaya dari pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur yang lebih baik di Kalimantan Barat. Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dapat menjadi faktor pendorong masuknya investasi serta memperlancar arus distribusi barang dan jasa yang diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah.

2.2. APBD KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT

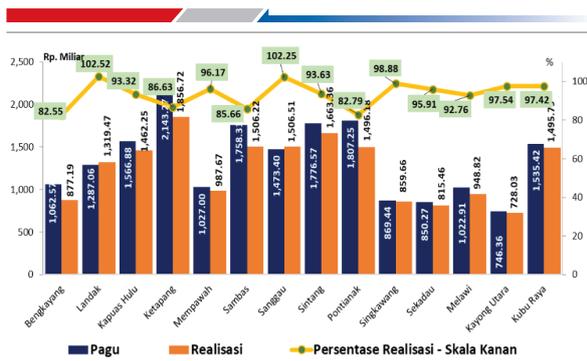
2.2.1. Anggaran Pendapatan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Total realisasi pendapatan di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat hingga triwulan IV 2022 mencapai Rp17.523,34 miliar atau 92,59% dari total anggaran pendapatan kabupaten/kota tahun 2022. Kabupaten/kota dengan realisasi pendapatan terbesar secara nominal adalah Kabupaten Ketapang dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1.856,72 miliar atau 86,63% dari pagu anggaran. Selanjutnya, Kota/Kabupaten dengan persentase realisasi tertinggi adalah Kabupaten Landak yaitu sebesar 102,52% atau secara nominal tercatat sebesar Rp1.319,47 miliar.



*) Data unaudited
Sumber: BPKPD Prov. Kalimantan Barat

Grafik 2.3. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Provinsi Kalimantan Barat Periode 2016-2022



*) Data unaudited
Sumber: BKAD dan Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat

Grafik 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat Tahun 2022

Sementara itu, Realisasi pendapatan terendah secara nominal adalah Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp728,03 miliar atau 97,54% dari pagu anggaran, sedangkan secara persentase adalah Kabupaten Bengkayang sebesar 82,55% atau secara nominal tercatat sebesar Rp877,19 miliar.

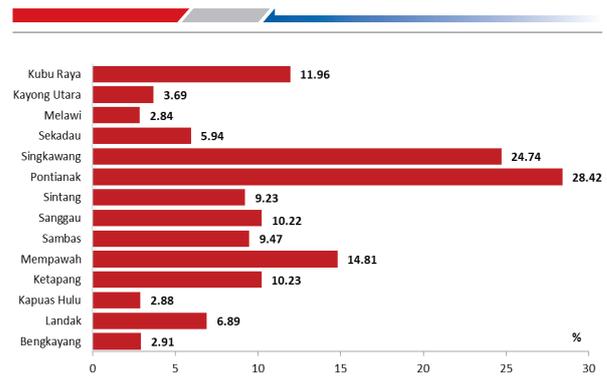
2.2.2. Anggaran Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Total realisasi belanja di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat hingga triwulan IV 2022 mencapai Rp17.498,95 miliar atau 88,76% dari total anggaran belanja tahun 2022. Kabupaten/kota dengan realisasi belanja terbesar secara nominal adalah Kabupaten Ketapang dengan realisasi sebesar Rp2.101,23



*) Data unaudited
Sumber: BKAD dan Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat

Grafik 2.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Per Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat Periode 2022



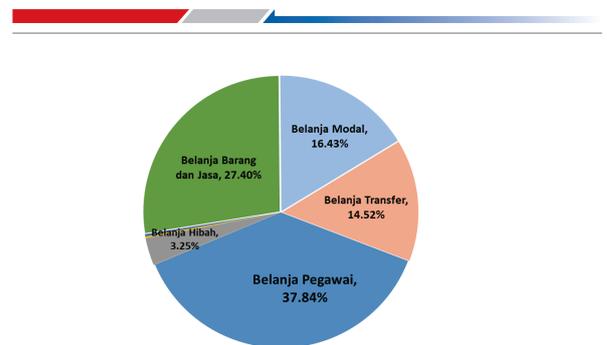
*) Data unaudited
Sumber: BKAD dan Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat

Grafik 2.5. Rasio Kemandirian Fiskal Daerah Kab/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2022

miliar atau 93,87% dari pagu anggaran. Sementara persentase realisasi belanja Kabupaten/Kota tertinggi adalah Kota Singawang yaitu sebesar 98,59% atau secara nominal tercatat sebesar Rp793,86 miliar.

Di sisi lain, Kabupaten Kayong Utara merupakan daerah dengan nominal realisasi belanja terkecil yaitu sebesar Rp615,69 miliar atau 80,28% dari pagu anggaran dan Kabupaten Bengkayang menjadi daerah dengan persentase realisasi belanja terkecil yaitu sebesar 57,56% dari pagu anggaran atau secara nominal tercatat sebesar Rp764,17 miliar.

Realisasi belanja kabupaten/kota di Kalimantan Barat hingga triwulan IV 2022 didominasi oleh belanja pegawai. Realisasi belanja pegawai kabupaten/kota sebesar Rp6.622,04 miliar (90,26% dari pagu



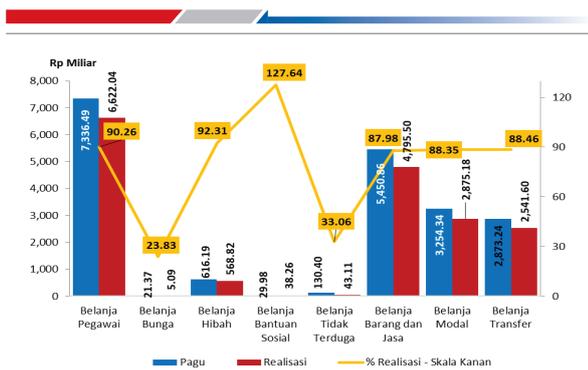
*) Data unaudited
Sumber: BKAD dan Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat

Grafik 2.7. Proporsi Belanja Kab/Kota di Kalimantan Barat Periode 2022

belanja pegawai) atau mencapai 37,84% dari total realisasi belanja. Realisasi belanja barang dan jasa kabupaten/kota sebesar Rp4.795,50 miliar (87,98% dari pagu belanja barang) atau mencapai 27,40% dari total realisasi belanja. Selanjutnya, realisasi belanja modal kabupaten/kota sebesar Rp2.875,18 miliar (88,35% dari pagu belanja modal) atau 16,43% dari total realisasi belanja. Sementara itu, realisasi belanja transfer kabupaten/kota mencapai Rp2.541,60 miliar (88,46% dari pagu belanja transfer) atau 14,52% dari total realisasi belanja.

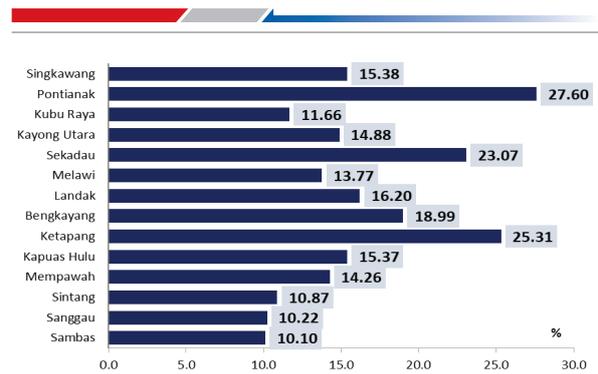
Rasio realisasi belanja modal terhadap total realisasi belanja kabupaten/kota di Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kota Pontianak merupakan daerah yang memiliki rasio realisasi belanja modal tertinggi terhadap total realisasi belanja yaitu sebesar 27,60% (Rp433,27 miliar). Secara nominal, realisasi belanja modal Kabupaten Ketapang adalah yang tertinggi yaitu sebesar Rp531,81 miliar (25,31%).

Di sisi lain, Kabupaten Sambas memiliki rasio realisasi belanja modal terendah terhadap total realisasi belanja yaitu sebesar 10,10% (Rp152,27 miliar). Secara nominal, realisasi belanja modal Kabupaten Kayong Utara adalah yang terendah yaitu sebesar Rp91,62 miliar (14,88%).



*) Data unaudited
Sumber: BKAD dan Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat

Grafik 2.8. Rincian Belanja Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat per Jenis Belanja s.d triwulan III 2022



*) Data unaudited
Sumber: BKAD dan Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat

Grafik 2.9. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Per Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat s.d. triwulan IV 2022

2.3. ALOKASI APBN DI KALIMANTAN BARAT

Selain menyalurkan Dana Transfer dalam rangka melakukan realisasi APBN di daerah, Pemerintah Pusat juga melakukan belanja langsung di daerah melalui kantor perwakilan yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga. Kantor perwakilan Kementerian/Lembaga di Kalimantan Barat pada tahun 2022 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp10,78 triliun. Jumlah tersebut menurun 1,43% (yoy) dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2021 yang sebesar Rp10,94 triliun. Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh kontraksi pagu anggaran pada belanja modal. Pagu pos belanja modal mengalami penurunan sebesar -13,41% dibandingkan tahun 2021 menjadi Rp2.732,42 miliar. Namun, pagu belanja barang, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,61%, 2,26%, dan 3,86% dibandingkan dengan tahun 2021.

Berdasarkan fungsi, pagu anggaran Kementerian/Lembaga di Kalimantan Barat pada tahun 2022 mengalami penurunan pada fungsi perlindungan sosial ekonomi, lingkungan hidup dan perumahan dan fasilitas umum. Fungsi yang mengalami penurunan persentase pagu anggaran terbesar adalah fungsi perlindungan sosial yang mengalami

penghapusan pos anggaran pada tahun 2022. Beberapa fungsi lain yang juga mengalami penurunan adalah fungsi perumahan dan fasilitas umum dari Rp761,18 miliar menjadi Rp509,87 miliar atau turun -33,02% (yoy), fungsi lingkungan hidup dari Rp477,97 miliar menjadi Rp387,54 miliar atau turun -18,92% (yoy), dan fungsi ekonomi dari Rp3.613,47 miliar menjadi Rp3.172,25 miliar atau turun -12,21% (yoy).

Sementara itu beberapa fungsi yang mengalami peningkatan pagu terbesar adalah fungsi ketertiban dan keamanan dari Rp1.766,80 miliar menjadi Rp2.062,80 miliar atau naik 16,75% (yoy), fungsi pendidikan dari Rp1.767,34 miliar menjadi Rp1.954,72 miliar atau naik 10,60% (yoy), dan fungsi pelayanan umum dari Rp497,09 miliar menjadi Rp572,72 miliar atau naik 15,21% (yoy).

Persentase realisasi belanja Kementerian/Lembaga di Kalimantan Barat hingga triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp10.249,67 miliar atau 95,07% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut menurun

secara persentase maupun nominal dibandingkan dengan realisasi belanja triwulan IV 2021 yang tercatat sebesar Rp10.594,75 miliar atau 96,87% dari pagu anggaran. Penurunan realisasi terbesar terjadi pada fungsi perlindungan sosial yang mengalami penghapusan. Penurunan realisasi juga terjadi pada fungsi perumahan dan fasilitas umum dari Rp808,26 miliar menjadi Rp468,13 miliar atau turun -42,08% (yoy), fungsi ekonomi dari Rp3.423,47 miliar menjadi Rp2.205,49 miliar atau turun -35,58% (yoy), dan fungsi lingkungan hidup dari Rp398,07 miliar menjadi Rp274,45 miliar atau turun -31,06% (yoy).

Berdasarkan jenis belanja, penurunan terjadi pada realisasi belanja modal sebesar dari Rp3.003,67 miliar menjadi Rp2.526,38 miliar atau turum -15,89% (yoy). Sementara itu, belanja barang, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial mengalami peningkatan masing-masing sebesar 1,71% (yoy), 1,77% (yoy), dan 3,18% (yoy).

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Alokasi Belanja APBN di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 dan 2022

Uraian Pos Anggaran	Pagu		Realisasi s.d. Tw IV		% Realisasi		% Perubahan	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	APBN	Realisasi
Berdasarkan Jenis Belanja								
Belanja Modal	3.155,61	2.732,42	3.003,67	2.526,38	95,18	92,46	(13,41)	(15,89)
Belanja Barang	3.879,18	4.058,17	3.776,57	3.841,17	97,35	94,65	4,61	1,71
Belanja Pegawai	3.894,54	3.982,40	3.806,68	3.874,04	97,74	97,28	2,26	1,77
Belanja Bantuan Sosial	7,85	8,16	7,83	8,08	99,73	99,08	3,86	3,18
Berdasarkan Fungsi								
Agama	182,76	206,97	179,61	171,04	98,28	82,64	13,25	(4,77)
Ekonomi	3.613,47	3.172,25	3.423,47	2.205,49	94,74	69,52	(12,21)	(35,58)
Kesehatan	138,96	168,01	128,64	122,35	92,58	72,82	20,91	(4,89)
Ketertiban dan Keamanan	1.766,80	2.062,80	1.750,74	1.753,98	99,09	85,03	16,75	0,19
Lingkungan Hidup	477,97	387,54	398,07	274,45	83,28	70,82	(18,92)	(31,06)
Pariwisata dan Budaya	-	1,40	-	0,30	-	21,21	-	-
Pelayanan Umum	497,09	572,72	469,29	443,73	94,41	77,48	15,21	(5,45)
Pendidikan	1.767,34	1.954,72	1.762,02	1.449,85	99,70	74,17	10,60	(17,72)
Perlindungan Sosial	5,56		5,52		99,25	-	(100,00)	(100,00)
Pertahanan	1.726,05	1.744,89	1.669,13	1.502,83	96,70	86,13	1,09	(9,96)
Perumahan dan Fasilitas Umum	761,18	509,87	808,26	468,13	106,19	91,81	(33,02)	(42,08)
Total Belanja	10.937,18	10.781,15	10.594,75	10.249,67	96,87	95,07	(1,43)	(3,26)
Transfer Ke Daerah								
Total Dana Transfer Ke Daerah	19.447,31	18.681,52	13.647,46	19.226,80	70,18	102,92	(3,94)	40,88
Total Belanja dan Transfer	30.384,49	29.462,67	24.242,21	29.476,47	79,78	100,05	(3,03)	21,59

*) Data unaudited **) Dalam Rp miliar
Sumber: Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat;



Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB III PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT FEBRUARI 2023



- 
- *Tekanan inflasi Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tekanan inflasi pada triwulan IV 2022 tercatat 6,3% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 5,71% (yoy). Peningkatan ini disebabkan oleh:*
 - *Konsumsi dalam tren meningkat di tengah mobilitas masyarakat menghadapi periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru)*
 - *Adanya second round effect penyesuaian harga BBM yang masih memberikan tekanan pada kelompok volatile food*
 - *Berbagai event di Kalimantan Barat pada akhir November 2022.*
 - *Inflasi Kalimantan Barat di tahun 2023 diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain dampak dari pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), faktor cuaca ekstrim La Nina, kenaikan cukai rokok, tren peningkatan harga komoditas energi, isu wabah penyakit, dan peningkatan PPN yang dilakukan secara bertahap. Namun demikian, walaupun menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga stabilisasi harga, inflasi Kalimantan Barat akan tetap terjaga dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ di 2023.*



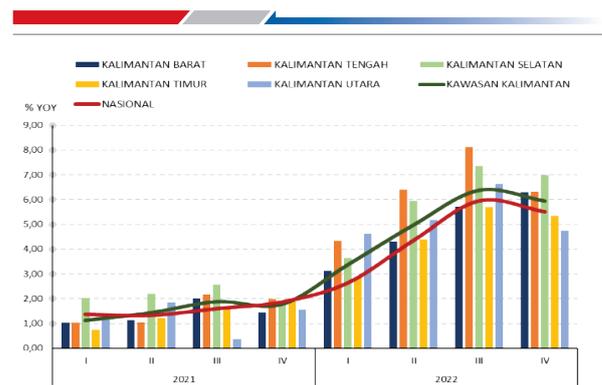
3.1. GAMBARAN UMUM

Capaian Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 6,30% (yoy), lebih tinggi dari inflasi nasional yang tercatat sebesar 5,51% (yoy) dan inflasi regional Kalimantan yang sebesar 5,94% (yoy). Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 ini juga meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 5,71% (yoy).

Tekanan inflasi tahunan Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 dapat terlihat hampir di semua kelompok, terutama 3 kelompok dengan andil terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, transportasi, serta perumahan, air, listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Peningkatan inflasi disebabkan oleh dampak peningkatan konsumsi di tengah mobilitas masyarakat yang meningkat di periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru), permintaan *seasonal* terhadap jasa transportasi, dan dampak *second round effect* penyesuaian harga BBM di bulan September yang masih berpengaruh pada beberapa kelompok barang.

Kenaikan tekanan inflasi yang lebih tinggi pada triwulan IV 2022 tertahan oleh penurunan tekanan pada kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan. Penurunan biaya administrasi jasa transfer mendorong harga kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan bergerak ke bawah.

Secara spasial, pergerakan inflasi Kalimantan Barat sepanjang triwulan IV 2022 terpantau berbeda dari historis sebelumnya untuk kota-kota sampel inflasi.

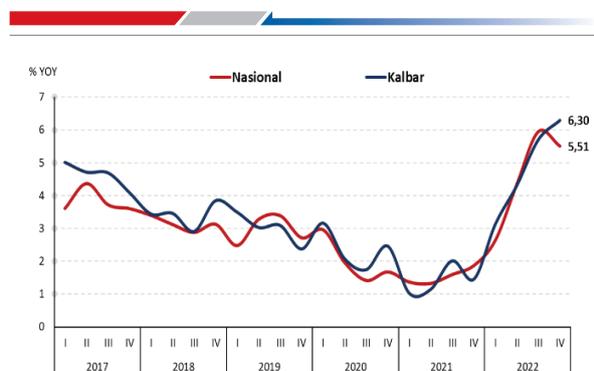


Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

Grafik 3.2. Laju Inflasi Antarprovinsi di Kalimantan dan Nasional triwulan IV 2022

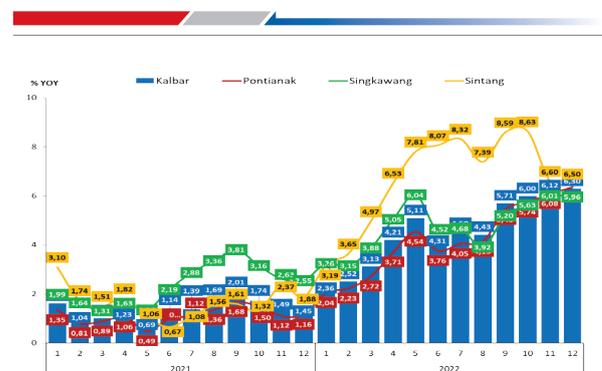
Inflasi kota Pontianak dan Kota Singkawang pada triwulan IV 2022 tercatat naik masing-masing menjadi 6,35% (yoy) dan 5,96% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 5,43% (yoy) dan 5,20% (yoy). Namun demikian, inflasi Kabupaten Sintang di triwulan IV 2022 tercatat menurun menjadi 6,50% (yoy) dari sebelumnya tercatat sebesar 8,59% (yoy). Walaupun mengalami penurunan inflasi dari triwulan sebelumnya, tingkat inflasi pada Kabupaten Sintang masih menjadi tingkat inflasi tertinggi dari ketiga kota sampel di Provinsi Kalimantan Barat.

Memasuki triwulan I 2023, tekanan harga di Kalimantan Barat terpantau menurun. Inflasi tahunan pada Januari 2023 tercatat sebesar 5,70% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar 6,30% (yoy). Penurunan ini



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

Grafik 3.1. Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

Grafik 3.3. Perkembangan Inflasi Kota Sampel Kalimantan Barat

disebabkan oleh faktor *base effect* bulan Desember 2022 yang tinggi seiring peningkatan konsumsi dan mobilitas masyarakat di periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru). Selain itu, upaya dalam melakukan pengendalian inflasi daerah jangka pendek cukup efektif untuk menjaga tingkat inflasi di tengah periode Nataru.

3.2. INFLASI BULANAN (MTM)

Tekanan harga di Kalimantan Barat sepanjang triwulan IV 2022 mengalami peningkatan. Pada periode Desember 2022, inflasi Kalimantan Barat tercatat sebesar 0,55% (mtm), lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode Oktober dan November 2022 yang tercatat mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,07% (mtm) dan 0,34% (mtm). Peningkatan inflasi pada Desember 2022 didorong oleh kenaikan kelompok transportasi, dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok komoditas tersebut mencatatkan inflasi masing-masing sebesar 1,0% (mtm) dan 0,91% (mtm) dengan andil masing-masing sebesar 0,30% dan 0,13%.

Peningkatan inflasi secara bulanan Oktober hingga Desember 2022 masih didorong oleh peningkatan komoditas di sektor makanan, minuman, dan tembakau dan sektor transportasi antara lain bensin, bahan bakar rumah tangga, angkutan udara, dan telur ayam ras. Kenaikan harga telur ayam ras di Kalimantan Barat disebabkan oleh pasokan telur ayam peternak di beberapa wilayah Kalimantan Barat yang menurun karena proses pergantian ayam petelur. Adapun peningkatan harga angkutan udara disebabkan oleh peningkatan permintaan musiman yang meningkat selama periode Nataru dan masih terdapat pengaruh dari peningkatan harga bahan bakar. Sementara itu, kenaikan komoditas rokok kretek filter terjadi seiring dengan peningkatan cukai rokok secara bertahap yang dimulai sejak November 2022. Kenaikan harga sepanjang triwulan IV 2022 secara bulanan tertahan oleh turunnya harga beberapa komoditas *volatile foods* dan bahan makanan antara lain seperti sayur-sayuran, daging sapi, dan minyak goreng.

Tabel 3.1. Perkembangan Inflasi bulanan (mtm)

Kelompok Barang	Tw I 2022			Tw II 2022			Tw III 2022			Tw IV 2022		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Umum	0,83	0,26	0,44	1,15	0,80	0,09	0,12	-0,07	1,57	0,07	0,34	0,55
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,29	-0,04	0,28	2,12	1,48	-0,11	-0,36	-1,02	1,10	-0,62	0,82	0,91
Pakaian dan Alas Kaki	0,04	0,01	0,01	0,16	0,03	0,00	0,00	0,03	0,01	-0,12	0,01	0,24
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,87	0,33	0,87	1,00	0,09	0,20	0,30	0,67	0,33	0,21	0,01	0,09
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,89	0,41	1,01	2,22	0,21	0,24	0,10	0,12	0,47	0,21	0,10	0,19
Kesehatan	0,05	0,28	0,09	-0,60	-0,04	0,19	0,00	-0,13	-0,09	0,25	0,00	0,44
Transportasi	0,99	1,07	0,62	0,68	1,43	0,21	0,74	0,90	9,17	0,67	-0,01	1,00
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,13	0,00	0,00	-0,02	-0,01	-0,05	0,00	-0,06	-0,01	-0,02	-0,01	0,19
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,35	0,00	0,11	0,57	0,10	1,70	0,15	-0,63	-0,13	0,32	0,21	0,02
Pendidikan	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,96	0,36	0,02	0,00	0,00	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,38	0,36	0,62	0,25	0,35	0,09	0,27	0,36	0,19	0,99	0,28	0,22
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1,08	0,58	0,37	1,01	1,20	0,24	0,52	0,44	0,03	1,07	0,56	0,66

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

Tabel 3.2. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi bulanan (mtm)

	Oktober 2022			November 2022			Desember 2022		
	0,07%			0,34%			0,55%		
	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil
Inflasi	BENSIN	1,47	0,07	KANGKUNG	19,93	0,08	TELUR AYAM RAS	5,58	0,07
	BERAS	1,00	0,04	BAWANG MERAH	14,74	0,06	ANGKUTAN UDARA	5,54	0,07
	BAYAM	10,61	0,03	ROKOK KRETEK FILTER	2,46	0,06	MOBIL	2,30	0,05
	SHAMPO	4,90	0,03	SAWI HIJAU	15,78	0,06	CABAI RAWIT	11,68	0,03
	JERUK	7,47	0,02	DAGING BABI	12,35	0,05	TOMAT	23,65	0,03
	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	0,76	0,02	TELUR AYAM RAS	1,14	0,02	DAGING AYAM RAS	1,80	0,03
	PASTA GIGI	3,98	0,02	JAGUNG MANIS	8,30	0,01	JAGUNG MANIS	16,48	0,03
	ROKOK KRETEK FILTER	0,60	0,01	ROKOK KRETEK	1,93	0,01	DAGING BABI	5,70	0,03
	BAJU MUSLIM WANITA	2,72	0,01	TARIF GUNTING RAMBUT PRIA	4,31	0,01	IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/ IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	2,15	0,02
	IKAN BAKAR	8,17	0,01	IKAN TENGGIRI	1,96	0,01	UDANG BASAH	3,26	0,02
Deflasi	CABAI RAWIT	-12,94	-0,05	DAGING AYAM RAS	-3,75	-0,06	SAWI HIJAU	-11,30	-0,05
	SAWI HIJAU	-10,89	-0,04	CABAI RAWIT	-13,90	-0,05	KANGKUNG	-6,96	-0,03
	IKAN KEMBUNG/ IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	-3,17	-0,04	IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	-2,97	-0,03	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-1,56	-0,01
	CABAI MERAH	-18,01	-0,03	BAWANG PUTIH	-5,74	-0,02	KETIMUN	-6,18	-0,01
	UDANG BASAH	-3,05	-0,02	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-1,54	-0,01	DAGING SAPI	-1,64	-0,01
	DAGING BABI	-5,21	-0,02	ANGKUTAN UDARA	-0,73	-0,01	MINYAK GORENG	-0,52	-0,01
	BUNCIS	-19,70	-0,02	CABAI MERAH	-6,22	-0,01	SERAGAM SEKOLAH ANAK	-3,74	0,00
	BAWANG MERAH	-3,56	-0,02	PASTA GIGI	-1,51	-0,01	SEMEN	-0,81	0,00
	KACANG PANJANG	-6,30	-0,01	AYAM HIDUP	-3,18	-0,01	PEPAYA	-1,69	0,00
	BAJU MUSLIM PRIA	-7,01	-0,01	UDANG BASAH	-0,67	-0,01	SAWI PUTIH/PEPAY/PITSAI	-3,11	0,00

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

3.3. INFLASI TAHUNAN (YOY)

Perkembangan harga barang dan jasa di Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 6,30% (yoy). Realisasi inflasi pada triwulan IV 2022 tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 5,71% (yoy). Tekanan inflasi secara tahunan pada triwulan IV 2022 tersebut terutama disumbang oleh tekanan harga pada kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

Inflasi pada kelompok transportasi meningkat dari 17,17% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi sebesar

18,57% (yoy) di triwulan IV 2022. Pada kelompok tersebut, subkelompok jasa angkutan penumpang mengalami inflasi tertinggi yaitu sebesar 33,83% (yoy), namun capaian ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 34,18% (yoy). Sedangkan berdasarkan komoditas, kenaikan tekanan inflasi tahunan pada subkelompok jasa angkutan penumpang triwulan IV 2022 terutama terjadi pada komoditas angkutan udara, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan dalam kota, dan tarif kendaraan travel. Kenaikan tersebut terjadi karena tingginya permintaan penggunaan jasa angkutan pada saat periode Nataru dan masih adanya dampak dari penyesuaian harga BBM.

Inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau menurun dari 5,33% (yoy) pada triwulan III 2022 menjadi sebesar 5,96% (yoy) di triwulan IV 2022. Pada kelompok tersebut, subkelompok rokok dan tembakau mengalami inflasi sebesar 12,31% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2022 yang sebesar 9,44% (yoy). Berdasarkan komoditas, kenaikan tekanan inflasi tahunan pada subkelompok rokok dan tembakau triwulan IV 2022 terutama terjadi pada komoditas rokok kretek dan kretek filter. Tekanan inflasi pada komoditas tersebut dikarenakan terdapat penyesuaian harga secara bertahap yang diberlakukan oleh para produsen rokok seiring dengan ketetapan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok.

Tekanan inflasi triwulan IV 2022 juga disebabkan oleh naiknya tekanan harga pada kelompok komoditas perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, yang mengalami inflasi sebesar 5,08% (yoy). Pada kelompok tersebut, subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi

tertinggi, yaitu sebesar 10,60% (yoy). Peningkatan inflasi subkelompok tersebut didorong oleh kenaikan harga bahan bakar rumah tangga terutama harga LPG nonsubsidi seiring dengan penyesuaian harga LPG nonsubsidi oleh pemerintah.

Sementara itu, kelompok komoditas informasi, komunikasi, dan keuangan menjadi penahan inflasi di triwulan IV 2022. Komoditas ini tercatat deflasi sebesar 0,11% (yoy) sejalan dengan triwulan III 2022 yang juga mengalami deflasi sebesar 0,31% (yoy).

Apabila dilihat per komoditas, laju dan andil inflasi tahunan tertinggi pada triwulan III 2022 adalah komoditas bensin yang mengalami peningkatan sebesar 29,0% (yoy) dan memberikan andil inflasi tahunan sebesar 1,08%, yang didorong oleh penyesuaian harga BBM. Di sisi lain, deflasi terendah secara tahunan terjadi pada komoditas cabai rawit yang mengalami deflasi sebesar 30,76% (yoy) sehingga memberikan andil 0,16%.

Tabel 3.3. Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy)

Kelompok Barang	Tw I 2022			Tw II 2022			Tw III 2022			Tw IV 2022		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Umum	2,36	2,52	3,13	4,21	5,11	4,31	4,58	4,43	5,71	6,00	6,12	6,30
Makanan, Minuman dan Tembakau	3,50	3,37	3,99	6,04	7,82	6,06	6,13	4,93	5,33	5,48	5,88	5,96
Pakaian dan Alas Kaki	-0,25	-0,30	-0,28	-0,09	-0,12	-0,13	-0,19	-0,20	0,28	0,17	0,18	0,42
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,49	1,84	3,02	4,06	4,07	4,02	4,39	5,14	5,26	5,41	5,12	5,08
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,61	2,69	3,60	5,47	5,57	5,70	5,82	5,85	6,26	6,48	6,18	6,33
Kesehatan	0,23	0,52	0,54	-0,18	-0,25	-0,37	-0,43	-0,97	-1,06	-0,17	-0,17	0,44
Transportasi	3,50	4,42	5,38	6,02	7,92	6,03	6,84	7,71	17,17	17,69	18,03	18,57
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,03	-0,04	-0,04	-0,08	-0,15	-0,21	-0,23	-0,29	-0,31	-0,34	-0,36	-0,11
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	2,24	2,01	2,13	3,12	3,20	4,56	4,67	3,63	3,47	3,69	3,14	2,79
Pendidikan	0,46	0,46	0,38	0,33	0,33	0,31	1,32	1,39	1,27	1,27	1,27	1,27
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	1,72	2,04	2,42	2,66	3,02	2,84	3,07	3,36	3,22	4,12	4,23	4,46
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	3,76	3,83	4,19	4,71	5,79	5,71	6,17	6,63	6,52	7,32	7,48	8,04

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

Tabel 3.4. Perkembangan Andil Inflasi Tahunan (yoy)

Kelompok Barang	Tw I 2022			Tw II 2022			Tw III 2022			Tw IV 2022		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Umum	2,36	2,52	3,13	4,21	5,11	4,31	4,58	4,43	5,71	6,00	6,12	6,30
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,16	1,12	1,32	2,01	2,59	2,02	2,04	1,64	1,78	1,82	1,96	2,00
Pakaian dan Alas Kaki	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,25	0,31	0,51	0,68	0,68	0,67	0,73	0,86	0,88	0,90	0,86	0,85
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,13	0,14	0,18	0,28	0,29	0,29	0,30	0,30	0,32	0,33	0,32	0,32
Kesehatan	0,01	0,02	0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,03	-0,01	0,00	0,01
Transportasi	0,41	0,51	0,63	0,70	0,92	0,71	0,80	0,91	2,02	2,09	2,11	2,18
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
Pendidikan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,14	0,16	0,19	0,21	0,24	0,22	0,24	0,27	0,25	0,33	0,33	0,35
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,22	0,22	0,24	0,27	0,34	0,33	0,36	0,39	0,38	0,43	0,44	0,47

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

Tabel 3.5. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan (yoy)

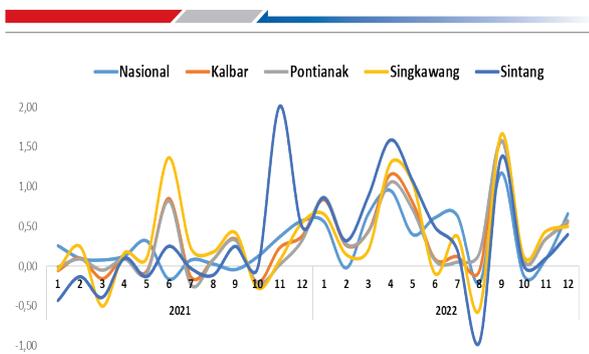
	Oktober 2022			November 2022			Desember 2022		
	6,0%			6,12%			6,30%		
	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil
Inflasi	BENSIN	28,99	1,09	BENSIN	28,96	1,09	BENSIN	29,00	1,08
	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	32,22	0,70	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	30,63	0,67	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	30,14	0,66
	ANGKUTAN UDARA	53,22	0,49	ANGKUTAN UDARA	52,10	0,47	ANGKUTAN UDARA	52,56	0,50
	ROKOK KRETEK FILTER	10,33	0,25	ROKOK KRETEK FILTER	12,39	0,30	ROKOK KRETEK FILTER	12,86	0,31
	MOBIL	11,47	0,22	MOBIL	13,78	0,25	MOBIL	15,98	0,29
	TELUR AYAM RAS	15,87	0,19	BAWANG MERAH	34,39	0,14	BAWANG MERAH	40,99	0,15
	AIR KEMASAN	14,03	0,13	TELUR AYAM RAS	10,66	0,14	KANGKUNG	38,12	0,13
	SABUN DETERGEN BUBUK/ CAIR	20,85	0,12	KANGKUNG	33,57	0,13	BAYAM	55,10	0,13
	SABUN MANDI CAIR	34,17	0,10	AIR KEMASAN	13,27	0,12	TELUR AYAM RAS	9,59	0,13
	TAHU MENTAH	17,67	0,09	SABUN DETERGEN BUBUK/ CAIR	20,18	0,12	AIR KEMASAN	13,56	0,13
Deflasi	BAWANG PUTIH	-13,67	-0,05	BAWANG PUTIH	-19,72	-0,07	CABAI RAWIT	-30,76	-0,16
	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-4,61	-0,04	MINYAK GORENG	-4,24	-0,06	MINYAK GORENG	-8,24	-0,11
	JERUK	-10,34	-0,04	IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/ IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	-3,65	-0,05	BAWANG PUTIH	-14,46	-0,05
	UDANG BASAH	-3,03	-0,02	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-4,18	-0,04	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-5,46	-0,05
	OBAT DENGAN RESEP	-3,97	-0,02	UDANG BASAH	-3,62	-0,03	UDANG BASAH	-1,80	-0,01
	BIAYA ADMINISTRASI TRANSFER UANG	-34,28	-0,01	OBAT DENGAN RESEP	-3,97	-0,02	BIOSKOP	-5,77	-0,01
	BAJU MUSLIM PRIA	-7,07	-0,01	JERUK	-4,93	-0,02	JERUK	-3,82	-0,01
	TOMAT	-9,03	-0,01	BIAYA ADMINISTRASI TRANSFER UANG	-34,28	-0,01	MINUMAN RINGAN	-12,23	-0,01
	APEL	-7,93	-0,01	BAJU MUSLIM PRIA	-7,07	-0,01	BIAYA ADMINISTRASI TRANSFER UANG	-27,60	-0,01
	KOL PUTIH/KUBIS	-13,55	-0,01	BIOSKOP	-5,77	-0,01	BAJU MUSLIM PRIA	-5,23	-0,01

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

Memasuki triwulan I 2023, tekanan harga di Kalimantan Barat terpantau menurun. Inflasi tahunan pada Januari 2023 tercatat sebesar 5,70% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar 6,30% (yoy). Penurunan ini didorong oleh penurunan harga pada kelompok sektor transportasi sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga terutama bensin, bahan bakar rumah tangga, dan angkutan udara.

3.4. INFLASI KOTA

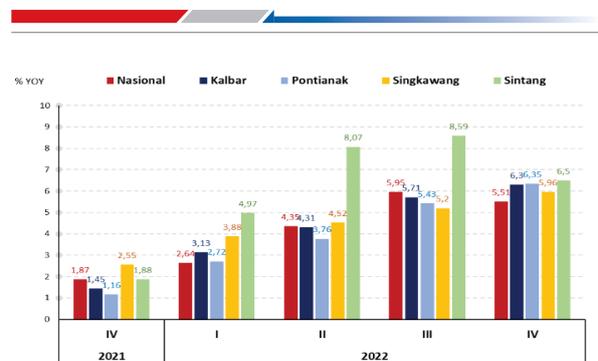
Realisasi inflasi tahunan pada triwulan IV 2022 di kota sampel Inflasi Kalimantan Barat secara umum



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

Grafik 3.4. Pergerakan Inflasi bulanan 3 Kota di Kalimantan Barat

mengalami peningkatan searah dengan kenaikan Inflasi Kalimantan Barat. Inflasi tahunan di Kota Pontianak pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 6,35% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 5,43% (yoy). Demikian halnya dengan inflasi Kota Singkawang tercatat sebesar 5,96% (yoy) pada triwulan IV 2022 atau meningkat dari triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 5,20% (yoy). Berbeda dengan Kota Sintang, inflasi kota Sintang tercatat 6,50% (yoy) menurun dibandingkan inflasi triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 8,59% (yoy).



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

Grafik 3.5. Perkembangan Inflasi Tahunan 3 Kota di Kalimantan Barat

Tabel 3.6. Perkembangan Inflasi Kota di Provinsi Kalimantan Barat (yoy)

Kelompok Barang	Inflasi Tahunan (yoy)											
	Kota Pontianak				Kota Singkawang				Kabupaten Sintang			
	Tw I 2022	Tw II 2022	Tw III 2022	Tw IV 2022	Tw I 2022	Tw II 2022	Tw III 2022	Tw IV 2022	Tw I 2022	Tw II 2022	Tw III 2022	Tw IV 2022
Umum	2,72	3,76	5,43		3,88	4,52	5,20		4,97	8,07	8,59	6,50
Makanan, Minuman dan Tembakau	2,47	4,07	4,04	5,43	7,42	7,83	5,71	6,79	8,32	15,87	12,80	7,83
Pakaian dan Alas Kaki	-0,16	0,00	0,27	0,49	0,07	0,29	0,52	0,37	-1,60	-1,63	0,01	0,00
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	3,19	4,40	5,72	5,73	1,37	1,40	1,62	1,72	4,42	5,40	7,77	5,58
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	3,57	6,23	6,85	6,73	4,21	5,11	5,50	6,46	2,86	3,05	3,46	3,55
Kesehatan	0,28	-0,93	-2,15	-0,75	4,11	4,08	3,89	6,58	-2,44	-1,84	2,07	2,59
Transportasi	5,86	6,28	17,32	18,89	1,96	3,49	16,21	17,14	6,29	7,58	17,25	17,90
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,03	-0,10	-0,14	0,17	0,03	-0,12	-0,16	-0,22	-0,17	-0,93	-1,42	-1,59
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	2,03	4,77	3,74	2,64	1,03	2,81	0,53	2,51	4,28	5,37	5,37	4,26
Pendidikan	0,53	0,50	1,16	1,16	-0,30	-0,61	1,94	1,94	0,02	0,02	1,10	1,08
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	1,91	1,98	2,37	3,82	4,43	6,67	7,07	7,95	3,28	2,87	3,02	2,48
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,75	6,73	7,46	9,09	2,13	2,78	3,88	4,94	3,41	3,16	4,10	5,44

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

Tabel 3.7. Andil Inflasi Tahunan 3 Kota di Kalimantan Barat

Kelompok Barang	Andil Inflasi Tahunan (yoy)											
	Kota Pontianak				Kota Singkawang				Kabupaten Sintang			
	Tw I 2022	Tw II 2022	Tw III 2022	Tw IV 2022	Tw I 2022	Tw II 2022	Tw III 2022	Tw IV 2022	Tw I 2022	Tw II 2022	Tw III 2022	Tw IV 2022
Umum	2,72	3,76	5,43	6,35	3,88	4,52	5,20	5,96	4,97	8,07	8,59	6,50
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,79	1,30	1,30	1,74	2,64	2,85	2,10	2,51	3,16	6,00	4,87	3,06
Pakaian dan Alas Kaki	-0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,02	0,03	0,02	-0,09	-0,09	0,00	0,00
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,54	0,74	0,96	0,96	0,23	0,23	0,27	0,28	0,71	0,87	1,25	0,90
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,18	0,31	0,34	0,34	0,22	0,27	0,28	0,33	0,16	0,17	0,19	0,19
Kesehatan	0,01	-0,03	-0,07	-0,02	0,09	0,09	0,09	0,15	-0,06	-0,04	0,05	0,06
Transportasi	0,72	0,78	2,15	2,35	0,19	0,33	1,54	1,63	0,64	0,78	1,79	1,81
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,06	-0,09	-0,10
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,04	0,09	0,07	0,05	0,02	0,04	0,01	0,04	0,08	0,10	0,10	0,08
Pendidikan	0,03	0,02	0,06	0,06	-0,01	-0,03	0,08	0,08	0,00	0,00	0,03	0,03
Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	0,16	0,16	0,19	0,32	0,38	0,56	0,59	0,67	0,15	0,13	0,14	0,11
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,27	0,39	0,43	0,53	0,12	0,15	0,21	0,27	0,23	0,21	0,27	0,36

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat

Apabila dilihat berdasarkan komoditasnya, kenaikan tekanan inflasi pada triwulan IV 2022 di kota sampel inflasi di Kalimantan Barat terutama disebabkan oleh kenaikan harga kelompok transportasi dan makanan, minuman, dan tembakau dengan komoditas cabai, telur ayam ras, sayur-sayuran, dan daging. Sementara

itu, kenaikan tekanan inflasi lebih lanjut di kota sampel inflasi di Kalimantan Barat pada triwulan III 2022 tertahan oleh penurunan harga pada komoditas sayur-sayuran, ikan-ikanan, daging, dan bahan bakar rumah tangga yang terjadi di ketiga kota tersebut.

Tabel 3.8. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi bulanan di 3 Kota Sampel (mtm)

		Oktober 2022			November 2022			Desember 2022		
		Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil
PONTIANAK Okt: 0,07% Nov: 0,34% Des: 0,57%	Inflasi	BENSIN	1,47	0,07	KANGKUNG	27,84	0,10	ANGKUTAN UDARA	6,47	0,10
		BAYAM	18,69	0,05	ROKOK KRETEK FILTER	3,20	0,07	TELUR AYAM RAS	5,81	0,07
		BERAS	1,11	0,04	BAWANG MERAH	13,41	0,06	MOBIL	2,65	0,06
		SHAMPO	6,20	0,03	SAWI HIJAU	15,55	0,05	DAGING AYAM RAS	2,92	0,04
		PASTA GIGI	5,62	0,02	DAGING BABI	17,29	0,05	CABAI RAWIT	15,12	0,04
	Deflasi	CABAI RAWIT	-16,38	-0,06	DAGING AYAM RAS	-4,63	-0,07	SAWI HIJAU	-15,70	-0,06
		IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	-4,28	-0,06	CABAI RAWIT	-15,12	-0,04	KANGKUNG	-9,83	-0,05
		SAWI HIJAU	-13,97	-0,05	IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/ IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	-3,41	-0,04	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-2,67	-0,02
		UDANG BASAH	-5,75	-0,04	BAWANG PUTIH	-6,62	-0,02	KETIMUN	-11,57	-0,01
		CABAI MERAH	-22,09	-0,03	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	-2,59	-0,02	DAGING SAPI	-2,12	-0,01

Tabel 3.8. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi bulanan di 3 Kota Sampel (mtm) Lanjutan

	Oktober 2022			November 2022			Desember 22			
	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	
SINGKAWANG Okt: 0,13% Nov: 0,44% Des: 0,50%	Inflasi	IKAN TONGKOL/ IKAN AMBU-AMBU	4,73	0,06	SAWI HIJAU	22,52	0,13	DAGING BABI	12,09	0,16
		DAGING AYAM RAS	2,98	0,06	DAGING BABI	7,27	0,09	TELUR AYAM RAS	6,52	0,09
		BENSIN	1,47	0,06	BAWANG MERAH	20,59	0,07	DAGING AYAM RAS	1,54	0,03
		UDANG BASAH	3,08	0,03	TELUR AYAM RAS	3,38	0,05	PASIR	9,09	0,03
		PASIR	9,99	0,03	KANGKUNG	11,66	0,04	IKAN TENGGIRI	7,12	0,03
	Deflasi	DAGING BABI	-6,78	-0,09	CABAI RAWIT	-7,68	-0,03	MINYAK GORENG	-2,19	-0,04
		SAWI HIJAU	-8,07	-0,05	IKAN KEMBUNG/IKAN GEMBUNG/ IKAN BANYAR/IKAN GEMBOLO/ IKAN ASO-ASO	-1,65	-0,02	SAWI HIJAU	-1,95	-0,01
		TELUR AYAM RAS	-2,53	-0,03	DAGING AYAM RAS	-0,99	-0,02	KOPI BUBUK	-2,36	-0,01
		BAWANG MERAH	-8,09	-0,03	BAWANG PUTIH	-3,78	-0,01	SABUN CAIR/CUCI PIRING	-1,96	-0,01
		TAHU MENTAH	-2,36	-0,03	TAHU MENTAH	-0,80	-0,01	SAWI PUTIH/PECAY/ PITSAI	-6,46	-0,01

	Oktober 2022			November 2022			Desember 22			
	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	Komoditas	mtm	Andil	
SINTANG Okt: 0,01% Nov: 0,10% Des: 0,40%	Inflasi	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	2,99	0,08	BAWANG MERAH	17,87	0,08	CABAI MERAH	13,03	0,07
		BERAS	1,41	0,06	BERAS	1,16	0,05	CABAI RAWIT	15,24	0,07
		BENSIN	1,50	0,05	TELUR AYAM RAS	3,00	0,05	EMAS PERHIASAN	6,00	0,06
		KETIMUN	7,75	0,04	JAGUNG MANIS	24,49	0,03	TOMAT	25,31	0,05
		JERUK	18,20	0,03	EMAS PERHIASAN	2,53	0,02	TELUR AYAM RAS	3,03	0,05
	Deflasi	CABAI MERAH	-14,29	-0,10	CABAI RAWIT	-17,31	-0,10	DAGING AYAM RAS	-3,70	-0,07
		CABAI RAWIT	-11,02	-0,07	DAGING AYAM RAS	-3,81	-0,07	KACANG PANJANG	-3,09	-0,03
		KACANG PANJANG	-5,90	-0,05	CABAI MERAH	-6,70	-0,04	SAWI HIJAU	-6,52	-0,02
		BAWANG MERAH	-7,06	-0,03	TELEPON SELULER	-0,71	-0,01	SEMANGKA	-5,68	-0,02
		TAHU MENTAH	-1,90	-0,03	AYAM HIDUP	-2,10	-0,01	BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	-0,62	-0,02

3.5. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2022

Program pengendalian inflasi di Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 difokuskan pada upaya untuk merespon kenaikan harga komoditas hortikultura, terutama aneka cabai dan bawang merah, dan penyesuaian harga BBM. Pelaksanaan program dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan mengacu pada peta jalan (*roadmap*) program pengendalian inflasi Kalimantan Barat periode 2022-2024. *Roadmap* tersebut memiliki 4 strategi utama, yakni: ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif.

Pelaksanaan strategi 4K yang telah dilaksanakan meliputi:

1. Ketersediaan Pasokan

Strategi ketersediaan pasokan dilaksanakan melalui program jangka pendek yang bertujuan meredam kenaikan harga pada beberapa komoditas pertanian, terutama hortikultura seperti cabai dan bawang merah. Selain itu, upaya jangka menengah-panjang juga dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi pertanian lokal demi mencapai kemandirian pangan. Adapun program yang dilakukan oleh TPID Kalimantan Barat antara lain:

- a. Melakukan monitoring ketersediaan dan harga komoditas pangan di pasar-pasar tradisional dan modern secara rutin. Monitoring perlu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan praktik penimbunan yang dapat mengakibatkan pasokan terganggu. Selain itu, informasi riil

pasokan dan harga menjadi pertimbangan bagi seluruh anggota TPID untuk mengambil kebijakan.

- b. TPID juga tetap melakukan berbagai upaya peningkatan produksi pangan di Kalimantan Barat melalui program pemberian bantuan benih dan mesin pertanian kepada kelompok tani. Selain itu, TPID juga berupaya melakukan inovasi dengan penggalakan sistem budidaya dan pemanfaatan teknologi digital dalam pertanian dan pemasaran hasil pertanian.
- c. Menggalakkan program memanfaatkan tanah pekarangan rumah dengan menanam cabai dan sayuran. TPID Kota Singkawang dan Kabupaten Sintang melaksanakan program ini melalui pemberian benih cabai dan sayuran dalam bentuk *polybag* kepada ASN dan masyarakat umum. Program ini bertujuan agar lahan pekarangan dapat produktif menghasilkan komoditas pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga.
- d. Bersinergi dengan *stakeholder* terkait untuk memastikan cadangan beras pemerintah di Bulog terus dijaga.
- e. Menginisiasi pembentukan BUMD pangan dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan daerah, mengefisienkan manajemen pangan nasional, meringankan biaya transportasi, serta menjamin ketersediaan pangan di tingkat lokal yang lebih sesuai dengan kebutuhan.

2. Kelancaran Distribusi

Kelancaran distribusi merupakan hal yang penting untuk memastikan agar tidak terjadi disparitas harga yang besar antar daerah di Kalimantan Barat. Sehubungan dengan itu, memastikan pasokan BBM yang mencukupi kebutuhan dan perbaikan alur distribusi komoditas strategis menjadi hal yang sangat penting. TPID Kalimantan Barat melaksanakan berbagai program sebagai berikut:

- a. Beberapa TPID kabupaten/kota, seperti Pontianak dan Landak memberikan bantuan

BBM kepada kelompok usaha transportasi, seperti ojek dan angkutan air, menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Insentif Daerah (DID). Program tersebut sesuai dengan arahan pemerintah pusat dalam rangka merespon penyesuaian harga BBM.

- b. Melakukan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di berbagai SPBU untuk mencegah penyaluran yang tidak tepat sasaran. TPID berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait melakukan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi. Masih ditemukan kendaraan yang sudah dimodifikasi tidak sesuai dengan standar yang berlaku dengan tujuan menampung dan menjual kembali BBM bersubsidi ke masyarakat yang tidak seharusnya mengkonsumsi BBM bersubsidi.
- c. TPID Provinsi Kalimantan Barat melakukan rapat koordinasi dengan asosiasi pengusaha LPG dan Pertamina untuk menampung usulan untuk meninjau kembali SK Gubernur Kalimantan Barat mengenai HET (Harga Eceran Tertinggi) LPG subsidi tabung 3 Kg. Usulan tersebut mempertimbangkan SK Gubernur yang berlaku ditetapkan pada tahun 2014 dan telah terjadi kenaikan biaya logistik sejak SK tersebut terbit. Apabila HET tidak disesuaikan, dikhawatirkan distribusi LPG subsidi tabung 3 kg akan terganggu karena para agen mengalami kerugian akibat tingginya ongkos angkut.
- d. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan *platform* jual beli *online* sehingga memberikan alternatif bagi masyarakat ketika harga komoditas mengalami kenaikan dan memberikan solusi bagi pedagang ketika mengalami kesulitan dalam mengakses pasar.

3. Keterjangkauan Harga

Strategi keterjangkauan harga dilaksanakan melalui program stabilisasi harga dan program pengelolaan permintaan, yaitu sebagai berikut:

- a. TPID Provinsi Kalimantan Barat membuka Toko Pangan Mandiri yang menjual berbagai komoditas pangan hasil produksi lokal Kalimantan Barat dan dengan mengadakan Toko Pangan *Mobile* yang dilakukan pada waktu tertentu.
- b. Melakukan pemanfaatan Dana Insentif Daerah (DID) dan *refocusing* 2% Dana DTU untuk program operasi pasar, antara lain dilakukan oleh TPID Pontianak, Singkawang, Sintang, Kubu Raya, Landak, Kapuas Hulu, Melawi, dan Sambas. TPID provinsi dan kabupaten/kota melakukan intervensi dengan memberikan subsidi harga pada pelaksanaan operasi pasar, sehingga harga komoditas tersebut lebih murah dibandingkan harga pasar.
- c. TPID Provinsi melaksanakan program pemberian bantuan sosial berupa paket sembako di beberapa wilayah, antara lain di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sintang. Program ini juga memanfaatkan Dana Insentif Daerah dan *refocusing* 2% Dana DTU.

4. Komunikasi Efektif

Terkait pengelolaan ekspektasi masyarakat, TPID melakukan berbagai program sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan sinergi antar anggota TPID baik provinsi maupun kabupaten/kota terus intensif dilakukan selama triwulan III 2022. Koordinasi dan sinergi tersebut antara lain *High Level Meeting* (HLM) TPID yang telah dilaksanakan beberapa kali, yaitu TPID Kapuas Hulu, Kubu Raya, Bengkayang, Landak, Mempawah, dan Pontianak. Selain itu, TPID Kalimantan Barat juga menyelenggarakan rapat koordinasi mengenai *extra effort* pengendalian inflasi daerah Kalimantan Barat yang dihadiri oleh Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Tim teknis

TPID juga secara intensif melakukan koordinasi dan komunikasi melalui kanal pesan singkat dan rapat-rapat teknis untuk membahas tantangan dalam implementasi program pengendalian inflasi.

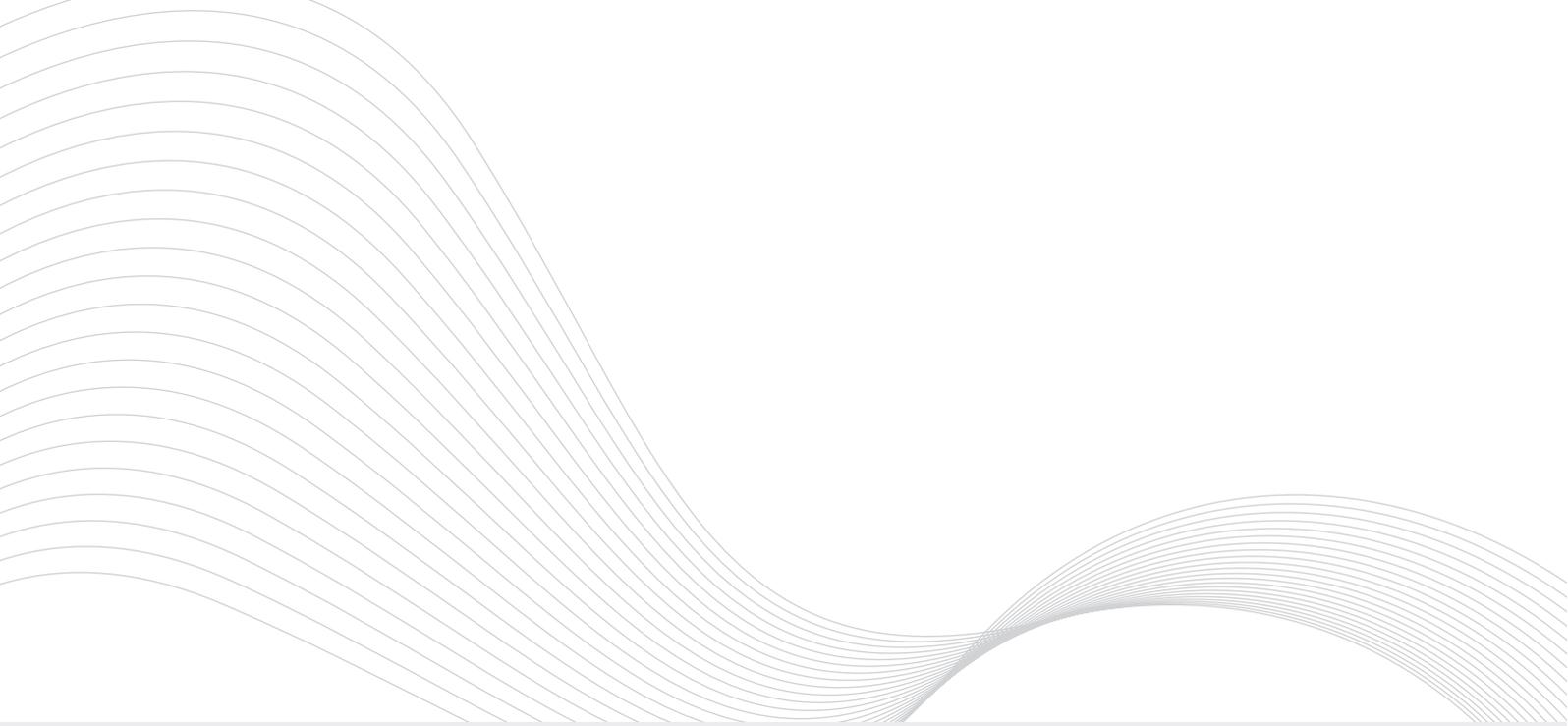
- b. Melakukan perbaikan kualitas data untuk mendukung perumusan kebijakan dan menghasilkan proyeksi yang akurat. Selain itu, TPID juga melakukan publikasi informasi harga bapokting secara berkala untuk menjaga ekspektasi masyarakat antara lain melalui portal layanan *smart city* dan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Jendela Pontianak Integrasi (JePIN), serta mendiseminasikan informasi harga bapokting secara rutin.
- c. Melakukan edukasi mengenai diversifikasi konsumsi bahan pangan dengan tujuan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat agar mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan hasil pertanian lokal.

Sebagai salah satu bentuk dukungan terkait upaya pengendalian inflasi daerah tersebut di atas, Bank Indonesia bersama dengan TPID Kalimantan Barat meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). GNPIP merupakan bentuk komitmen bersama BI dan TPIP-TPID untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional sesuai dengan arahan Presiden RI pada Rakornas TPIP-TPID tanggal 18 Agustus 2022. Terdapat beberapa program unggulan GNPIP di Kalimantan Barat, yaitu operasi pasar murah, pemberian bantuan mesin pertanian kepada Poktan, pencaangan komitmen bersama mendorong implementasi KAD, dan edukasi inflasi bersinergi dengan kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

BAB IV PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT FEBRUARI 2023





Fungsi intermediasi perbankan di Kalimantan Barat Pada triwulan IV 2022 mengalami perbaikan didorong oleh peningkatan pembiayaan kepada perseorangan dan sektor korporasi. Penyaluran kredit tumbuh 0,83% (yoy), turun dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit UMKM tumbuh meningkat dengan pangsa 30,21% dari keseluruhan total kredit. Peningkatan tersebut bersumber dari perbaikan kinerja kredit investasi. Risiko kredit bermasalah sedikit meningkat namun masih dalam level yang terjaga, terutama didorong oleh Non Performing Loan (NPL) kredit modal kerja. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Kalimantan Barat tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya, didorong oleh perlambatan tabungan, giro, dan simpanan berjangka masyarakat.



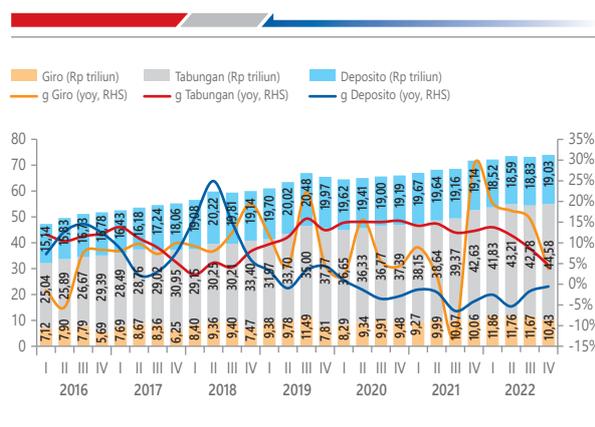
4.1. PERKEMBANGAN PERBANKAN SECARA UMUM⁴

4.1.1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

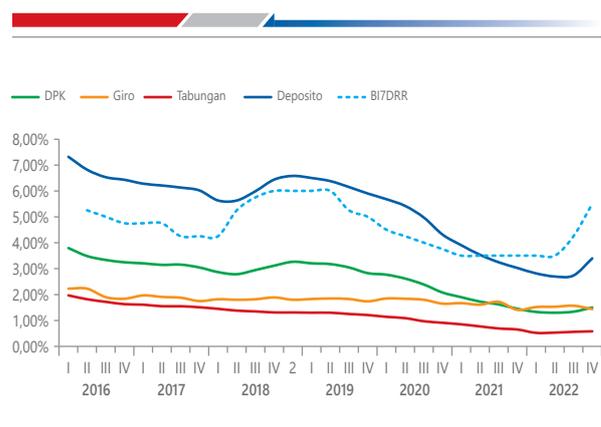
Dana pihak ketiga (DPK) Perbankan di Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 tetap tumbuh meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Realisasi DPK perbankan pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp74,04 triliun atau tumbuh sebesar 3,08% (yoy). Pertumbuhan DPK tersebut melambat dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 6,83% (yoy). Pertumbuhan yang lebih rendah tersebut didorong oleh perlambatan pada seluruh jenis DPK terutama tabungan dan giro. Instrumen tabungan tumbuh melambat dari 8,66% (yoy) menjadi 4,57% (yoy), sementara giro juga tumbuh melambat dari 15,86% (yoy) menjadi 3,70% (yoy). Adapun Instrumen deposito tercatat membaik dari -1,69%

(yoy) menjadi -0,54% (yoy) sejalan dengan suku bunga tertimbang untuk instrumen deposito yang meningkat menjadi 3,39%. Perlambatan DPK tersebut secara umum dipengaruhi oleh suku bunga SBN yang lebih menarik dibanding suku bunga simpanan seiring peningkatan yield US treasury sebagai respon atas kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR).

Di wilayah Kalimantan, total DPK perbankan Kalimantan Barat berada di posisi terbesar ketiga setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sementara dari sisi pertumbuhan, DPK perbankan Kalimantan Barat berada di posisi keempat se-Kalimantan⁵ yaitu setelah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. DPK perbankan Kalimantan Barat tersebut terdiri atas DPK rupiah sebesar sebesar 97,09% atau Rp71,89 triliun dan sisanya sebesar 2,91% atau Rp2,15 triliun dalam bentuk valuta asing.



Grafik 4.1. Perkembangan Jenis DPK Perbankan



Grafik 4.2. Perkembangan SBT DPK Perbankan

Tabel 4.1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) *

Cakupan (Rp Triliun)	2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Nasional	6.214,31	6.260,46	6.650,88	6.665,39	6.786,87	6.966,35	7.162,29	7.479,46	7.481,68	7.602,30	7.647,33	8.153,59
Kalbar	61,05	63,51	66,97	65,55	65,69	68,26	68,60	71,83	72,21	73,55	73,28	74,05
g Kalbar (% ,yoy)	7,81	6,14	12,70	9,23	7,60	7,48	2,43	9,58	9,93	7,75	6,83	3,08
Kaltim	96,47	99,98	105,95	104,98	103,77	109,15	118,71	117,05	117,89	130,13	133,98	146,01
Kalsel	52,79	54,21	55,97	54,54	56,42	57,68	63,69	63,44	64,49	68,91	72,86	75,97
Kalteng	27,86	29,36	30,82	30,01	30,92	32,30	34,73	34,45	34,30	35,11	35,92	36,59

* Data DPK Kalimantan Utara masih terhitung di dalam DPK Kalimantan Timur

4. Hanya menggunakan data bank umum, data bank perkreditan rakyat (BPR) tidak dimasukkan.

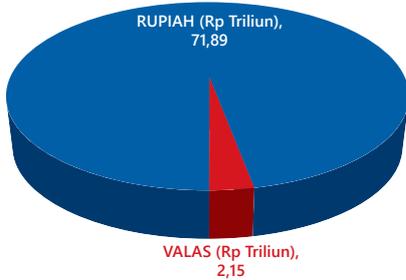
5. Data perbankan Kalimantan Utara masih masuk dalam data perbankan Kalimantan Timur.

Berdasarkan kegiatan bank, penghimpunan DPK di Kalimantan Barat masih didominasi oleh DPK konvensional. Pada periode laporan, DPK Bank Umum konvensional mendominasi sebesar 93,45% dari total DPK atau sebesar Rp69,20 triliun. DPK konvensional tersebut tumbuh sebesar 2,28% (yoy) atau melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,00% (yoy). Sementara itu, DPK perbankan syariah pada periode laporan tercatat sebesar Rp4,85 triliun atau sebesar 6,55% dari total DPK. Angka tersebut tumbuh sebesar 16,20% (yoy). Hal ini menunjukkan porsi pembiayaan syariah di Kalimantan Barat terus meningkat dari waktu ke waktu. Perkembangan pembiayaan syariah tersebut didorong oleh peningkatan kegiatan ekonomi syariah sejalan dengan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yang juga mendukung akselerasi sektor ekonomi dan keuangan syariah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat juga turut mendorong sektor ekonomi dan keuangan syariah melalui pelaksanaan kegiatan Gema Ekonomi Syariah yang dilaksanakan secara tahunan. Kegiatan ini mencakup pelaksanaan kurasi Produk UMKM Bersama Dewan Industri Kreatif Syariah Indonesia, pendampingan sertifikasi halal UMKM, *business matching*, seminar pengembangan kemandirian pontren, edukasi keuangan syariah, *tabligh akbar*, dan *showcase* produk halal UMKM di Kalimantan Barat.

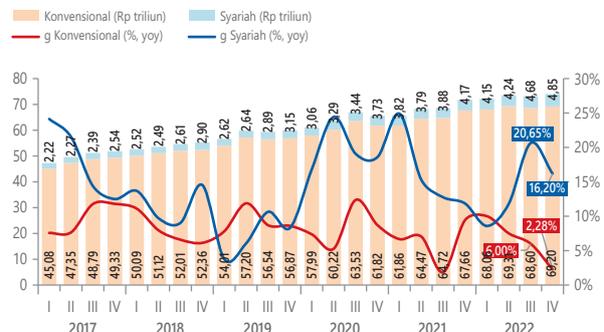
Berdasarkan sisi kepemilikan, DPK triwulan IV 2022 tetap didominasi oleh segmen perseorangan. DPK perseorangan mendominasi DPK total Kalimantan

Barat dengan pangsa sebesar 74,67%, meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2022 dengan pangsa 72,09%. Sejalan dengan DPK perseorangan, pangsa DPK swasta juga meningkat dari 18,68% pada triwulan III 2022 menjadi 20,96% pada triwulan IV 2022. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan konsumsi perseorangan di tengah tekanan inflasi yang menaikkan harga barang konsumsi maupun non-konsumsi. Sementara itu, pangsa DPK pemerintah berbalik menurun pangasanya dari 8,98% di triwulan III 2022 menjadi 4,19% di triwulan IV 2022, seiring dengan realisasi anggaran belanja daerah yang belum optimal. Sesuai siklus tahunan, DPK pemerintah akan berkurang pada periode akhir tahun seiring dengan tingkat realisasi belanja daerah. Merujuk data DJPB Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2022, total realisasi belanja negara dalam APBN Kalimantan Barat tercatat sekitar 100,22% dari total Pagu Belanja Rp29.412 miliar. Realisasi tersebut didorong oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang telah mencapai 102,92% dan realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar 95,51%.

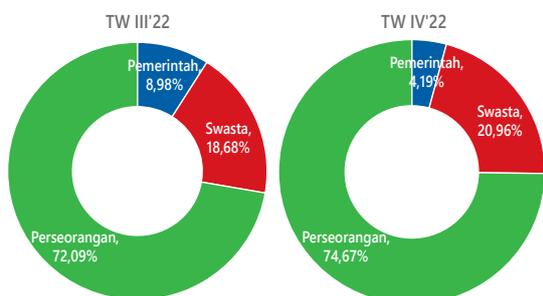
Secara spasial, DPK Kalimantan Barat tetap terpusat di Kota Pontianak. Pada triwulan IV 2022, pangsa DPK secara nominal untuk Kota Pontianak mencapai 50,11% (Rp37,10 triliun). Selanjutnya Kota Singkawang dengan pangsa 7,92% (Rp5,87 triliun) dan disusul oleh Kabupaten Ketapang dengan pangsa sebesar 6,57% (Rp4,86 triliun). Ketiga daerah tersebut menjadi pusat konsentrasi DPK karena merupakan pusat aktivitas industri dan keuangan di Kalimantan Barat. Dari sisi



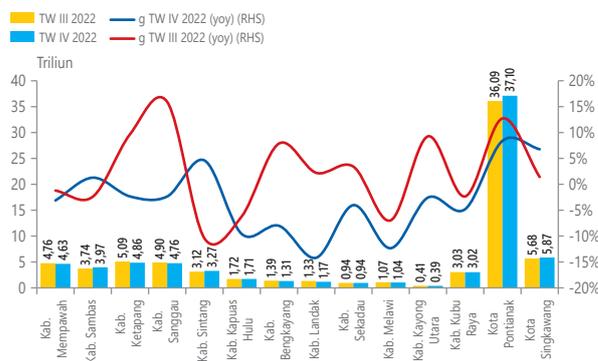
Grafik 4.3. Posisi Valuta DPK Perbankan TW III 2022 (Rp triliun)



Grafik 4.4. Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Kegiatan Bank



Grafik 4.5. Pangsa Penghimpunan DPK Kalimantan Barat berdasarkan Golongan Nasabah



Grafik 4.6. Pertumbuhan Penghimpunan DPK Kabupaten/ Kota di Kalimantan Barat

pertumbuhan spasial pada triwulan IV 2022, DPK Kota Pontianak tumbuh paling tinggi sebesar 8,38% (yoy), disusul oleh Kota Singkawang yang tumbuh sebesar 6,77% (yoy). Hal ini sesuai dengan *track record* Kota Pontianak dan Kota Singkawang sebagai pusat perdagangan dan pariwisata di Kalimantan Barat.

4.1.2. Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit oleh perbankan di Kalimantan Barat terus tumbuh pada triwulan IV 2022. Penyaluran kredit pada periode laporan mencapai Rp86,40 triliun

atau tumbuh 0,83% (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,36% (yoy). Realisasi penyaluran kredit tersebut berkontribusi sebesar 1,33% dari total penyaluran kredit perbankan nasional yang mencapai Rp6.498,62 triliun. Apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Kalimantan, pangsa penyaluran kredit di Kalimantan Barat berada di posisi ketiga setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Pertumbuhan kredit yang lebih rendah pada triwulan IV 2022 tersebut disebabkan oleh perilaku pelaku pasar yang masih *wait and see* terhadap potensi kenaikan lebih lanjut suku bunga

Tabel 4.2. Perkembangan nominal DPK Kalimantan Barat Per Kabupaten/Kota (Rp Triliun)

Wilayah	2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kalimantan Barat	61,05	63,51	66,97	65,55	65,69	68,26	68,60	71,83	72,21	73,55	73,28	74,05
Kab. Mempawah	4,81	4,56	4,75	4,92	4,63	4,77	4,82	4,78	4,74	4,74	4,76	4,63
Kab. Sambas	3,27	3,33	3,60	3,59	3,53	3,68	3,83	3,92	3,79	3,82	3,74	3,97
Kab. Ketapang	3,80	4,12	4,34	4,37	4,48	4,83	4,64	4,98	5,08	5,25	5,09	4,86
Kab. Sanggau	3,18	3,34	3,45	3,56	3,77	4,04	4,23	4,87	4,94	5,05	4,90	4,76
Kab. Sintang	2,81	2,95	3,23	2,93	2,90	2,95	3,49	3,13	3,23	3,28	3,12	3,27
Kab. Kapuas Hulu	1,61	1,70	1,91	1,72	1,70	1,69	1,84	1,90	1,85	1,85	1,72	1,71
Kab. Bengkayang	1,15	1,23	1,36	1,25	1,24	1,35	1,28	1,42	1,33	1,45	1,39	1,31
Kab. Landak	1,01	1,08	1,20	1,11	1,15	1,08	1,30	1,37	1,41	1,44	1,33	1,17
Kab. Sekadau	0,71	0,85	0,98	0,84	0,89	0,94	0,91	0,98	0,96	1,09	0,94	0,94
Kab. Melawi	0,95	1,08	1,06	1,04	1,03	1,16	1,15	1,19	1,17	1,21	1,07	1,04
Kab. Kayong Utara	0,37	0,39	0,47	0,32	0,33	0,32	0,37	0,40	0,39	0,44	0,41	0,39
Kab. Kubu Raya	2,35	2,52	2,69	2,60	2,64	2,76	3,10	3,17	2,90	3,08	3,03	3,02
Kota Pontianak	30,04	31,14	32,53	32,11	32,09	33,17	32,02	34,23	34,75	35,10	36,09	37,10
Kota Singkawang	4,98	5,23	5,38	5,19	5,31	5,50	5,60	5,49	5,67	5,74	5,68	5,87

Sumber: Bank Indonesia Cognos, diolah

Tabel 4.3. Perkembangan Kredit Perbankan (Rp Triliun)

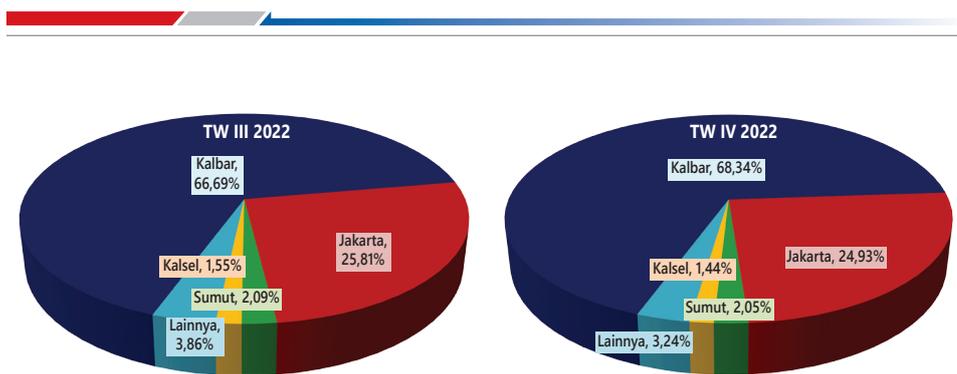
Wilayah	2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kalimantan Barat	81,03	79,73	80,72	81,96	82,07	81,00	76,77	85,69	85,44	86,57	85,49	86,40
g Kalbar (% yoy)	7,24	2,60	3,34	1,29	1,27	1,60	(4,90)	4,54	4,11	6,88	11,36	0,83
Kalimantan Tengah	62,58	59,78	60,78	60,13	58,60	61,01	65,14	61,75	62,09	65,07	68,92	69,41
Kalimantan Selatan	67,90	64,28	66,10	65,96	67,27	69,40	67,09	71,97	72,17	77,85	82,85	89,69
Kalimantan Timur	126,90	123,79	122,69	121,19	120,29	121,39	114,91	137,77	139,50	148,26	153,65	164,32
Kalimantan Utara	10,77	10,25	10,44	10,75	10,89	11,11	13,25	13,03	13,63	14,08	14,24	14,33
Nasional	5.782	5.618	5.602	5.548	5.538	5.645	5.707	5.821	5.916	6.236	6.338	6.498
g Nasional (% yoy)	8,06	1,61	0,38	(2,40)	(4,22)	0,48	1,88	4,92	6,83	10,48	11,04	11,63

acuan Bank Indonesia. Hal ini merespon langkah *The Fed* yang masih konsisten menaikkan *Fed Fund Rate* (FFR) akibat inflasi AS yang masih jauh di atas sasaran inflasinya, yaitu sebesar 2%.

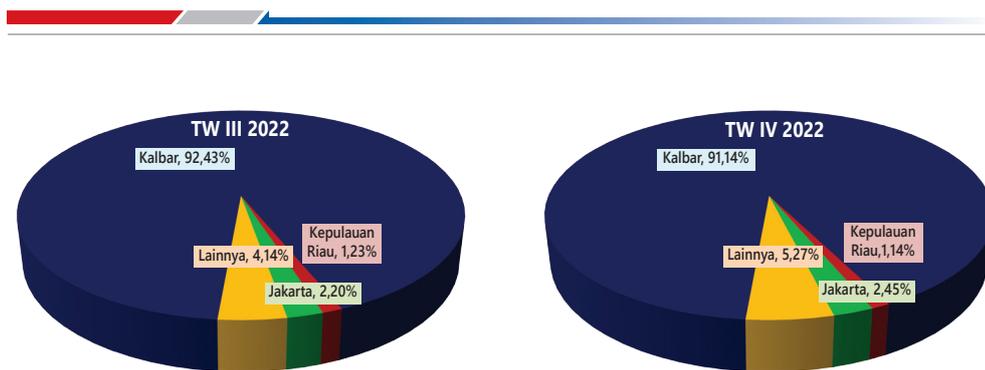
Penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan. Total kredit yang disalurkan oleh perbankan yang berlokasi di Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp59,05 triliun atau sebesar 68,34% dari total kredit di Kalimantan Barat yang sebesar Rp86,40 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan III 2021 yang sebesar Rp57,02 triliun. Sisa kredit pada triwulan IV 2022 disalurkan oleh perbankan yang berlokasi di provinsi lain terutama DKI Jakarta sebesar Rp21,54 triliun (pangsa 24,93%).

Di sisi lain, perbankan yang berlokasi di Kalimantan Barat menyalurkan kredit sebesar Rp5,74 triliun ke provinsi di luar Kalimantan Barat. Penyaluran kredit ke provinsi lain tersebut sekitar 8,86% dari total kredit yang disalurkan oleh perbankan yang berlokasi di Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022. Pangsa tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang tercatat sebesar 7,53%. Pangsa terbesar disalurkan ke DKI Jakarta dan Provinsi Kepulauan Riau masing-masing sebesar Rp1,59 triliun (pangsa 2,45%) dan Rp0,74 triliun (pangsa 1,14%).

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit produktif masih mendominasi penyaluran kredit pada triwulan IV 2022. Nilai kredit produktif yang disalurkan mencapai Rp56,18 triliun (pangsa 65,02%) yang terdiri



Grafik 4.7. Lokasi Bank Asal Penyalur Kredit berdasarkan Lokasi Proyek di Kalimantan Barat



Grafik 4.8. Lokasi Penyaluran Kredit oleh Perbankan Asal Kalimantan Barat

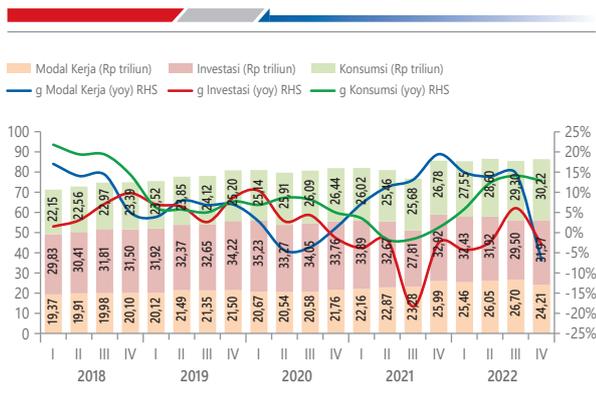
dari kredit investasi sebesar Rp31,97 triliun (pangsa 37,00%) serta kredit modal kerja sebesar Rp24,21 triliun (pangsa 28,02%). Sementara itu, penyaluran kredit konsumsi adalah sebesar Rp30,22 triliun (pangsa 34,98%).

Pertumbuhan kredit pada triwulan IV 2022 terutama didorong oleh pertumbuhan kredit konsumsi yang tumbuh 12,88% (yoy). Peningkatan kredit konsumsi ini mencerminkan perbaikan aktivitas konsumsi masyarakat sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang secara resmi mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi Covid-19 pada akhir Desember 2022. Selain itu, peningkatan kredit konsumsi juga dipengaruhi oleh perayaan hari natal dan tahun baru yang lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kredit konsumsi ini sejalan dengan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan IV 2022 di Kalimantan Barat tercatat meningkat sebesar 202,95 atau lebih tinggi dibandingkan dengan 185,66 pada triwulan sebelumnya.

Berbeda arah dengan kredit konsumsi, kredit modal kerja dan kredit investasi yang berkontraksi masing-masing sebesar -6,88% (yoy) dan -2,87% (yoy). Kontraksi kredit pada sektor produktif tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang penuh ketidakpastian antara lain karena harga komoditas yang menurun dan permintaan yang *volatile*. Berdasarkan sektor ekonominya, penurunan kinerja penyaluran kredit modal kerja terutama didorong

oleh sektor industri pengolahan yang berkontraksi 62,65% (yoy) dan sektor keuangan yang berkontraksi 32,87% (yoy). Adapun penurunan Kinerja kredit investasi dipengaruhi oleh sektor pertambangan yang berkontraksi 48,89% (yoy) dan sektor keuangan yang berkontraksi 19,48% (yoy).

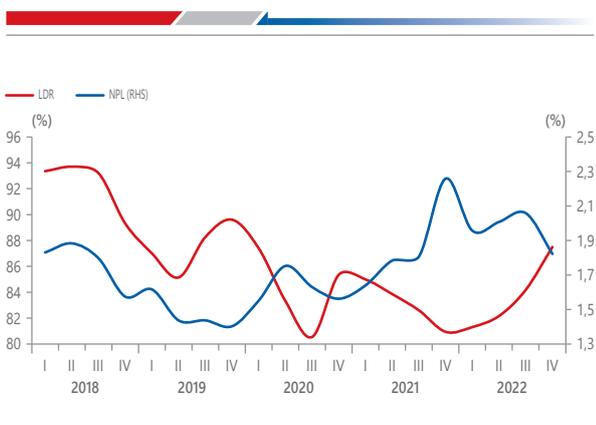
Kebijakan Bank Sentral yang merespon kenaikan Fed Fund Rate dengan menaikkan BI7DRR turut menjaga pertumbuhan kredit perbankan tetap positif. Kebijakan BI yang menaikkan BI7DRR ke level 5,50% dilakukan sebagai upaya langkah *front loaded, pre-emptive, dan forward looking* untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023. Suku bunga perbankan saat ini masih kondusif dalam mendukung pemulihan ekonomi di Kalimantan Barat. Kenaikan suku bunga perbankan terutama suku bunga kredit, relatif terbatas dibandingkan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi likuiditas yang masih longgar. Suku bunga tertimbang (SBT) kredit di Kalimantan Barat mengalami sedikit kenaikan dari 9,22% pada triwulan III 2022 menjadi 9,36% pada triwulan IV 2022. Sementara itu, berdasarkan jenis penggunaannya, SBT pada kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi juga mengalami kenaikan masing-masing menjadi sebesar 9,44%, 8,89% dan 9,66% pada triwulan IV 2022. Kenaikan suku bunga kredit ini diperkirakan masih akan terjadi ke depannya namun dalam level yang terbatas.



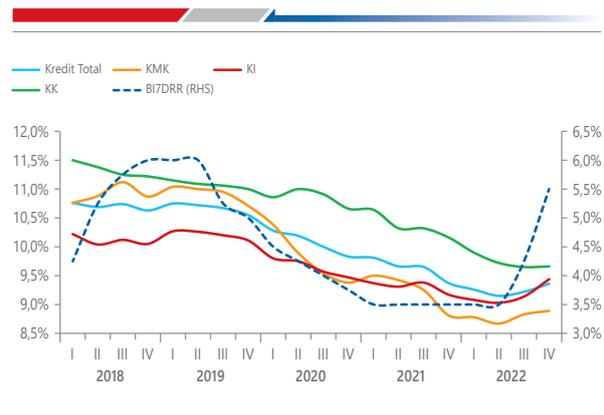
Grafik 4.9. Jenis Kredit Perbankan di Kalimantan Barat

Dari sisi kualitas kredit, *Non-Performing Loan (NPL)* kredit perbankan di Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 dalam level terjaga (di bawah *threshold* 5%) dan tercatat mengalami perbaikan. Penurunan NPL terjadi pada semua jenis penggunaan kredit. NPL kredit modal kerja menurun dari sebelumnya 3,47% menjadi 3,27%. Demikian juga dengan NPL kredit investasi dan kredit konsumsi yang mengalami perbaikan masing-masing sebesar 1,47% (sebelumnya sebesar 1,60%) dan 1,04% (sebelumnya sebesar 1,24%). Adapun tingkat intermediasi perbankan yang diindikasikan oleh *Loan to Deposit Ratio* tercatat sedikit meningkat dari 84,18% menjadi 87,50%.

Secara spasial, penyaluran kredit di Kalimantan Barat didominasi oleh Kota Pontianak. Kota Pontianak memiliki kontribusi sebesar 26,92% (Rp23,26 triliun) dari total kredit di Kalimantan Barat, disusul oleh



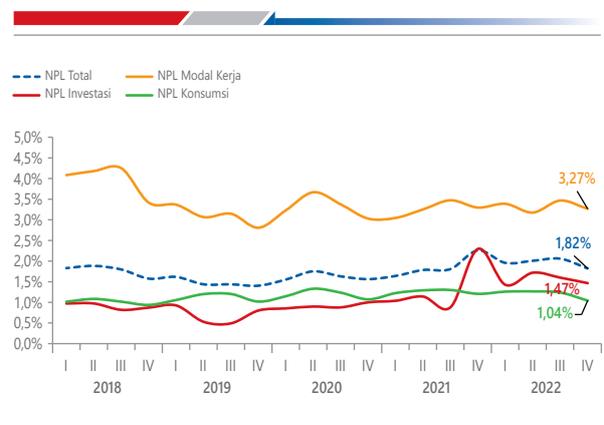
Grafik 4.11. Perkembangan LDR dan Rasio NPL Perbankan



Grafik 4.10. Suku Bunga Tertimbang (SBT) Kredit Perbankan di Kalimantan Barat

Kabupaten Ketapang sebesar 12,70% (Rp10,97 triliun), dan kabupaten Sintang 10,20% (Rp8,81 triliun). Proporsi tersebut relatif sama dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, daerah dengan pangsa penyaluran kredit terendah di Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 adalah Kabupaten Landak dan Kabupaten Kayong Utara, dengan besaran kredit masing-masing Rp2,48 triliun (pangsa 2,87%) dan Rp616 miliar (pangsa 0,71%).

Dari sisi pertumbuhan kredit, Kabupaten Kayong Utara merupakan daerah dengan pertumbuhan kredit paling tinggi. Penyaluran kredit di Kabupaten Kayong Utara tercatat sebesar 23,20% (yoy), disusul oleh Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Singkawang dengan pertumbuhan kredit masing-masing 14,64% (yoy) dan 10,36% (yoy). Pada periode laporan, pertumbuhan penyaluran kredit negatif terjadi di



Grafik 4.12. Perkembangan Rasio NPL Perbankan Berdasarkan Jenis Penggunaan

daerah Kabupaten Mempawah yaitu sebesar -27,34% (yoy). Berdasarkan risiko kredit, hampir seluruh kabupaten/kota masih mencatatkan NPL yang rendah.

Sementara itu, NPL tertinggi (namun masih di bawah *threshold*) terjadi di Kota Pontianak yang mencapai 2,33% pada triwulan IV 2022.

Tabel 4.4. Perkembangan Nominal Kredit Berdasarkan Kabupaten/Kota (Rp Miliar)

Wilayah	2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kalimantan Barat	81.034	79.726	80.725	81.963	82.066	81.000	76.772	85.688	85.438	86.575	85.493	86.401
Kab. Mempawah	11.481	9.823	10.266	9.820	9.482	9.154	8.357	9.282	9.124	9.168	8.016	6.745
Kab. Sambas	3.608	3.511	3.544	3.701	3.501	3.582	3.391	3.832	3.777	3.797	3.887	4.201
Kab. Ketapang	10.998	10.366	10.383	10.169	10.504	9.686	8.757	10.590	10.679	10.557	10.510	10.975
Kab. Sanggau	6.237	6.618	6.569	6.528	6.161	6.146	4.406	5.771	5.928	5.904	5.927	5.883
Kab. Sintang	6.182	7.348	8.572	8.779	9.075	8.886	7.927	9.693	9.675	9.666	8.820	8.810
Kab. Kapuas Hulu	3.326	3.519	3.625	3.694	4.154	4.217	3.828	5.371	5.419	5.486	5.531	5.565
Kab. Bengkayang	3.498	3.377	3.459	3.395	3.384	3.275	1.882	2.267	2.334	2.539	2.564	2.598
Kab. Landak	1.968	1.945	1.966	2.102	2.051	2.053	2.230	2.404	2.209	2.305	2.404	2.480
Kab. Sekadau	961	939	967	1.015	988	1.228	2.217	2.903	2.766	3.068	3.084	3.107
Kab. Melawi	1.503	1.580	1.606	1.640	1.674	1.672	1.742	1.886	1.939	2.067	2.000	2.038
Kab. Kayong Utara	1.079	1.159	1.110	1.074	1.023	446	454	500	487	515	528	616
Kab. Kubu Raya	7.062	6.933	7.020	6.691	6.572	6.644	6.553	6.573	6.445	6.599	6.717	6.957
Kota Pontianak	20.464	19.967	18.987	20.593	20.735	21.256	22.206	21.747	21.718	21.909	22.444	23.260
Kota Singkawang	2.668	2.642	2.651	2.762	2.762	2.755	2.824	2.869	2.937	2.995	3.062	3.166

Tabel 4.5. Perkembangan NPL Berdasarkan Kabupaten/Kota

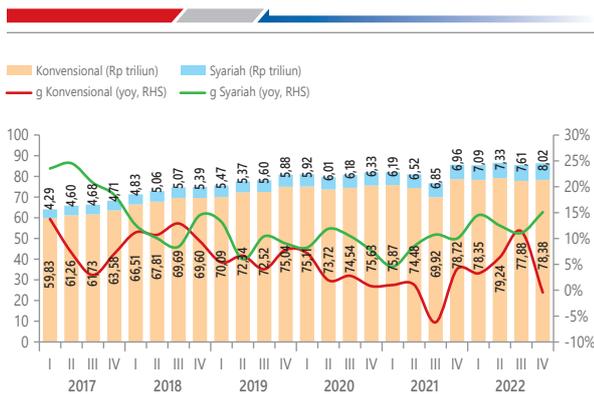
Wilayah	Rasio NPL											
	2020				2021				2022			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Kalimantan Barat	1,55%	1,75%	1,63%	1,56%	1,64%	1,78%	1,81%	2,26%	1,96%	2,01%	2,06%	1,82%
Kab. Mempawah	0,86%	1,19%	1,03%	1,25%	1,81%	1,84%	1,85%	3,22%	1,78%	2,03%	2,23%	2,33%
Kab. Sambas	0,58%	0,55%	0,47%	0,43%	0,54%	0,69%	0,86%	0,66%	0,75%	0,84%	0,86%	0,70%
Kab. Ketapang	0,57%	0,65%	0,61%	0,59%	0,62%	0,79%	0,98%	2,78%	2,79%	2,79%	2,77%	2,68%
Kab. Sanggau	1,17%	1,11%	0,97%	1,83%	0,70%	0,67%	0,97%	0,65%	0,95%	1,24%	1,42%	2,50%
Kab. Sintang	1,03%	0,98%	0,75%	0,81%	0,77%	0,91%	0,94%	0,78%	0,75%	0,78%	1,19%	0,84%
Kab. Kapuas Hulu	0,65%	0,66%	0,49%	0,43%	0,57%	0,55%	0,68%	0,46%	0,57%	0,57%	0,63%	0,80%
Kab. Bengkayang	0,83%	0,97%	0,86%	0,84%	0,95%	1,00%	1,74%	1,40%	1,56%	1,72%	1,73%	1,48%
Kab. Landak	1,63%	2,07%	1,96%	1,64%	1,82%	1,72%	1,91%	1,63%	1,60%	1,90%	1,66%	1,57%
Kab. Sekadau	1,16%	1,37%	1,38%	0,96%	1,09%	0,85%	0,45%	0,32%	0,37%	0,36%	0,33%	0,37%
Kab. Melawi	1,39%	1,62%	1,22%	1,16%	1,30%	1,74%	1,49%	1,43%	1,78%	1,59%	1,67%	1,72%
Kab. Kayong Utara	0,22%	0,31%	0,30%	0,30%	0,33%	0,69%	0,69%	0,62%	0,66%	0,71%	0,76%	0,59%
Kab. Kubu Raya	0,76%	1,27%	1,21%	1,05%	1,07%	1,04%	1,03%	4,35%	0,89%	2,20%	0,98%	0,77%
Kota Pontianak	3,51%	3,88%	3,92%	3,29%	3,57%	3,82%	3,36%	3,43%	3,69%	3,31%	3,52%	2,63%
Kota Singkawang	1,79%	1,82%	1,95%	1,21%	1,40%	1,40%	1,66%	1,32%	1,49%	1,36%	1,45%	1,16%

Berdasarkan kegiatan bank, perbankan konvensional masih mendominasi penyaluran kredit di Kalimantan Barat. Total penyaluran kredit perbankan konvensional mencapai Rp78,38 triliun (pangsa 90,72%), jauh di atas

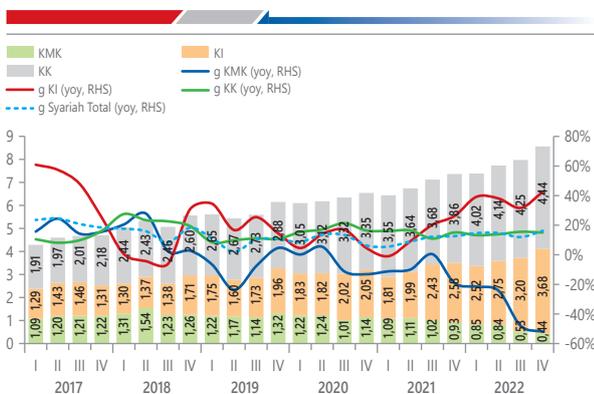
perbankan syariah yang menyalurkan sebesar Rp8,02 triliun (pangsa 9,28%). Pada triwulan laporan, kredit perbankan konvensional mengalami kontraksi sebesar -0,43% (yoy), sementara perbankan syariah tumbuh

meningkat sebesar 15,10% (yoy). Hal ini menandakan perbankan syariah di Kalimantan Barat memiliki kinerja yang baik dan stabil di tengah kondisi perekonomian yang menantang. Pertumbuhan perbankan syariah tersebut diikuti dengan tren peningkatan pangsa pembiayaan syariah yang konsisten sejak awal 2020. Pertumbuhan pembiayaan syariah terutama didorong oleh peningkatan pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumsi yang masing-masing menjadi sebesar 42,44% (yoy) dan 15,06% (yoy). Dari sisi kualitas pembiayaan syariah, seluruh jenis pembiayaan memiliki tingkat *non-performing finance* (NPF) yang sehat dan terjaga yaitu di bawah *threshold* 5%.

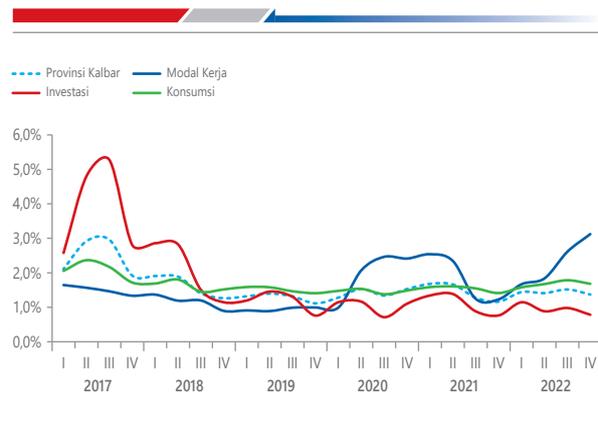
Secara spasial, pembiayaan syariah triwulan IV 2022 di Kalimantan Barat berpusat di Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak dengan pangsa masing-masing 35,22% (Rp3,02 triliun) dan 26,51%



Grafik 4.13. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Berdasarkan Kegiatan Bank



Grafik 4.14. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan



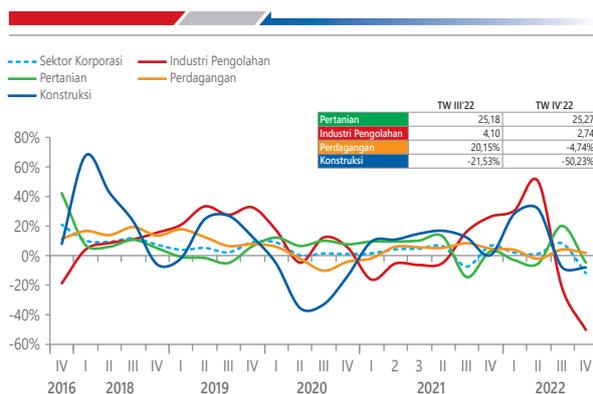
Grafik 4.15. Perkembangan Non Performing Finance (NPF) Pembiayaan Syariah

(Rp2,27 triliun). Posisi pangsa terbesar pembiayaan syariah selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kubu Raya masing-masing dengan pangsa sebesar 6,82%, 6,42%, dan 6,03%. Sedangkan apabila dilihat dari sisi kualitas pembiayaan, kerentanan tertinggi berada di Kabupaten Mempawah dengan tingkat NPF sebesar 5,12% pada triwulan IV 2022, meningkat dari triwulan sebelumnya dengan tingkat NPF sebesar 4,62%.

4.2. KETAHANAN SEKTOR KORPORASI⁶

Kinerja sektor korporasi Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 yang terindikasi dari sisi pembiayaan mengalami penurunan. Hal tersebut tercermin dari penyaluran kredit kepada sektor korporasi mencapai Rp37,94 triliun atau terkontraksi sebesar -11,86% (yoy), menurun dibanding periode sebelumnya yang tumbuh 8,26% (yoy). Penurunan kredit korporasi terutama bersumber dari penurunan kredit sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor industri pengolahan serta sektor pertanian. Ketiga sektor tersebut terkontraksi masing-masing dari 104,66% (yoy), -21,53% (yoy) dan 20,15%

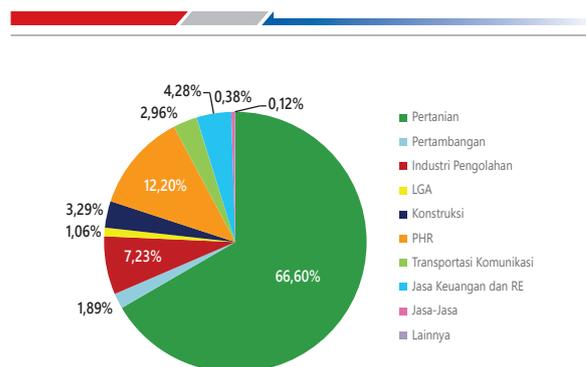
6. Mulai triwulan I 2016, kredit kepada sektor korporasi dipersempit pengertiannya dengan mengeluarkan beberapa unsur berdasarkan golongan pemilik yakni (i) penduduk yang merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah serta badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah, (ii) bukan penduduk, dan (iii) bank. Selain itu, untuk pembahasan ketahanan sektor korporasi juga ditambahkan perhitungan DPK dengan berdasarkan penggolongan pemilik yang sama.



Grafik 4.16. Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Ekonomi Utama Kalimantan Barat

(yoy) menjadi -0,49% (yoy), -50,23% (yoy) dan -4,74% (yoy). Berdasarkan pangsa, mayoritas kredit korporasi disalurkan pada lapangan usaha ekonomi utama Kalimantan Barat, yaitu pertanian sebesar Rp25,27 triliun (pangsa 66,60%), perdagangan, hotel, dan restoran Rp4,63 triliun (pangsa 12,20%, dan industri pengolahan Rp2,74 triliun (pangsa 7,23%).

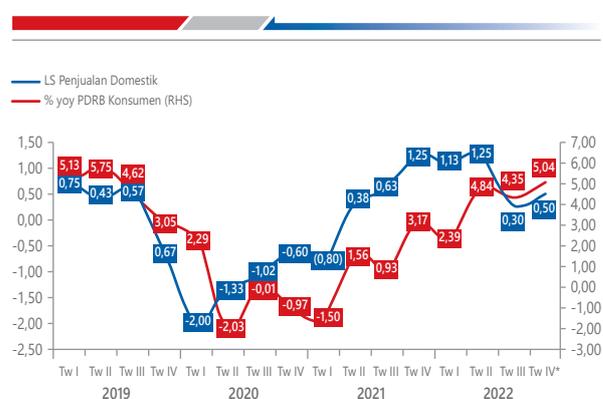
Meskipun pembiayaan ke sektor korporasi menurun, namun kinerja korporasi secara umum di Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 masih melanjutkan tren positif. Hal ini terindikasi dari hasil *liaison* yang menunjukkan peningkatan *Likert Scale* penjualan domestik beberapa sektor yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat seperti sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR), dan sektor akomodasi, makanan, dan minuman. Momentum saat tingginya permintaan dan harga komoditas CPO dan TBS sawit mencerminkan peningkatan kinerja sektor pertanian. Adapun Kinerja sektor PHR antara lain terindikasi dari penjualan kendaraan termasuk kendaraan listrik. Permintaan mobil *electric vehicle* (EV) di Kalimantan Barat jauh lebih besar dibandingkan tingkat pasokan yang tersedia mengingat tingkat *indent* yang cukup tinggi. Selain indikator penjualan domestik, *Likert Scale* investasi juga meningkat, didorong oleh peningkatan investasi *after sales branch* industri otomotif, perbaikan jalan terkait industri logistik, *replanting* lahan sawit, dan rehabilitasi areal pabrik. Sejalan dengan sektor PHR, sektor akomodasi dan makan minum juga membaik. Perbaikan ini dipengaruhi relaksasi persyaratan



Grafik 4.17. Komposisi Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor Ekonomi

transportasi angkutan udara serta banyaknya *event* nasional maupun internasional seperti, BIMP-EAGA, KPU Roadshow, kunjungan Presiden, serta *event* MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) lainnya di Kalimantan Barat. Hal ini terkonfirmasi dari *occupancy rate* saat ini sekitar 68%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 45% dan sudah melampaui keadaan normal sebelum pandemi yang biasa mencapai 60%.

Membaiknya *Likert Scale* penjualan dan investasi tersebut terkonfirmasi dari peningkatan arah perkembangan kegiatan usaha berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Provinsi Kalimantan Barat yang diperkirakan mengalami perbaikan dari 21,22% pada triwulan III 2022 menjadi 33,94% pada triwulan IV 2022. Perbaikan perkiraan tersebut didorong oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian.

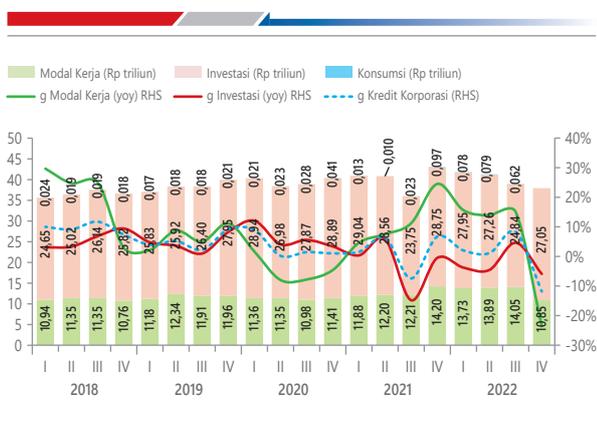


Grafik 4.18. Perkembangan *Likert Scale* Penjualan Domestik

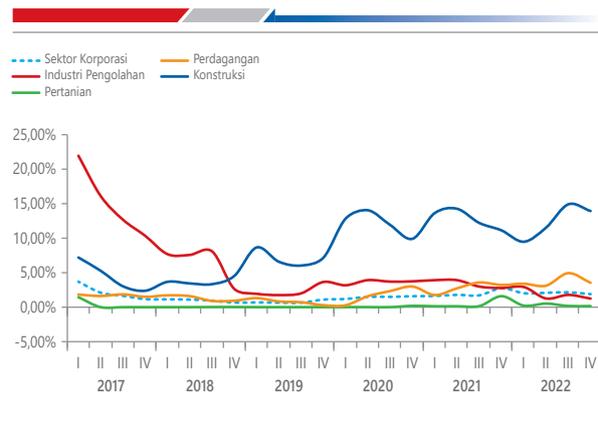
Berdasarkan jenis penggunaan, mayoritas kredit sektor korporasi pada triwulan IV 2022 disalurkan untuk investasi dengan nilai sebesar Rp27,05 triliun (pangsa 71,28%) dan modal kerja sebesar Rp10,85 triliun (pangsa 28,60%). Berdasarkan pertumbuhan, penyaluran kredit korporasi dalam bentuk Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) masing-masing menjadi -5,91% (yoy) dan -23,59% (yoy) pada triwulan IV 2022, mengalami kontraksi dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 4,61% dan 15,05% (yoy).

Berdasarkan lokasi proyek, daerah-daerah yang menerima kredit korporasi terbesar adalah Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sintang masing-masing sebesar Rp11,37 triliun (pangsa 29,96%), Rp6,56 triliun (pangsa 17,29%), dan Rp5,13 triliun (pangsa 13,52%). Peningkatan pertumbuhan kredit korporasi triwulan IV 2022 di Kalimantan Barat terutama disebabkan oleh perbaikan kinerja penyaluran kredit korporasi di Kabupaten Kayong Utara yang meningkat sebesar 146,39% (yoy) dan Kabupaten Bengkayang yang meningkat 9,95% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit korporasi yang lebih tinggi tertahan terutama oleh penurunan kinerja penyaluran kredit di Kabupaten Mempawah, Melawi, dan Kubu Raya.

Kualitas kredit korporasi pada triwulan IV 2022 berada pada level yang aman dan terjaga. Hal ini tercermin dari rasio NPL sebesar 1,89%, membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,16%.



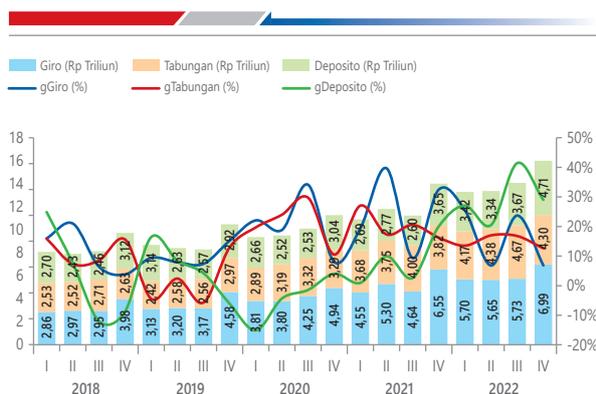
Grafik 4.19. Penyaluran Kredit kepada Sektor Korporasi di Kalimantan Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan



Grafik 4.20. NPL Kredit kepada Sektor Korporasi di Kalimantan Barat

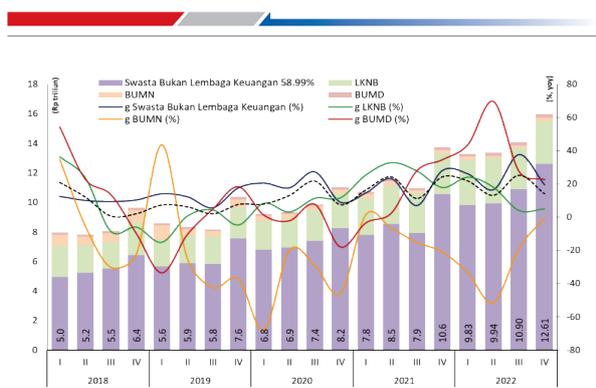
Rasio NPL tersebut masih dalam batas aman dibawah *threshold* 5%. Berdasarkan sektor ekonomi, realisasi rasio NPL tersebut terutama didorong oleh sektor PHR, pertambangan dan penggalian serta sektor industri pengolahan yang mengalami perbaikan kualitas kredit masing-masing dari 4,59%, 10,49%, dan 1,78% pada periode sebelumnya menjadi 3,53%, 9,89%, dan 1,24% pada triwulan IV 2022. Di sisi lain, peningkatan tingkat NPL yang terjadi pada sektor listrik, gas, dan air bersih dan sektor keuangan, persewaan dan perusahaan pada triwulan IV 2022 menjadi faktor penahan peningkatan kualitas kredit korporasi.

Seiring aktivitas usaha di Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 yang meningkat, DPK sektor korporasi tumbuh melambat. Pada periode laporan, DPK korporasi pada perbankan di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp16,00 triliun, tumbuh sebesar 14,14 % (yoy) atau melambat dibandingkan dengan triwulan III 2022 sebesar 25,28 % (yoy). Pertumbuhan DPK korporasi terutama didorong oleh deposito dan tabungan yang tumbuh masing-masing sebesar 29,01% (yoy) dan 12,61% (yoy) pada triwulan IV 2022. Peningkatan deposito dan tabungan di segmen korporasi sejalan dengan perbankan yang mulai menaikkan suku bunga simpanan sebagai respon kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral. Hal ini terlihat dari arah suku bunga perbankan yang menunjukkan peningkatan meskipun dalam level yang belum signifikan.

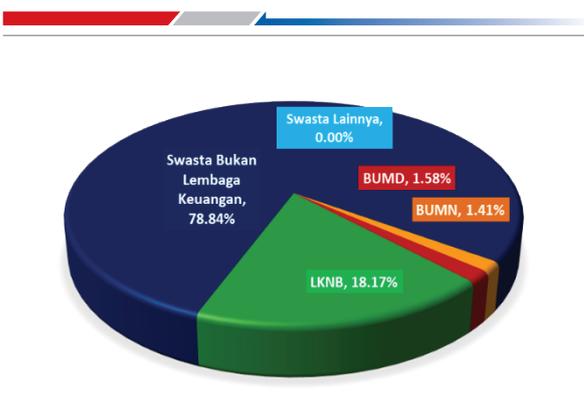


Grafik 4.21. Perkembangan Jenis DPK Korporasi Kalimantan Barat

Berdasarkan golongan pemilik, mayoritas DPK tetap disumbangkan oleh korporasi sektor swasta - bukan lembaga keuangan. Penghimpunan dana dari sektor swasta - bukan lembaga keuangan pada triwulan IV 2022 mencapai Rp12,61 triliun (pangsa 78,84% dari DPK Korporasi), atau tumbuh sebesar 19,50% (yoy). Realisasi tersebut melambat dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang sebesar 37,64% (yoy) namun pangsaanya lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 77,46%.



Grafik 4.22. Perkembangan DPK Sektor Korporasi pada KC/KCP di Kalimantan Barat Berdasarkan Golongan Pemilik



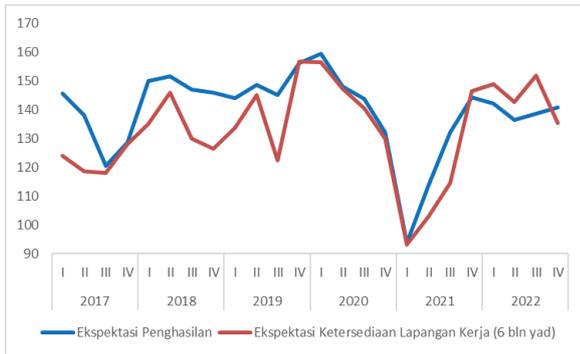
Grafik 4.23. Pangsa DPK Sektor Korporasi pada KC/KCP di Kalimantan Barat Berdasarkan Golongan Pemilik

4.3. KETAHANAN SEKTOR RUMAH TANGGA⁷

Pada triwulan IV 2022, sektor Rumah Tangga (RT) di Kalimantan Barat terus bertumbuh positif. Hal ini tercermin dari realisasi pertumbuhan konsumsi RT pada PDRB Kalimantan Barat sebesar 2,93% (yoy) pada triwulan IV 2022. Peningkatan terjadi di hampir seluruh subkelompok pengeluaran, terutama pada rekreasi dan budaya karena semakin terkendalinya Covid-19 di Kalimantan Barat.

Perbaikan ini juga tercermin dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia Kalimantan Barat dimana optimisme terhadap kondisi ekonomi secara umum sepanjang triwulan IV 2022 terus terjaga. Indeks Penghasilan Saat Ini menunjukkan peningkatan, sementara Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja tetap berada di level yang optimis meskipun sedikit melambat. Indeks Penghasilan Saat Ini, pada triwulan IV 2022 sebesar 140,67, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 138,67. Selanjutnya Indeks Ketersediaan Lapangan, pada triwulan IV 2022 sebesar 135,33, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 151,83.

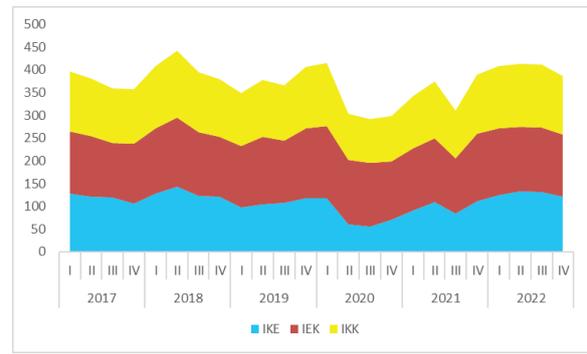
7. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tidak cukup hanya melihat ketahanan individu. Interkoneksi yang terjadi antara komponen juga perlu dilihat untuk memitigasi terjadinya risiko sistemik. Di Kalimantan Barat, rumah tangga merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian dan sistem keuangan baik dari sisi kontribusi maupun keterkaitannya dengan perbankan, pemerintah, lembaga keuangan lainnya dan korporasi.



Grafik 4.24. Perkembangan Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Kerja di Kalimantan Barat

Searah dengan hal tersebut, Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang mencerminkan kondisi ekonomi saat ini dibandingkan dengan 6 bulan sebelumnya, menunjukkan optimisme yang terjaga sepanjang triwulan IV 2022 rata-rata sebesar 120,72, meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 130,78. Perbaikan juga tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang mengindikasikan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan yang akan datang. IEK di sepanjang triwulan IV 2022 rata-rata sebesar 136,83 atau tetap berada di level optimis meskipun melambat dibandingkan triwulan III 2022 yang sebesar 142,22. Selanjutnya, perbaikan optimisme konsumen juga tercermin dari peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang secara rata-rata tercatat sebesar 128,78 pada triwulan IV 2022, melambat dari rata-rata triwulan sebelumnya sebesar 138,34.

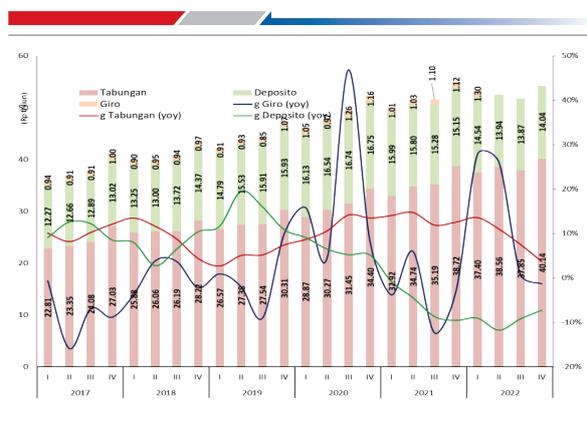
Adapun realisasi DPK perbankan di Kalimantan Barat yang berasal dari nasabah perseorangan tercatat sebesar Rp55,28 triliun atau tumbuh 0,56% (yoy). Pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,43% (yoy). Perlambatan tersebut didorong oleh tabungan dan giro yang terkoreksi masing-masing dari 7,55% yoy dan 0,85% yoy pada triwulan III 2022 menjadi 3,68% (yoy) dan -1,33% (yoy) pada triwulan laporan. Perlambatan DPK perseorangan ini disebabkan tingkat konsumsi masyarakat yang meningkat seiring pelonggaran mobilitas yang meningkat. Dana



Grafik 4.25. Perkembangan IKK, IKE, dan IEK Survei Konsumen di Kalimantan Barat

perseorangan masih mendominasi DPK perbankan di Kalimantan Barat dengan pangsa 74,67%. Secara nominal, DPK nasabah perseorangan meningkat dari periode sebelumnya yaitu dari Rp52,82 triliun menjadi Rp55,28 triliun pada triwulan IV 2022.

Sementara itu, jumlah penyaluran kredit kepada debitur perseorangan pada triwulan IV 2022 mencapai Rp30,18 triliun atau tumbuh sebesar 13,13% (yoy), relatif tetap dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 13,93% (yoy). Perbaikan kinerja pertumbuhan kredit RT terutama disebabkan oleh pertumbuhan kredit peralatan dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang masing-masing tumbuh sebesar 35,15% (yoy) dan 29,78% (yoy) pada periode laporan, meningkat dibanding periode sebelumnya sebesar 28,61% (yoy) dan 21,24% (yoy).



Grafik 4.26. Pertumbuhan DPK Perseorangan Berdasarkan Jenis Penempatan

Peningkatan kredit tersebut didorong oleh konsumsi masyarakat yang meningkat akibat pelonggaran mobilitas di tengah kenaikan harga barang akibat kenaikan harga BBM yang kemudian berimplikasi pada kenaikan inflasi secara umum. Selain itu, perayaan natal dan tahun baru pada akhir tahun 2022 dirayakan secara lebih massif dan lebih meriah dibandingkan akhir 2021. Pemulihan harga dan peningkatan produksi CPO juga menjadi pendorong penyaluran KKB untuk segmen kendaraan niaga di Kalimantan Barat. Kinerja peningkatan penyaluran KKB tersebut juga sejalan dengan lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran yang tumbuh positif sebesar 5,42% (yoy) pada PDRB triwulan IV 2022 Kalimantan Barat. Peningkatan tren kendaraan berbahan bahan listrik (EV) juga diindikasikan turut mendorong pembiayaan KKB di Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil liason, permintaan mobil EV di Kalimantan Barat jauh lebih besar dibandingkan tingkat *supply* yang tersedia mengingat tingkat *indent* yang cukup banyak. Kenaikan *demand* mobil/kendaraan tersebut terjadi di tengah kondisi harga mobil yang mengalami kenaikan sekitar 20% (yoy) seiring dengan kenaikan biaya ekspedisi/shipping barang dari Jakarta ke Pontianak.

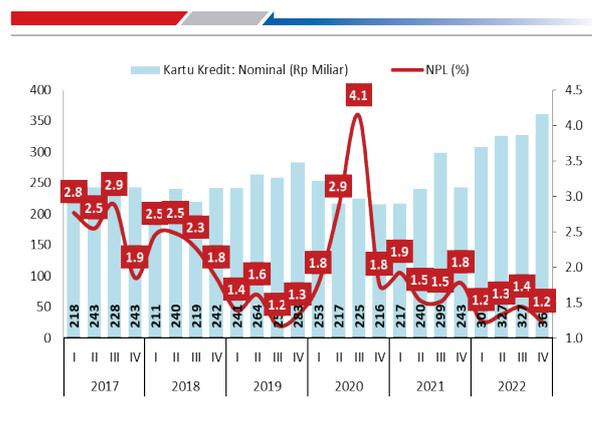
Di sisi lain, pertumbuhan kartu kredit nasabah perseorangan di Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 meningkat signifikan. Pertumbuhan kartu

kredit di Kalimantan Barat tercatat sebesar 48,76% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 9,37% (yoy). Dari sisi pertumbuhan jumlah rekening kartu kredit juga meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 101,94% (yoy) menjadi 144,68% (yoy). Capaian tersebut disebabkan oleh peningkatan konsumsi masyarakat pada periode natal dan menjelang tahun baru 2023, selain juga didorong oleh banyaknya promo akhir tahun melalui pembelian menggunakan kartu kredit. Peningkatan ini terjadi di tengah semakin banyaknya alternatif pembiayaan selain kartu kredit yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi seperti fasilitas *paylater*.

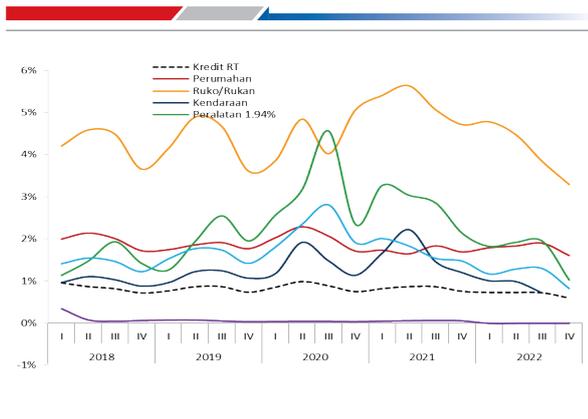
Sejalan dengan peningkatan kinerja kredit, kualitas kredit perseorangan tetap berada dalam level terjaga yang tercermin dari tingkat rasio NPL yang rendah. Secara keseluruhan, rasio NPL kredit perseorangan mencapai 0,60% pada triwulan IV 2022, membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang juga tercatat sebesar 0,72%. NPL kredit RT yang stabil terjadi pada seluruh jenis kredit perseorangan yaitu peralatan, KKB, multiguna, dan perumahan. Potensi risiko yang perlu diwaspadai adalah NPL sektor perumahan yang meskipun dalam saat ini berada di level yang rendah yaitu 1,61% pada periode laporan, mengingat NPL kredit perumahan memiliki eksposur terbesar (75,66%) terhadap total NPL kredit perseorangan.



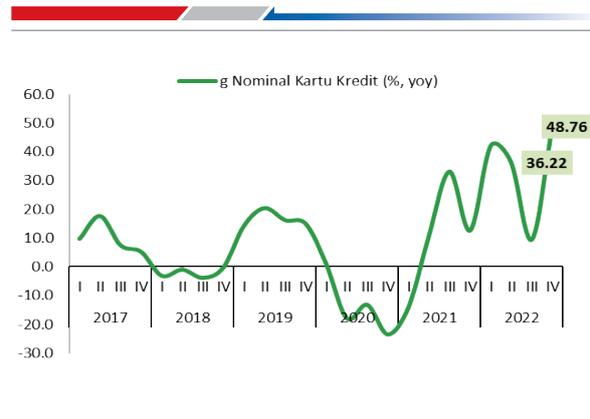
Grafik 4.27. Perkembangan Kredit Rumah Tangga



Grafik 4.28. Nominal dan NPL Kartu Kredit Rumah Tangga



Grafik 4.29. Perkembangan Rasio NPL Kredit RT Berdasarkan Sektor



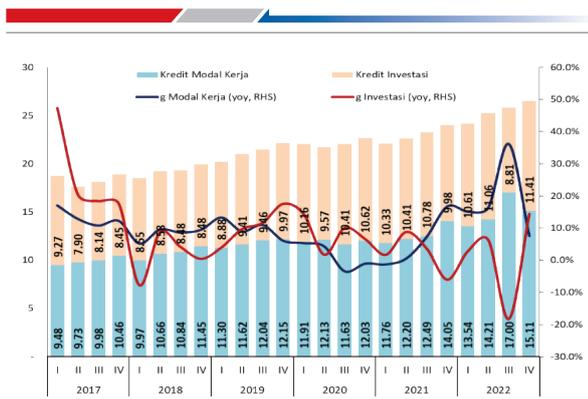
Grafik 4.30. Pertumbuhan Nominal Kartu Kredit Rumah Tangga

4.4. KETAHANAN SEKTOR UMKM⁸

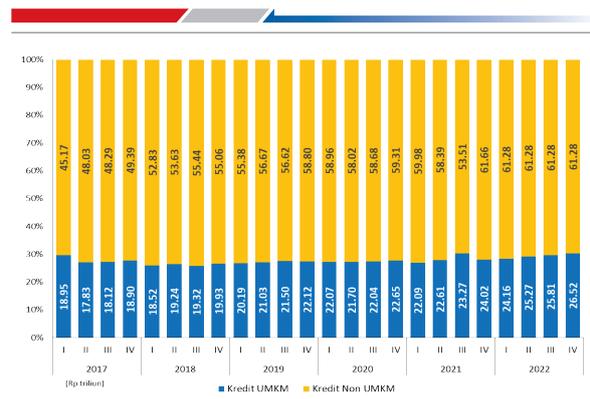
Pada triwulan IV 2022, pembiayaan UMKM Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan perbaikan kualitas kredit. Pembiayaan kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada triwulan IV 2022 di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp26,52 triliun atau tumbuh 10,40% (yoy), relatif stabil dibanding triwulan sebelumnya sebesar 10,93% (yoy). Sementara itu, pangsa pembiayaan UMKM meningkat menjadi 31,04% dari total penyaluran kredit di Kalimantan Barat, lebih tinggi dibandingkan dengan

pangsa pada triwulan sebelumnya yang sebesar 30,21%. Di sisi lain, rasio NPL kredit UMKM pada akhir triwulan IV 2022 tercatat sebesar 3,21%, mengalami perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,52%. Realisasi NPL tersebut masih dalam batas aman di bawah *threshold* 5%.

Berdasarkan jenis penggunaan, membaiknya pembiayaan UMKM Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 didorong oleh perbaikan kinerja kredit investasi. Kredit investasi UMKM meningkat dari sebelumnya -18,30% (yoy) menjadi sebesar 43,03%



Grafik 4.31. Pembiayaan UMKM Kalimantan Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan

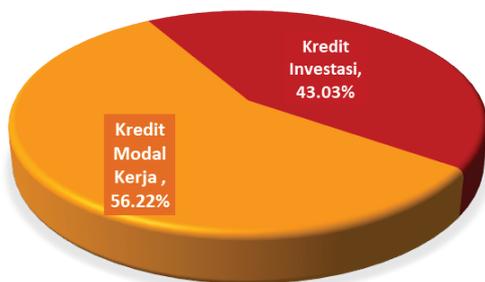


Grafik 4.32. Perkembangan Pembiayaan UMKM (dalam triliun)

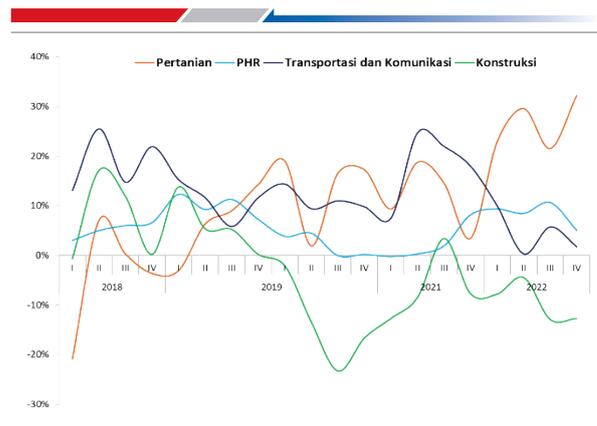
8. Pengertian UMKM adalah sesuai UU No. 20 Tahun 2008. Mulai triwulan I 2016, pengertian kredit kepada sektor UMKM dipersempit yakni kredit kepada UMKM yang merupakan bagian dari sektor korporasi dan perseorangan yang merupakan penduduk.

(yoy) pada triwulan IV 2022. Sementara itu, penyaluran kredit modal kerja kepada UMKM mengalami penurunan dari 36,16% (yoy) menjadi 7,58% (yoy) pada triwulan laporan. Berdasarkan pangsa, mayoritas pembiayaan UMKM disalurkan untuk modal kerja dengan pangsa 56,97% (Rp15,11 triliun), sedangkan sisanya disalurkan untuk investasi yang memiliki pangsa 43,03% (Rp11,41 triliun). Hal yang perlu digarisbawahi adalah terdapat peningkatan pangsa kredit investasi kepada UMKM yang awalnya 34,13% menjadi 43,03%. Pergeseran portfolio ini menunjukkan pelaku UMKM mulai melakukan ekspansi investasi/ pengadaan sarana penunjang yang sifatnya *long-term*.

Berdasarkan lapangan usaha, peningkatan kinerja pembiayaan UMKM bersumber dari membaiknya pembiayaan kepada sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Kinerja pembiayaan UMKM di sektor pertanian mengalami perbaikan dari sebelumnya 21,73% (yoy) menjadi 33,17% (yoy). Kenaikan serupa juga terjadi pada sektor industri pengolahan dari 2,14% (yoy) menjadi 10,85% (yoy). Perbaikan kinerja kredit UMKM yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja kredit sektor pertambangan dan sektor keuangan yang terkoreksi masing-masing dari 9,21% (yoy) dan -21,30% (yoy) menjadi -17,96% (yoy) dan -28,96% (yoy). Berdasarkan pangsa, mayoritas kredit UMKM Kalimantan Barat disalurkan pada sektor PHR sebesar 42,19 diikuti oleh sektor pertanian dan sektor keuangan dengan pangsa masing-masing sebesar 37,96% dan 5,83%.

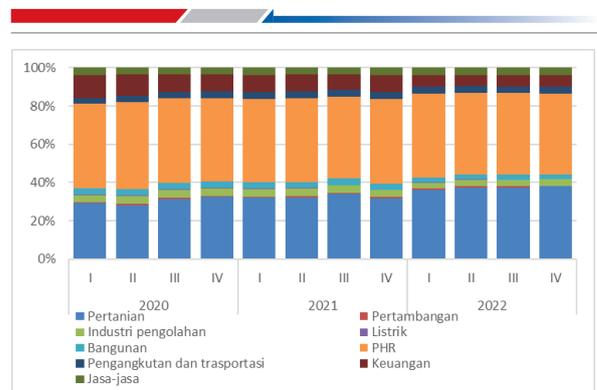


Grafik 4.33. Pangsa Pembiayaan UMKM Kalimantan Barat TW IV 2022 berdasarkan Jenis Penggunaan

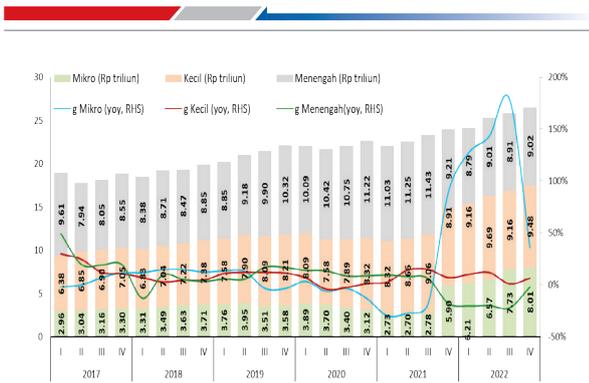


Grafik 4.34. Pendorong Pertumbuhan Pembiayaan UMKM triwulan IV 2022 Berdasarkan Lapangan Usaha

Berdasarkan skala usaha, kredit UMKM lebih banyak disalurkan untuk kredit usaha kecil dengan pangsa 35,76% (Rp9,48 triliun). Sementara itu, kredit usaha menengah dan kredit usaha mikro memiliki pangsa masing-masing 34,03% (Rp9,02 triliun) dan 30,22% (Rp8,01 triliun). Berdasarkan pertumbuhannya, kredit usaha mikro mengalami peningkatan pertumbuhan paling tinggi menjadi 35,78% (yoy) pada triwulan IV 2022, menurun dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang tumbuh sebesar 178,52 % (yoy). Pertumbuhan kredit UMKM yang lebih tinggi tertahan oleh kredit usaha menengah yang mengalami kontraksi sebesar -2,05% (yoy).

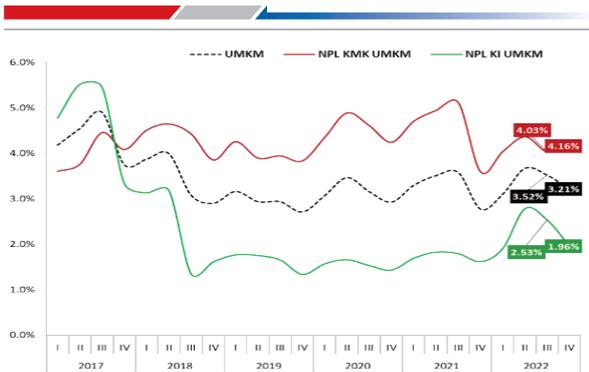


Grafik 4.35. Nominal (Rp Triliun) dan Pangsa Pembiayaan UMKM Kalimantan Barat Berdasarkan Lapangan Usaha



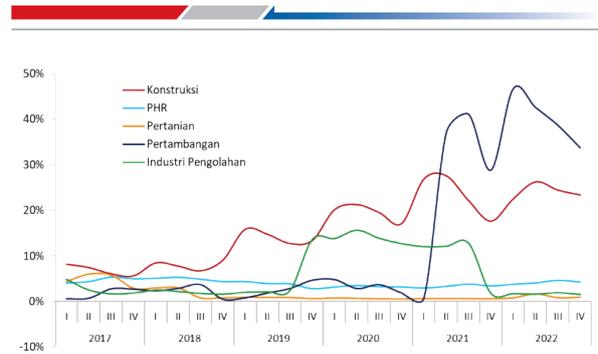
Grafik 4.36. Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Kategori Debitur

Dari sisi kualitas, kredit UMKM mencatatkan perbaikan kinerja terutama bersumber dari penurunan rasio NPL kredit modal kerja dan kredit konsumsi. NPL kredit modal kerja dan kredit konsumsi tercatat masing-masing sebesar 3,21% dan 1,96%, mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya sebesar 3,52% dan 2,53%. Sementara itu, berdasarkan lapangan usaha, perbaikan rasio NPL kredit UMKM didorong oleh penurunan NPL terutama pada sektor pertambangan dan konstruksi masing-masing dari 38,64% dan 24,51% pada triwulan sebelumnya menjadi 33,70% dan 23,44%. Meskipun tingkat NPL secara sektoral cukup tinggi, namun NPL kredit UMKM secara keseluruhan di Kalimantan Barat masih terjaga di batas yang aman.



Sumber: Bank Indonesia Cognos, diolah

Grafik 4.37. Perkembangan NPL Kredit UMKM



Sumber: Bank Indonesia Cognos, diolah

Grafik 4.38. Perkembangan NPL Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha



BOKS 3Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)
Kalimantan Barat: "Membangun UMKM Kalimantan Barat Go Global"

Kondisi Pandemi Covid-19 yang berlangsung sekitar tiga tahun terakhir menyadarkan betapa pentingnya mendorong perkembangan dan penguatan UMKM yang nyatanya menjadi fondasi pertahanan perekonomian Indonesia ketika hampir seluruh sektor terdampak dahsyat Pandemi Covid-19. Tentu saja, pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan oleh hanya 1 (satu) pihak, melainkan dengan sinergi dan kolaborasi bersama melalui program strategis yang diimplementasikan secara nasional dan regional. Di sisi lain, tercatat telah terjadi pergeseran perilaku konsumen dari kebiasaan belanja secara luring menjadi daring melalui *online platform*. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diluncurkan sejak 14 Mei 2020 merupakan kampanye gotong – royong yang bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan produk lokal, mengakselerasi transformasi digital UMKM, memperluas akses pembiayaan dari hulu sampai dengan hilir, dan peningkatan permintaan produk ekonomi kreatif buatan UMKM Indonesia. Gernas BBI juga telah menjadi motor utama dalam menggerakkan pengusaha UMKM serta para Artisan memanfaatkan teknologi digital. Fokus dan target program Gernas BBI 2022 adalah peningkatan UMKM Artisan ke ekosistem digital, peningkatan transaksi penjualan, dan pendampingan pengembangan jiwa kewirausahaan, yang tujuan akhirnya adalah menciptakan *multiplier effect* berupa pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Arah pengembangan Gernas BBI 2022 mengusung konsep kampanye *Opening-Harvesting* yang ramah lingkungan yang diselaraskan dengan kampanye Gerakan Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja. Selain itu, dalam Gernas BBI 2022, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu *Host* pelaksanaan Gernas BBI 2022 dengan Kementerian BUMN sebagai *Movement Manager* dan telah melakukan *Kick Off* Gernas BBI Kalimantan Barat pada tanggal 15 September 2022. Dalam implementasinya, KPwBI Provinsi Kalimantan Barat mengusung *thematic timeline* di setiap bulannya sebagai semangat dan fokus program, diantaranya *Khatulistiwa Food Expo* (September 2022), *West Borneo Handycraft* (Oktober 2022), *Borneo Fashion* pada (November 2022), dan *Borneo Harvesting* (Desember 2022).

Sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi, KPwBI Provinsi Kalimantan Barat telah menyelenggarakan serangkaian *event* terkait pengembangan UMKM untuk mendorong semangat bangga produk lokal dan menciptakan semangat UMKM *Go Global*, diantaranya kegiatan Kurasi Produk, *Onboarding* UMKM, *Showcase*, Fasilitasi Inovasi dan Literasi Keuangan, Pelatihan Pengembangan Kapasitas, *Talkshow*, dan lain sebagainya. KPwBI Provinsi Kalimantan Barat juga bekerjasama dengan Rumah BUMN untuk mengadakan *Roadshow* Sosialisasi Pengembangan



SIAPIK dan *Packaging* guna meningkatkan transaksi dan akses keuangan UMKM di daerah Mempawah, Pontianak, Sekadau, Sanggau, Sintang, Melawi, dan Sambas.

Puncak GBBI 2022 mengangkat tema Corak – Corak KalBar dengan harapan UMKM KalBar tidak hanya berkembang di dalam negeri, namun mendunia. Dalam acara Puncak GBBI 2022, telah diberikan Apresiasi kepada Onboarding 14 Kabupaten/ Kota dan Devisa Ekspor Lada, Pemberdayaan UMKM 7 Rumah BUMN dan Sertifikat Halal, serta 5 (lima) UMKM *Champion*. *Showcase* juga telah diselenggarakan



bersama PT. Angkasa Pura II dalam rangka mendorong peningkatan transaksi UMKM dan membumikan produk lokal di Megamall Ahmad Yani dan Bandara Supadio. Selain itu, pada malam Anugerah Bangsa Buatan Indonesia, 2 (dua) diantara UMKM binaan Bank Indonesia berhasil meraih penghargaan Juara 1 UMKM Kategori Kuliner yaitu 101 *Coffee* dan Juara 1 UMKM Kategori Kecantikan dan Kebugaran yaitu Arcia Oil. Pesta Panen UMKM Gernas BBI Kalbar *Harvesting* Gernas BBI Kalbar juga digelar di Pelataran Rumah Radakng, Pontianak, 9-10 Desember 2022 dengan menghadirkan para UMKM juara yang memperkenalkan produknya di pasar rakyat selama gelaran *harvesting* tersebut.

Rangkaian Agenda Gernas BBI 2022 Kalimantan Barat mengantarkan UMKM naik kelas melalui berbagai program seperti *Onboarding*, *Business Matching*, penyelenggaraan *Showcase*, hingga Apresiasi. Kegiatan ini didukung oleh segenap *Stakeholders* yang telah berkontribusi besar untuk menyukseskan Gernas BBI Kalimantan Barat hingga meraih pencapaian diantaranya 255 Peserta UMKM telah mengikuti *Onboarding*, total pembiayaan UMKM hasil *Business Matching* sebesar Rp200 Milyar (data Siaran Pers Kementerian BUMN), rata-rata jumlah pengunjung harian mencapai 200 orang, dan *volume* transaksi mencapai Rp148,679,850.

Keberhasilan Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif selama masa Pandemi Covid-19 tidak lepas dari peran UMKM serta para Artisan yang berhasil bertahan dengan memanfaatkan teknologi digital, serta terus mengembangkan kualitas produknya yang merupakan kreasi lokal sehingga mampu menjadi pilihan utama pasar Indonesia. Ke depan diharapkan akan terus hadir program-program sinergi antar lembaga yang mampu mendorong maju dan berkembangnya UMKM hingga berhasil terwujudnya UMKM Go Global.

BAB V PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT FEBRUARI 2023





Pada triwulan IV 2022, pengelolaan Uang Rupiah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat mengalami net outflow sebesar Rp3,64 triliun. Peningkatan permintaan uang dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pada periode Hari Raya Natal dan Tahun Baru menjadi penyebab terjadinya arus balik aliran uang di triwulan ini. Sementara itu, penurunan transaksi BI-RTGS dan SKNBI dari sisi nominal transaksi maupun volume selama triwulan IV 2022 turut dipengaruhi oleh perkembangan implementasi BI-Fast.

Perkembangan implementasi Bantuan Sosial Non Tunai melalui PKH berjalan dengan lancar. Tingkat penyerapan PKH pada triwulan IV 2022 sudah mencapai 100%. Selanjutnya, upaya akselerasi elektronifikasi transaksi keuangan di Kalimantan Barat terus dilakukan terutama pada percepatan perluasan QRIS dan menjaga kelancaran penyaluran program bantuan sosial. Hingga Desember 2022 terdapat 232.411 merchant QRIS di Kalimantan Barat, meningkat 6,66% secara qtq dibandingkan posisi September 2022 yang berjumlah 217,895 merchant.



5.1. PERKEMBANGAN TRANSAKSI NON TUNAI

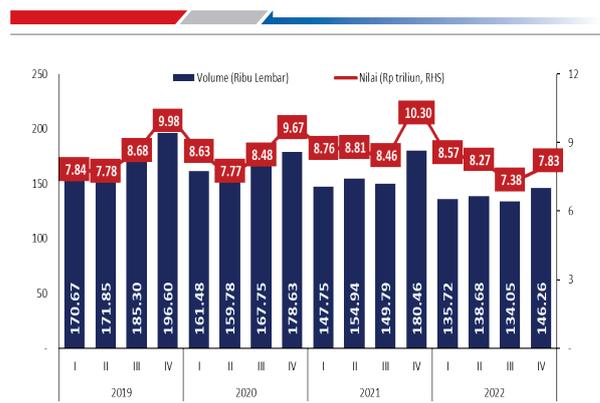
5.1.1. Transaksi Kliring dan Real Time Gross Settlement

Transaksi melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) tercatat mengalami kontraksi baik dari sisi nominal maupun volume sejalan dengan semakin meluasnya transaksi melalui BI FAST. Nominal transaksi BI-RTGS triwulan IV 2022 tercatat sebesar Rp30,12 triliun, tumbuh negatif sebesar 10,97% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp33,83 triliun, sementara volume transaksi BI-RTGS mencapai 11.829 transaksi, tumbuh negatif sebesar 11,79% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2021 yang tercatat 13.410 transaksi.

Transaksi SKNBI juga mengalami kontraksi dari sisi nominal maupun volume. Sepanjang triwulan IV 2022, nominal transaksi SKNBI mencapai Rp7,83 triliun, tumbuh negatif sebesar 24,04% (yoy) dibandingkan dengan triwulan IV 2021 yang mencapai Rp10,30 triliun. Volume SKNBI tercatat 146.261 transaksi atau tumbuh negatif sebesar 18,95% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2021. Penurunan transaksi BI-RTGS dan SKNBI ini turut dipengaruhi oleh perkembangan transaksi melalui BI-FAST. Per 28 November 2022, jumlah peserta BI-FAST bertambah 29 Bank, sehingga total peserta BI-FAST telah mencapai 106 bank peserta atau 87% dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional.



Grafik 5.1. Perkembangan Transaksi RTGS di Kalimantan Barat



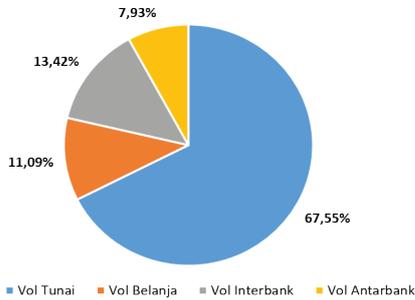
Grafik 5.2. Perkembangan Transaksi Kliring di Kalimantan Barat

5.1.2. Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Nilai transaksi APMK berupa kartu ATM/debet mengalami kenaikan cukup signifikan. Nilai transaksi kartu ATM/debet pada periode triwulan IV 2022 tercatat Rp23,24 Triliun, tumbuh sebesar 18,70% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2021 yang sebesar Rp19,58 triliun. Pertumbuhan juga terjadi pada volume transaksi kartu ATM/debet yang tercatat sebesar 22,47 juta transaksi atau tumbuh sebesar 17,15% (yoy).

Jumlah kartu ATM/debet di Kalimantan Barat per Desember 2022 tercatat sebanyak 3.954.514 kartu sedangkan jumlah mesin ATM tercatat 1.580. Berdasarkan jenis transaksi, volume penggunaan kartu ATM/debet pada triwulan IV 2022 didominasi oleh transaksi tarik tunai dengan pangsa sebesar 67,55% diikuti oleh transaksi interbank dengan pangsa sebesar 13,42%, dan transaksi lainnya (antar bank dan belanja) dengan pangsa sebesar 19,02%.

Nilai transaksi kartu kredit pada triwulan IV 2022 mengalami penurunan dari sisi volume namun mengalami peningkatan dari sisi nominal transaksi. Secara nominal, penggunaan kartu kredit pada triwulan IV 2022 tumbuh 48,76% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,37% (yoy). Secara volume, penggunaan kartu kredit mengalami peningkatan sebesar 32,38% (yoy) pada triwulan IV 2022, namun sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan III



Grafik 5.3. Penggunaan transaksi APMK ATM/Debet di Kalimantan Barat

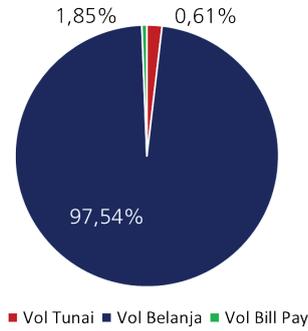
2022 yang tumbuh sebesar 45,45% (yoy). Sementara itu, terjadi penurunan rasio NPL dari pinjaman melalui kartu kredit dari 1,44% pada triwulan sebelumnya menjadi 1,23% pada triwulan III 2022.

Jumlah kartu kredit di Kalimantan Barat per Desember 2022 adalah 126.768, meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 123.960 kartu. Peningkatan jumlah kartu kredit dipengaruhi oleh berkembangnya layanan dan inovasi di bidang sistem pembayaran diantaranya pengajuan kartu kredit secara digital. Berdasarkan jenis transaksi, penggunaan kartu kredit didominasi untuk transaksi belanja yang mencapai pangsa sebesar 97,54%.

5.2. PENYEDIAAN UANG LAYAK EDAR⁹

Pada triwulan IV 2022, KPwBI Provinsi Kalimantan Barat mengalami *net outflow* sebesar Rp3,64 triliun. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami *net inflow* sebesar Rp548 miliar sebagai dampak peningkatan kebutuhan uang dalam menghadapi periode Nataru. Aliran uang yang keluar dari Bank Indonesia tercatat sebesar Rp4,86 triliun, meningkat 145,65% dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,98 triliun. Kebutuhan uang masyarakat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru mempengaruhi terjadinya

9. Terjadinya *net outflow* tersebut didorong oleh lebih besarnya jumlah uang yang keluar (*outflow*) dari KPwBI Provinsi Kalimantan Barat dibandingkan dengan jumlah uang yang masuk (*inflow*).

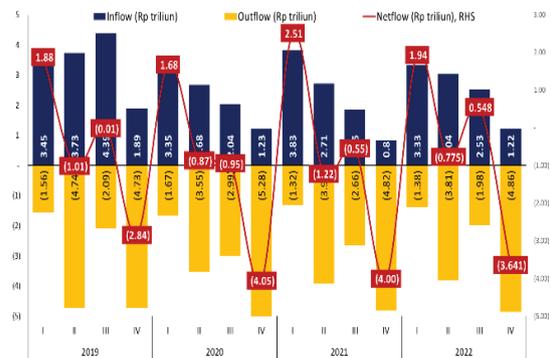


Grafik 5.4. Penggunaan transaksi APMK Kartu Kredit di Kalimantan Barat

peningkatan *outflow* yang signifikan pada triwulan IV 2022. Berdasarkan pecahannya, aliran uang keluar didominasi oleh uang pecahan Rp100.000 senilai Rp3,13 triliun diikuti pecahan Rp50.000 dan Rp20.000 masing-masing senilai Rp1,59 triliun dan Rp54,59 miliar.

5.3. PERKEMBANGAN TEMUAN UANG RUPIAH YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA

Temuan uang Rupiah yang diragukan keasliannya selama triwulan IV 2022 mencapai 594 bilyet yang didominasi oleh pecahan Rp100.000 sebanyak 249 bilyet dan pecahan Rp50.000 sebanyak 340 bilyet. Berdasarkan sumbernya, 89% temuan uang Rupiah yang diragukan keasliannya diperoleh dari perbankan



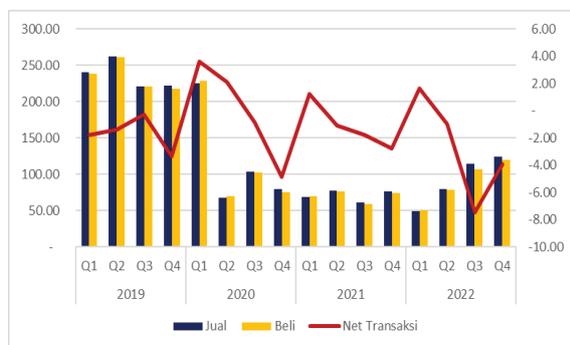
Grafik 5.5. Perkembangan *Inflow-Outflow* di KPwBI Prov. Kalimantan Barat

dan 11% merupakan temuan dari PJPUR. Keseluruhan temuan uang Rupiah yang diragukan keasliannya tersebut dilaporkan secara berkala kepada Kepolisian untuk dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

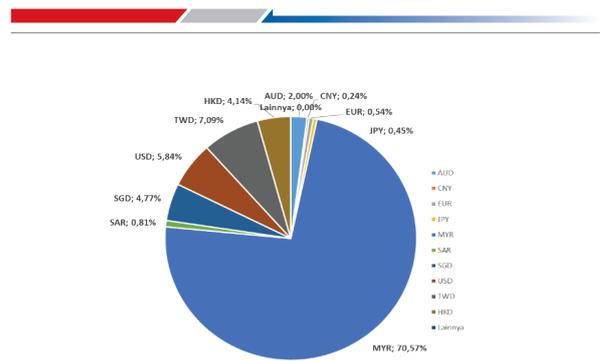
Dari sumber temuan uang Rupiah yang diragukan keasliannya menyiratkan keberhasilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah ke berbagai lapisan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih cermat dalam mengenali ciri-ciri keaslian uang Rupiah, terutama ibu-ibu rumah tangga, anak sekolah, dan mahasiswa. Kegiatan sosialisasi CBP yang dilakukan diantaranya Masyarakat Sehat dan Aktif (MASIF) CBP pada kecamatan-kecamatan di Kota Pontianak, CBP *Goes to School* pada lingkungan sekolah, dan CBP *Goes to Campus*.

5.4. PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING (KUPVA) DAN PENYELENGGARA TRANSFER DANA (PTD)

Transaksi pembelian dan penjualan uang kertas asing (UKA) oleh KUPVA Bukan Bank (KUPVA BB) di Kalimantan Barat mengalami peningkatan. Pada triwulan IV 2022, total pembelian UKA oleh KUPVA BB tercatat sebesar Rp120 miliar, meningkat 12,63% dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp106,54 miliar. Transaksi penjualan UKA oleh KUPVA BB juga



Grafik 5.6. Transaksi Valuta Asing di Prov. Kalimantan Barat

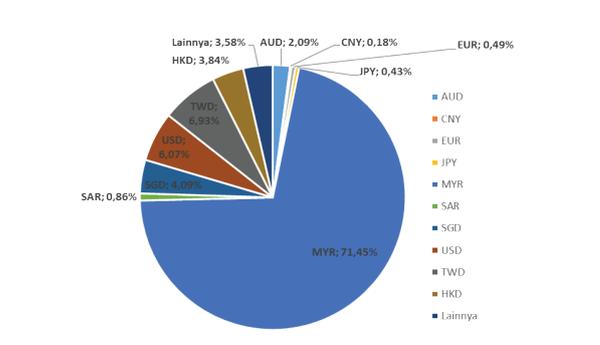


Grafik 5.7. Andil penjualan valas di Kalimantan Barat per jenis mata uang

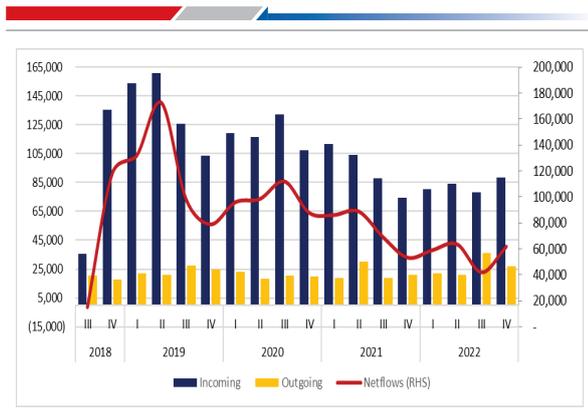
tercatat mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp123,92 miliar, meningkat 8,66% dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp114,04 miliar.

Berdasarkan jenis mata uang, Malaysian Ringgit (MYR) masih mendominasi transaksi valas di KUPVA BB di Kalimantan Barat. Pada triwulan IV 2022, transaksi pembelian UKA MYR memiliki pangsa sebesar 71,45% dari keseluruhan transaksi pembelian UKA KUPVA BB, diikuti oleh Taiwan Dollar (TWD) yang mencapai 6,93%, dan US Dollar (USD) sebesar 6,07%. Letak geografis Kalimantan Barat yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia menjadi penyebab dominasi transaksi valas di Kalimantan Barat oleh Malaysian Ringgit (MYR).

Nilai pengiriman uang dari luar negeri melalui Penyelenggara Transfer Dana (PTD) di Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 mengalami peningkatan.



Grafik 5.8. Andil pembelian valas di Kalimantan Barat per jenis mata uang



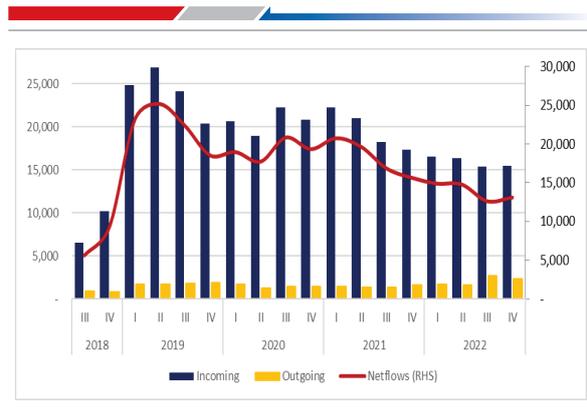
Grafik 5.9. Nominal Transaksi PTD di Kalimantan Barat

Netflow nominal pengiriman uang dari luar negeri ke Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp61,49 miliar, meningkat 47,49% dari triwulan sebelumnya. Nominal *incoming* tercatat sebesar Rp88,23 miliar lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2022 yang sebesar Rp77,90 miliar. Sementara nominal *outgoing* tercatat sebesar Rp26,74 miliar, mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp36,21 miliar.

Dari sisi volume, transaksi *incoming* tercatat sebanyak 15.427 transaksi, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15.335 transaksi. Volume transaksi *outgoing* tercatat sebanyak 2.312 transaksi, mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 2.704 transaksi.

5.5. PROGRAM ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN

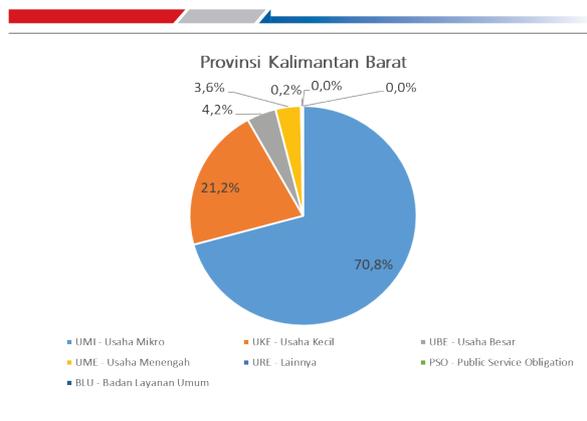
Implementasi elektronifikasi transaksi keuangan melalui penggunaan QRIS terus terakselerasi di wilayah Kalimantan Barat. Jumlah *merchant* QRIS di Kalimantan Barat hingga akhir triwulan IV 2022 mencapai 232.411 *merchants*. Berdasarkan sebaran, Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi yang didukung dengan infrastruktur jaringan yang memadai masih menjadi wilayah dengan jumlah *merchants* terbesar. Jumlah *merchant* di Kota Pontianak mencapai 103.857 *merchants*, disusul oleh Kabupaten Ketapang dan Kota Singkawang masing-masing sebesar 21.675 dan 21.219 *merchants*.



Grafik 5.10. Volume Transaksi PTD di Kalimantan Barat

Berdasarkan kategori *merchant*, kategori Usaha Mikro (UMI) mendominasi *merchant* QRIS di wilayah Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 dengan pangsa sebesar 70,76% atau sebanyak 164.462 *merchants*, diikuti kategori usaha Kecil (UKE) dengan pangsa 21,15% atau sebanyak 49.158 *merchants* serta Usaha Besar (UB), kategori Usaha Menengah (UME), lainnya (URE), *Public Service Obligation* (PSO) serta Badan Layanan Umum (BLU) dengan jumlah *merchant* masing-masing sebanyak 9.706 (4,18%), 8.404 (3,62%), 535 (0,23%), 112 (0,05%) dan 34 (0,01%).

Pada tahun 2023, Bank Indonesia akan fokus pada peningkatan transaksi dan jumlah pengguna QRIS untuk mendorong akselerasi pengembangan ekonomi digital di Indonesia, dengan target mencapai 45 juta pengguna pada akhir tahun 2023. Jumlah pengguna QRIS di Kalimantan Barat pada Desember 2022 telah



Grafik 5.11. Pangsa Merchant QRIS berdasarkan Kategori Usaha di Prov. Kalimantan Barat

mencapai sejumlah 349.582 *user* QRIS. Berbagai program perluasan pengguna QRIS dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, pasar tradisional dan modern, serta komunitas informal yang ada di Kalimantan Barat.

Elektronifikasi transaksi keuangan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako terus berjalan optimal. Tingkat penyerapan Program Sembako pada bulan Desember 2022 berdasarkan

data yang dihimpun oleh Kantor Pusat Bank Indonesia berada di angka 100% dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 304.183. Untuk penyaluran PKH tahap I, II, III, dan IV 2022 dilakukan secara non tunai melalui Himbara sebesar Rp134,67 miliar dengan penyerapan jumlah KPM sebesar 99,16%. Pada periode laporan, penyaluran Program Sembako disalurkan melalui Himbara-BSI serta PT. Pos secara tunai.

BOKS 3**Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah**

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif dan berkelanjutan, melalui program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan *capacity building* Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), pengisian serentak Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester II 2022 dan *launching* Implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Layanan SIM dan SKCK di Wilayah Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Barat pada 14 – 15 Desember 2022.

Kegiatan dibuka oleh Bpk. Agus Chusaini, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, dan Bpk. Dr. Syarif Kamaruzaman, M.Si., Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral yang dalam hal ini mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan terkait percepatan implementasi ETPD yang harus terus diperkuat antara lain melalui kerja sama dan koordinasi yang erat dan berkelanjutan dengan Bank RKUD serta Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) lainnya.

Program ETPD bertujuan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah khususnya pajak dan retribusi serta meningkatkan tata kelola keuangan (*governance*) pengelolaan keuangan dan realisasi belanja daerah. Melalui pertemuan TP2DD dan bank RKUD dilaksanakan koordinasi bersama untuk menghadapi tantangan seperti perbedaan infrastruktur IT, kesiapan bank RKUD, data ETPD yang belum terbentuk, komitmen pemda, dan literasi non tunai masyarakat.

Untuk mencapai tujuan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, digunakan tolak ukur Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda (Indeks ETPD). Indeks ETPD merupakan instrumen untuk memetakan dan memantau perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta mengukur perbandingan elektronifikasi transaksi pemda di suatu daerah terhadap daerah lainnya. Kegiatan *Capacity Building* TP2DD dan pengisian IETPD dipandu langsung oleh narasumber Bpk. Puji Gunawan (Asisten Deputi Kemenko Perekonomian RI) dan narasumber dari Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP) Bank Indonesia.



Gambar 1. Kegiatan *Capacity Building* TP2DD

Dalam IETPD, terdapat aspek implementasi, aspek realisasi, dan aspek lingkungan strategis yang diantaranya mengukur dari ketersediaan kanal QRIS dalam pembayaran pajak dan retribusi serta jumlah penerimaan melalui kanal QRIS. Hingga triwulan IV 2022, penerimaan daerah melalui QRIS telah tersedia di 11 wilayah di Kalimantan Barat. Objek yang telah diimplementasikan QRIS diantaranya PBB, BPHTB, pajak restoran, serta retribusi daerah.

Sebagai upaya perluasan elektronifikasi sistem pembayaran menggunakan QRIS, pada agenda pelaksanaan *capacity building* TP2DD, pengisian serentak IETPD Semester II 2022 diiringi dengan agenda *launching* Implementasi QRIS Layanan SIM

dan SKCK di Wilayah Kepolisian Daerah (POLDA) Kalimantan Barat. Melalui kegiatan ini, layanan pembayaran SIM dan SKCK menggunakan kanal QRIS telah resmi tersedia di seluruh POLRES/ POLRESTA di wilayah Kalimantan Barat.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan sosialisasi dan edukasi digitalisasi sistem pembayaran kepada *stakeholder*, masyarakat, serta komunitas terkait untuk mendukung sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman dan handal sebagai basis pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dituangkan dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025).



Gambar 2. Pemetaan Pajak dan Retribusi menggunakan QRIS di Kalimantan Barat



Halaman ini sengaja dikosongkan



BAB VI KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT FEBRUARI 2023





Kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2022 berada pada angka 5,11%, membaik dibandingkan Agustus 2021 sebesar 5,82%. Sejalan dengan TPT, rasio kemiskinan juga mengalami perbaikan menjadi 6,81% pada September 2022, dibandingkan September 2021 yang tercatat sebesar 6,84%. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2022 mengalami peningkatan menjadi 142,73, dibandingkan triwulan III 2022 sebesar 136,05.



6.1. GAMBARAN UMUM

Kondisi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat berdasarkan perkembangan indikator ketenagakerjaan pada triwulan IV 2022 menunjukkan trend perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 5,11% pada Agustus 2022, membaik dibandingkan Agustus 2021 yang sebesar 5,82%. Salah satu faktor pendorong perbaikan TPT ini adalah kondisi pemulihan pasca Covid-19 yang kian membaik dan pelonggaran mobilitas yang mendorong produktivitas masyarakat. Pada Agustus 2022, sebanyak 44,63 ribu orang atau sekitar 1,14% penduduk usia kerja terdampak Covid-19. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2021 yang terdapat 216,06 ribu orang atau 5,61% penduduk usia kerja terdampak Covid-19. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menunjukkan peningkatan dari 68,45% pada Agustus 2021 menjadi 68,97% pada Agustus 2022.

Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan peningkatan pada triwulan IV 2022 dibandingkan triwulan III 2022, dan tetap berada di atas batas kesejahteraan. NTP pada periode laporan tercatat 142,73 meningkat dibandingkan triwulan III 2022 yang sebesar 136,05. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kemiskinan Kalimantan Barat yang tercermin dari rasio kemiskinan tercatat juga mengalami perbaikan menjadi 6,81% pada September 2022, dibandingkan September 2021 yang tercatat sebesar 6,84%.

6.2. KETENAGAKERJAAN KALIMANTAN BARAT

Kondisi ketenagakerjaan Kalimantan Barat menunjukkan tren positif sebagai hasil perbaikan kinerja perekonomian pada triwulan IV 2022. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022, terjadi penurunan jumlah penduduk pencari kerja sebesar 10,01% (yoy), dari yang sebelumnya berjumlah 153 ribu menjadi 138 ribu. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di wilayah Kalimantan Barat.

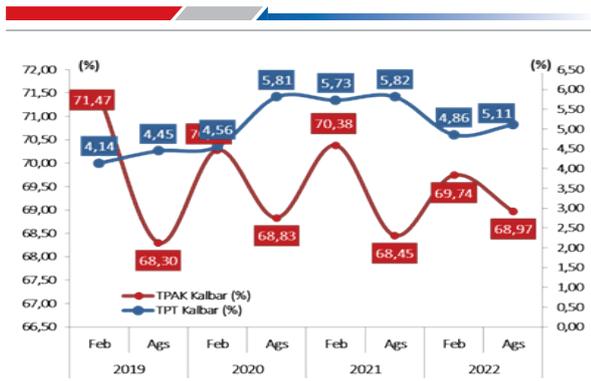
Berdasarkan usia kerja, jumlah penduduk dengan usia >15 tahun pada Agustus 2022 tercatat sebanyak 3,91 juta jiwa atau mengalami peningkatan 1,47% (yoy) dibandingkan dengan Agustus 2021. Jumlah penduduk bekerja juga mengalami peningkatan sebesar 3,00% (yoy) dari 2,48 juta jiwa menjadi 2,56 juta jiwa pada Agustus 2022. Sejalan dengan indikator ketenagakerjaan di atas, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 68,97%, dibandingkan dengan TPAK pada Agustus 2021 sebesar 68,45%.

Tren perbaikan lainnya juga ditunjukkan dari TPT, yang pada Agustus 2022 menjadi 5,11%, dari sebelumnya sebesar 5,82% pada Agustus 2021. Hal ini menandakan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja oleh lapangan usaha (LU) karena kondisi lapangan usaha semakin membaik setelah sempat terdampak pandemi Covid-19. Sebagian besar kontak *liaison* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat juga mengkonfirmasi tidak adanya pemutusan hubungan kerja pada tahun ini, namun sebaliknya terdapat penambahan tenaga kerja pada sektor usaha tertentu.

Tabel 6.1. Indikator Ketenagakerjaan (Ribu Jiwa)

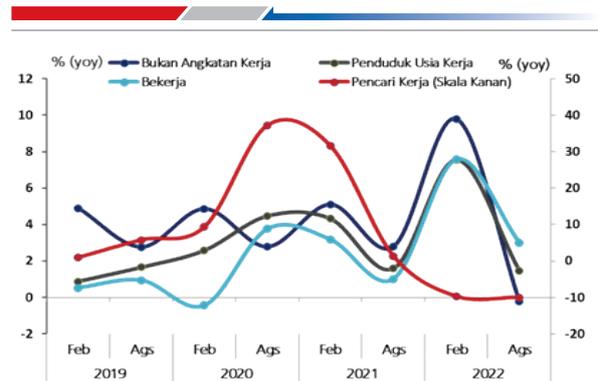
	2019		2020		2021		2022		Perubahan Ags '22 terhadap	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Ags'21 (%)	Feb'22 (%)
Jumlah Penduduk Usia Kerja	3,601	3,629	3,662	3,791	3,820	3,851	4,108	3,908	1.47	(4.88)
Angkatan Kerja	2,574	2,479	2,573	2,610	2,688	2,636	2,865	2,695	2.25	(5.93)
a. Bekerja	2,467	2,369	2,456	2,458	2,534	2,483	2,726	2,558	3.00	(6.18)
b. Pencari Kerja	107	110	117	151	154	153	139	138	(10.01)	(0.95)
Bukan Angkatan Kerja	1,027	1,150	1,077	1,182	1,132	1,215	1,243	1,212	(0.22)	(2.47)
TPAK Kalbar (%)	71.47	68.30	70.28	68.83	70.38	68.45	69.74	68.97	0.76	(1.10)
TPT Kalbar (%)	4.14	4.45	4.56	5.81	5.73	5.82	4.86	5.11	(12.20)	5.14

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah



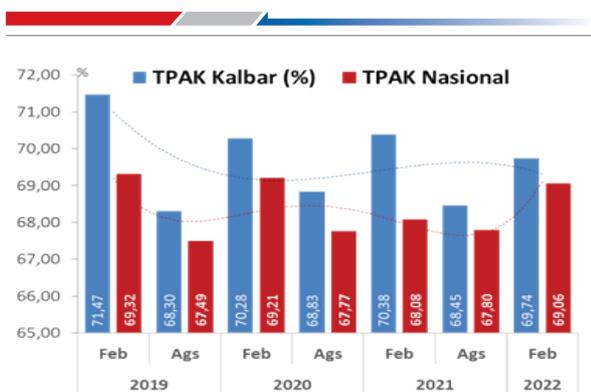
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



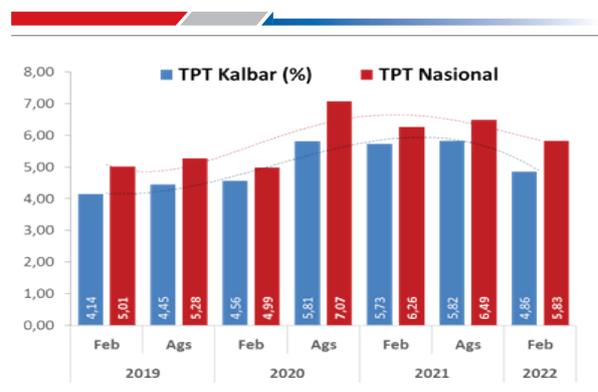
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.2. Tingkat Pertumbuhan Indikator Ketenagakerjaan



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.3. Perkembangan Tingkat Penyerapan Angkatan Kerja (TPAK) Kalimantan Barat dan Nasional



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.4. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat dan Nasional

Ditinjau dari sisi LU, sektor pertanian masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Barat pada Agustus 2022. Secara persentase, LU pertanian mampu menyerap 48,37% dari total tenaga kerja. LU berikutnya yang juga memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja adalah LU jasa (perdagangan, transportasi, lembaga keuangan, dan jasa lainnya) dan manufaktur (pertambangan, industri, listrik gas air, dan konstruksi) dengan persentase masing-masing sebesar 37,60% dan 14,03% dari total tenaga kerja di Kalimantan Barat.

Penyerapan tenaga kerja pada LU pertanian mengalami peningkatan sebesar 5,26% (yoy) pada Agustus 2022 atau sekitar 62 ribu jiwa. Peningkatan penyerapan pada LU pertanian disinyalir beberapa komoditas pertanian

dan perkebunan seperti kelapa sawit yang memasuki musim panen. Penyerapan tenaga kerja pada LU jasa mengalami peningkatan sebesar 6,92% (yoy), dari 900 ribu jiwa pada Agustus 2021 menjadi 962 ribu jiwa pada Agustus 2022. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja pada LU manufaktur mengalami penurunan 12,03% (yoy), dari 408 ribu jiwa pada Agustus 2021 menjadi 359 ribu jiwa pada Agustus 2022. Secara keseluruhan, kenaikan penyerapan tenaga kerja ini didukung oleh perbaikan kinerja beberapa sektor pada LU jasa yang sempat terdampak pandemi Covid-19, terutama perdagangan, transportasi, dan akomodasi, serta membaiknya kinerja sektor LU pertanian karena peningkatan konsumsi masyarakat dan ekspor yang lebih kuat.

Tabel 6.2. Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha (Ribu Jiwa)

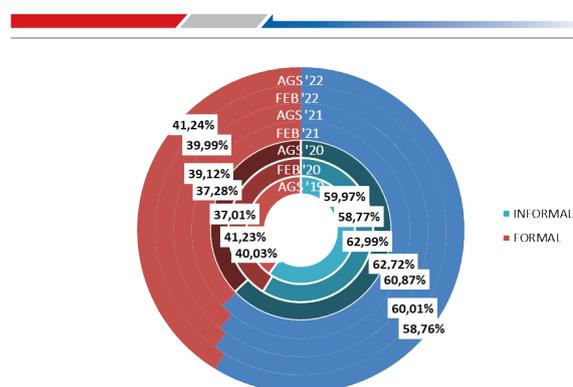
Lapangan Pekerjaan Utama	2019		2020		2021		2022		Ags '22 Terhadap Ags '21	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Growth	Indikator
Pertanian	1.223	1.156	1.135	1.211	1.189	1.175	1.225	1.237	5,26%	↑
Manufaktur*	307	361	337	381	391	408	436	359	-12,03%	↓
Jasa**	937	852	985	866	954	900	1.065	962	6,92%	↑

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

*) Lapangan usaha Manufaktur terdiri dari industri pengolahan, pertambangan, listrik, gas, air, dan konstruksi

**) Lapangan usaha Jasa terdiri dari perdagangan, transportasi, lembaga keuangan, dan jasa lainnya

Berdasarkan status pekerjaan utama, sebagian besar angkatan kerja di Kalimantan Barat masih bekerja di lapangan usaha informal¹⁰. Kondisi ini terlihat dari jumlah pekerja informal pada Agustus 2022 yang mencapai 1,50 juta jiwa, atau setara dengan 58,76% dari total penduduk bekerja. Sisanya, sebanyak 1,06 juta pekerja atau 41,24% bekerja di lapangan usaha formal. Pada Agustus 2022, jumlah pekerja pada klasifikasi status pekerjaan informal mengalami penurunan 0,55% (yoy), terutama didorong oleh jumlah pekerja bebas dan pekerja keluarga yang menurun masing-masing sebesar 15,01% (yoy) dan 11,55% (yoy). Sementara itu, kondisi jumlah pekerja pada status pekerjaan formal mengalami peningkatan sebesar 8,60% (yoy), yang didorong oleh peningkatan jumlah buruh/ karyawan/pegawai sebesar 9,34% (yoy).



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.5. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Formal dan Informal

Tabel 6.3. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Status Utama Pekerja (Ribu Jiwa)

STATUS PEKERJAAN	2019		2020		2021		2022		Perubahan Ags '22 thd	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb '21 (%)	Ags '22 (%)
INFORMAL	1.497	1.420	1.444	1.549	1.589	1.511	1.636	1.503	-0,55%	-8,12%
Berusaha sendiri	487	518	509	522	501	516	550	575	11,44%	4,58%
Berusaha dibantu buruh tdk tetap	437	388	415	425	465	399	493	407	1,99%	-17,52%
Pekerja Bebas	134	123	135	166	188	187	188	159	-15,01%	-15,41%
Pekerja Keluarga	439	391	385	436	435	409	404	362	-11,55%	-10,53%
FORMAL	970	948	1.013	910	945	971	1.090	1.055	8,60%	-3,23%
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	80	74	94	78	83	77	94	78	0,05%	-17,35%
Buruh/ karyawan/pegawai	890	874	919	832	862	893,88	996,35	977,41	9,34%	-1,90%

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

10. Status pekerjaan informal adalah pekerja yang memiliki status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian serta pekerja keluarga tidak dibayar.

Secara umum, serapan tenaga kerja di Kalimantan Barat mencerminkan adanya kesesuaian dengan struktur PDRB. Besarnya peranan LU pertanian dalam menyerap tenaga kerja sejalan dengan posisi LU tersebut sebagai LU dengan pangsa terbesar dalam PDRB. Sehubungan dengan itu, perlu adanya tambahan fokus dan perhatian serius jangka panjang dalam upaya meningkatkan kinerja LU pertanian beserta hilirisasi pertanian. Upaya jangka panjang ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan sebagian besar tenaga kerja, khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi di Kalimantan Barat.

6.3. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN

6.3.1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP juga mengukur daya tukar produk pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi. Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa semakin tinggi NTP semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan petani.

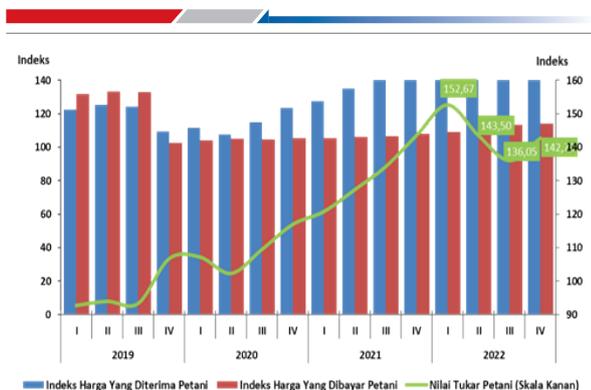
NTP Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan pada akhir triwulan IV 2022 dan tetap berada di atas batas sejahtera (100). NTP tercatat tumbuh 4,9% (qtq) dari 136,05 pada akhir triwulan III 2022 menjadi 142,73 pada akhir triwulan IV 2022. Peningkatan

NTP secara qtq pada triwulan IV 2022 dipengaruhi oleh peningkatan semua subsektor pertanian, yakni perkebunan rakyat (NTPR) sebesar 5,99%, hortikultura (NTPH) sebesar 5,33%, peternakan (NTPT) sebesar 1,80%, padi palawija (NTPP) sebesar 1,30% dan perikanan (NTPN) 0,16%.

Berdasarkan angka NTP pada masing-masing subsektor lapangan usaha pertanian, LU perkebunan rakyat berada pada posisi tertinggi, yaitu sebesar 170 kemudian diikuti oleh LU perikanan, hortikultura dan peternakan dengan masing-masing sebesar 102,95, 102,78 dan 102,10. Terdapat 1 subsektor LU pertanian yang angka NTP nya masih di bawah batas sejahtera (100) yaitu padi palawija sebesar 92,36.

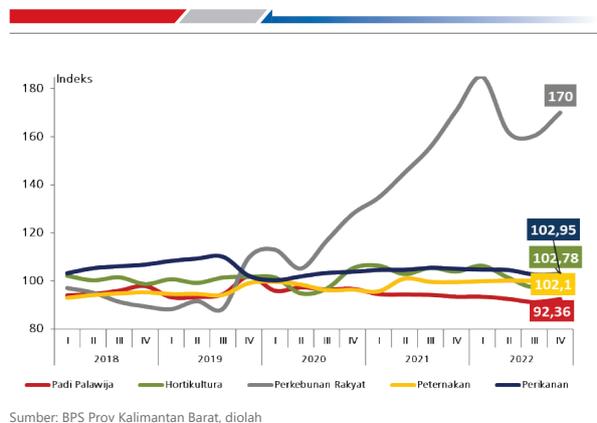
6.3.2. Perbandingan dengan NTP Provinsi Lain di Kalimantan

NTP Provinsi Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 merupakan yang tertinggi di regional Kalimantan. Peningkatan NTP yang terjadi di Kalimantan Barat juga terjadi di wilayah Kalimantan lain dan nasional. Faktor cuaca yang lebih stabil (tidak ada kemarau panjang) berpengaruh pada peningkatan produksi baik tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan menjadi faktor penyebab peningkatan NTP. NTP Kalimantan Barat sebesar 142,73 merupakan yang tertinggi di regional Kalimantan, disusul oleh Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah dengan nilai NTP sebesar 129,93 dan 117,09.



Sumber: BPS Prov Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.6. Perkembangan NTP Kalimantan Barat



Sumber: BPS Prov Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.7. Perkembangan NTP Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Klasifikasi Sublapangan Usaha

Tabel 6.4. Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Barat

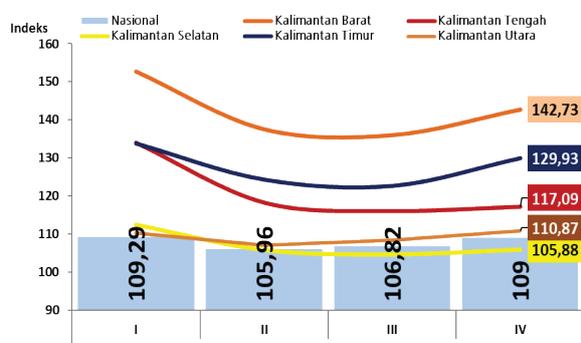
No	Uraian	2021			2022										Pertumbuhan (qtq)		
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt		Nov	Des
1.	Indeks Harga Yang Diterima Petani (It)	146.91	151.08	154.93	157.52	161.32	166.49	170.02	152.38	152.50	142.48	148.90	154.14	155.49	162.27	162.97	5.73%
1.1.	Padi Palawija	101.13	101.44	101.58	102.61	102.70	102.48	102.52	102.38	103.21	103.90	103.98	104.06	104.72	105.79	106.25	2.10%
1.2.	Hortikultura	113.06	108.46	112.27	114.55	117.64	115.97	113.19	110.21	112.46	112.98	109.49	110.92	113.55	113.76	117.68	6.09%
1.3.	Perkebunan Rakyat	171.45	178.25	183.97	187.46	193.24	201.48	207.04	179.53	179.16	163.01	173.37	181.25	182.85	193.01	193.61	6.82%
1.4.	Peternakan	107.19	106.08	106.69	108.14	107.64	107.96	109.79	109.56	110.43	111.48	110.31	112.58	113.86	113.79	115.36	2.47%
1.5.	Perikanan	112.18	111.94	112.19	111.07	111.08	112.31	112.86	113.45	113.91	104.45	104.35	116.37	116.55	116.57	117.60	1.06%
1.5.1.	Perikanan Tangkap	113.61	113.36	113.87	112.68	112.69	114.18	114.98	115.67	116.08	116.45	116.55	118.70	118.78	118.72	119.78	0.91%
1.5.2.	Perikanan Budidaya	105.85	105.67	104.72	103.94	103.93	107.12	107.97	103.63	104.35	104.43	104.45	106.05	106.65	107.09	107.98	1.82%
2.	Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib)	106.74	107.17	107.93	108.44	108.63	109.05	109.78	110.39	110.83	111.27	111.36	113.30	113.62	113.87	114.18	0.78%
2.1.	Padi Palawija	107.53	107.98	108.76	109.15	109.26	109.72	110.56	111.19	111.63	112.16	112.19	114.16	114.46	114.71	115.05	0.78%
2.2.	Hortikultura	106.97	107.32	108.01	108.49	108.59	109.02	109.84	110.45	110.91	111.36	111.57	113.68	113.95	114.20	114.50	0.72%
2.3.	Perkebunan Rakyat	106.48	106.88	107.64	108.29	108.53	108.95	109.61	110.20	110.65	111.06	111.16	113.00	113.32	113.56	113.88	0.78%
2.4.	Peternakan	106.37	106.53	107.12	107.51	107.48	107.97	109.02	109.72	110.16	110.44	110.52	112.25	112.84	112.98	112.98	0.65%
2.5.	Perikanan	105.94	106.18	106.65	106.92	107.00	107.19	108.02	108.62	108.85	109.36	109.55	113.21	113.55	114.09	114.24	0.91%
2.5.1.	Perikanan Tangkap	105.86	106.10	106.62	106.83	106.85	107.12	107.97	108.54	108.75	109.31	109.58	113.66	114.02	114.61	114.71	0.92%
2.5.2.	Perikanan Budidaya	106.31	106.56	106.77	107.34	107.63	107.47	108.27	108.97	109.24	109.58	109.46	111.20	111.48	111.79	112.12	0.83%
3.	Nilai Tukar Petani	137.63	141.01	143.61	145.26	148.51	152.67	154.87	138.05	137.59	128.04	133.71	136.05	136.85	133.87	142.73	4.91%
3.1.	Padi Palawija (NTPP)	94.05	93.94	93.40	94.00	94.00	93.39	92.73	92.07	92.46	92.64	92.68	91.15	91.49	92.23	92.36	1.33%
3.2.	Hortikultura (NTPH)	105.69	101.06	103.95	105.58	108.34	106.37	103.05	99.78	101.40	101.46	98.14	97.58	99.65	100.48	102.78	5.33%
3.3.	Perkebunan Rakyat (NTPR)	161.02	166.77	170.91	173.11	178.05	184.93	188.89	162.92	161.91	146.77	155.96	160.39	161.36	169.97	170.00	5.99%
3.4.	Peternakan (NTPT)	100.77	99.58	99.60	100.59	100.18	99.99	100.71	99.85	100.25	100.94	99.81	100.29	100.91	100.72	102.10	1.80%
3.5.	Perikanan (NTPN)	105.88	105.42	105.19	103.88	103.81	104.78	104.48	104.44	104.66	104.45	104.35	102.79	102.64	102.18	102.95	0.16%
3.5.1.	Perikanan Tangkap	107.32	106.85	106.80	105.48	105.47	106.59	106.49	106.57	106.73	106.53	106.37	104.43	104.18	103.59	104.41	-0.02%
3.5.2.	Perikanan Budidaya	99.57	99.16	98.08	96.83	96.55	96.82	95.59	95.10	95.52	95.30	95.42	95.37	95.67	95.79	96.31	0.99%

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Tabel 6.5. Perbandingan NTP dengan Provinsi Lain di Kalimantan dan Nasional

PROVINSI	2022				Pertumbuhan Tw IV 2022 (qtq)
	I	II	III	IV	
Kalimantan Barat	152.67	137.59	136.05	142.73	4.9%
Kalimantan Tengah	133.89	118.18	115.98	117.09	1.0%
Kalimantan Selatan	112.41	105.76	104.58	105.88	1.2%
Kalimantan Timur	133.81	124.28	122.61	129.93	6.0%
Kalimantan Utara	110.19	106.96	108.34	110.87	2.3%
Nasional	109.29	105.96	106.82	109	2.0%

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.8. Pergerakan NTP Antar Provinsi di Kalimantan

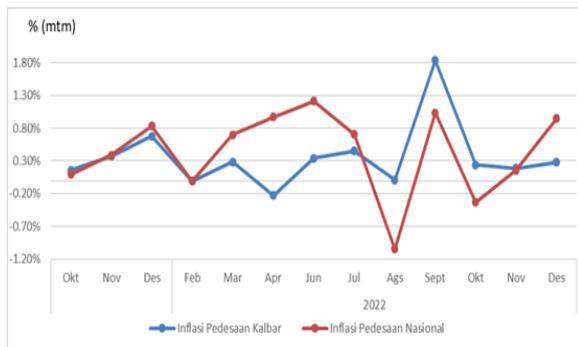
6.4. Inflasi Pedesaan

Indeks konsumsi rumah tangga (IKRT) di Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan pada triwulan IV 2022. Indeks IKRT tercatat sebesar 114,0 meningkat dari triwulan III 2022 yang sebesar 113,20. Sejalan dengan peningkatan IKRT, inflasi pedesaan Kalimantan Barat pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 0,28% (mtm) dan 0,71% (qtq).

Tabel 6.6. Perkembangan Inflasi Pedesaan

Uraian	2021			2022												mtm	qtq
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
Konsumsi Rumah Tangga	107,07	107,47	108,20	108,62	108,61	108,92	108,67	110,27	110,65	111,15	111,16	113,20	113,47	113,68	114,00	1,84%	2,30%
Indeks Biaya Produksi Dan Penambahan Barang Modal (BPPBM)	105,90	106,38	107,19	108,12	108,98	109,77	110,42	111,04	111,67	112,00	112,39	114,04	114,54	114,92	115,22	1,47%	2,12%

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

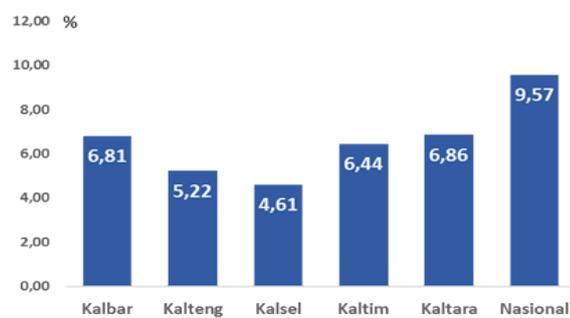


Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.9. Perbandingan Inflasi Pedesaan Kalimantan Barat dan Nasional (mtm)

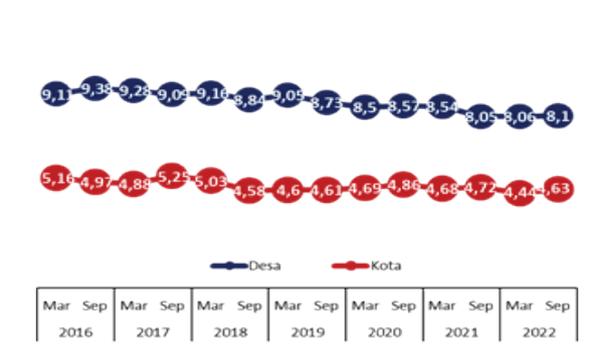
6.5. PROFIL KEMISKINAN DAN PEMERATAAN PENDUDUK KALIMANTAN BARAT

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat periode September 2022 tercatat sebesar 6,81%, menurun dibandingkan September 2022 sebesar 6,84%. Hal ini sejalan dengan persentase penduduk miskin secara nasional yang juga tercatat menurun



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.10. Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kalimantan dan Nasional



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.11. Perkembangan Presentase Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Barat

dari 9,71% pada September 2022 menjadi 9,57% pada Maret 2022. Penurunan tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat terjadi seiring dengan perekonomian yang tumbuh membaik pada triwulan IV 2022 dengan ADHK sebesar Rp38,01 triliun, tumbuh 5,01% (yoy). Namun demikian, persentase angka kemiskinan di Kalimantan Barat menempati posisi ke-2 secara regional setelah Provinsi Kalimantan Utara dengan persentase 6,86%.

Pada September 2022 terjadi penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat. Persentase penduduk miskin sebesar 6,81%, lebih rendah dari periode September 2021 sebesar 6,84%. Secara jumlah, penduduk miskin pada September 2022 tercatat 356,51 ribu jiwa, lebih tinggi dari September 2021 yang berjumlah 354 ribu jiwa. Proporsi penduduk miskin tersebut masih didominasi oleh penduduk daerah pedesaan dengan persentase 8,1% atau sebanyak 266,69 ribu jiwa. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,65% (yoy) dari periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebanyak 264,96 ribu penduduk miskin. Sementara itu, jumlah penduduk

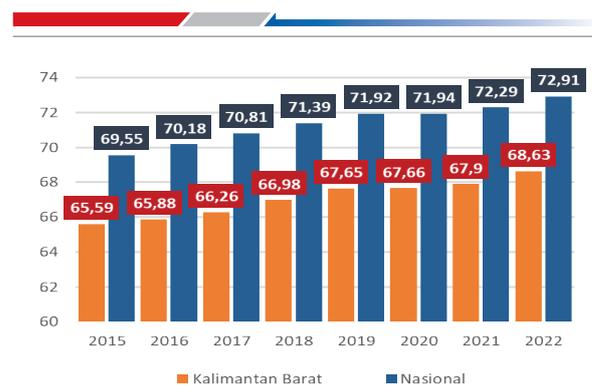
miskin di perkotaan tercatat berjumlah 89,81 ribu jiwa atau secara persentase sebesar 4,63%. Sejalan dengan kondisi pedesaan, jumlah penduduk miskin di perkotaan juga menunjukkan peningkatan sebesar 0,86% (yoy) dari 89,04 ribu penduduk miskin pada September 2021 menjadi 89,81 ribu penduduk miskin pada September 2022.

6.6. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA¹¹

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan. IPM meningkat sebesar 1,08% (yoy) pada tahun 2022 menjadi 68,63 dari 67,90 pada tahun 2021. Status IPM Provinsi Kalimantan Barat tersebut berada dalam kategori sedang dengan rentang nilai IPM 60-70. Sementara itu, IPM nasional telah mencapai 72,91 pada tahun 2022 atau berada pada kategori tinggi dengan rentang nilai IPM 70-80.

Peningkatan IPM Provinsi Kalimantan Barat sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat setiap tahunnya. IPM diukur berdasarkan beberapa dimensi, diantaranya umur harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Oleh karena itu, upaya untuk mempercepat peningkatan IPM terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sinergi dengan berbagai pihak terkait. Salah satunya dengan upaya melakukan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) pendidikan inklusif untuk melaksanakan penguatan pada pembangunan unit sekolah baru dengan fokus penambahan ruang kelas, khususnya untuk SMA dan SMK, sekaligus mendorong masyarakat putus sekolah untuk melanjutkan mengikuti paket C, dan juga mewujudkan pendidikan merata khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.

11. Nilai IPM yang digunakan merupakan angka IPM dengan menggunakan metode perhitungan IPM Tahun 2014. Terdapat penggantian komponen tahun dasar PNB Per Kapita dari tahun 2005 ke 2011. Metode agregasi indeks menggunakan rata-rata ukur (geometrik).



Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Grafik 6.12. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat dan Nasional

Selama tahun 2022, seluruh provinsi di regional Kalimantan menunjukkan peningkatan angka IPM. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan, IPM Kalimantan Barat merupakan yang terendah. Provinsi lain di wilayah Kalimantan sudah berada pada kategori IPM tinggi dimana Kalimantan Timur menempati posisi tertinggi yaitu dengan IPM di angka 77,44. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama dari pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat untuk terus berupaya melakukan peningkatan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Seluruh komponen IPM mengalami peningkatan di tahun 2021. Pengeluaran per kapita meningkat dari Rp8.974.000 pada tahun 2021 menjadi Rp9.355.000 pada tahun 2022. Sementara itu, dimensi pengetahuan yang dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami kenaikan dalam skala yang relatif terbatas. Pada tahun 2022, HLS di Kalimantan Barat adalah sebesar 12,66 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk berada pada jenjang pendidikan formal hingga 12,65 tahun atau hingga lulus SMA/ SMK. Sejalan dengan peningkatan pada HLS, RLS di wilayah Kalimantan Barat juga menunjukkan peningkatan dari 7,45 tahun pada 2021 menjadi 7,59 tahun pada 2022. Berdasarkan indikator tersebut, diketahui bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga SMP kelas I.

Tabel 6.7. IPM Provinsi wilayah Kalimantan 2015-2022

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kalimantan Barat	65,59	65,88	66,26	66,98	67,65	67,66	67,9	68,63
Kalimantan Tengah	68,53	69,13	69,79	70,42	70,91	71,05	71,25	71,63
Kalimantan Selatan	68,38	69,05	69,65	70,17	70,72	70,91	71,28	71,84
Kalimantan Timur	74,17	74,59	75,12	75,83	76,61	76,24	76,88	77,44
Kalimantan Utara	68,76	69,2	69,84	70,56	71,15	70,63	71,19	71,83
Nasional	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Tabel 6.8. Perkembangan IPM Kalimantan Barat berdasarkan Komponennya

Komponen	Satuan	Indeks Pembangunan Manusia							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69,87	69,90	69,92	70,18	70,56	70,69	70,76	71,02
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,25	12,37	12,50	12,55	12,58	12,60	12,65	12,66
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,93	6,98	7,05	7,12	7,31	7,37	7,45	7,59
Pengeluaran Perkapita Pertahun	Rp 000	8.279	8.348	8.472	8.860	9.055	8.930	8.974	9.355
IPM		65,59	65,88	66,26	66,98	67,65	67,66	67,90	68,63

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah

Saat ini tercatat dua wilayah dengan status pembangunan manusia tinggi, yaitu Kota Pontianak dan Kota Singkawang dengan nilai IPM masing-masing sebesar 80,84 dan 72,89. Pencapaian status IPM tersebut didorong oleh komitmen pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan, penyediaan dan perluasan peluang lapangan pekerjaan, peningkatan program dan infrastruktur kesehatan maupun rekreasi yang kian lengkap dan memadai. Sementara itu, status IPM di dua belas wilayah lainnya masih termasuk dalam klasifikasi sedang. Keseluruhan data ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah harus lebih fokus dalam melakukan koordinasi, memberikan perhatian, dan menjalankan komitmen dalam peningkatan IPM agar semakin merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Tabel 6.9. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

	2018	2019	2020	2021	2022
KALIMANTAN BARAT	66,98	67,65	67,66	67,9	68,63
Sambas	66,61	67,02	67,03	67,1	67,95
Bengkayang	66,85	67,57	67,87	68,04	68,74
Landak	65,45	65,96	65,98	66,21	67,17
Mempawah	64,90	65,50	65,74	66,03	66,94
Sanggau	65,15	65,67	65,77	66,2	66,91
Ketapang	66,41	67,16	67,17	67,43	67,92
Sintang	66,07	66,70	66,88	66,93	67,86
Kapuas Hulu	65,03	65,65	65,69	65,75	66,7
Sekadau	63,69	64,34	64,76	64,93	65,58
Melawi	65,05	65,54	65,66	65,87	66,81
Kayong Utara	61,82	62,66	62,68	62,9	63,81
Kubu Raya	67,23	67,76	67,95	68,16	68,91
Kota Pontianak	78,56	79,35	79,44	79,93	80,48
Kota Singkawang	71,08	71,72	71,94	72,11	72,84

Sumber: BPS Prov. Kalbar, diolah

BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT FEBRUARI 2023





Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan I 2023 diperkirakan melanjutkan pertumbuhan positif. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan I 2023 diperkirakan bersumber dari LU perdagangan, transportasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Selain itu, LU pertanian dan industri pengolahan yang selama ini menjadi penopang perekonomian diperkirakan akan kembali memberikan kontribusi pada kinerja ekonomi pada triwulan I 2023. Pada sisi pengeluaran, kinerja konsumsi rumah tangga diperkirakan menjadi sumber perekonomian triwulan I 2023. Hal ini sejalan dengan peningkatan mobilitas dan konsumsi masyarakat pada masa perayaan hari besar keagamaan dan nasional (HBKN) Imlek, Cap Go Meh, dan Ramadhan.

Perekonomian Kalimantan Barat secara keseluruhan tahun 2023 diperkirakan tumbuh positif dari tahun 2022. Kinerja lapangan usaha utama dan tingkat konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih tumbuh menjadi faktor pendorong perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2023.



7.1. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA

Kinerja perekonomian global diperkirakan akan menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun masih tumbuh positif. Kenaikan suku bunga bank sentral untuk meredam inflasi dan isu geopolitik antara Rusia dan Ukraina akan menjadi poin kritis bagi ekonomi global sepanjang tahun 2023. Di samping itu, peningkatan kembali kasus Covid-19 di Tiongkok di akhir tahun 2022 semakin membebani aktivitas ekonomi global saat ini. Pertumbuhan global diproyeksikan turun dari 3,4% (yoy) di tahun 2022 menjadi 2,9% (yoy) di tahun 2023 kemudian meningkat secara bertahap sebesar 3,1% (yoy) di tahun 2024.

Walaupun terdapat tantangan di awal tahun 2023, kinerja ekonomi terpantau tetap kuat di triwulan III 2022 terutama disumbang dari negara-negara maju seperti Amerika dan negara Eropa. Penguatan ini berasal dari permintaan domestik seperti konsumsi swasta dan investasi untuk merealisasikan rencana ekspansi yang sempat tertunda. Belanja rumah tangga terus didorong untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi. Prakiraan penurunan biaya transportasi seiring dengan ketersediaan energi yang memadai mengurangi tekanan pada kinerja harga komoditas.

Di sisi lain, kinerja ekonomi Tiongkok perlu menjadi perhatian bersama. Penyebaran Covid-19 yang *massive* memperdalam perlambatan ekonomi Tiongkok. Aktivitas ekonomi di Tiongkok melambat pada triwulan IV 2022 seiring dengan kebijakan *lockdown* terbaru, walaupun kebijakan pelonggaran *lockdown* telah diterapkan pada November dan Desember. Pemerintah Tiongkok menanggapi perlambatan

tersebut dengan menerapkan pelonggaran kebijakan moneter dan fiskal tambahan sehingga dapat meredam sentimen negatif dari pelaku usaha. Perlambatan ekonomi Tiongkok berdampak pada terbatasnya pertumbuhan perdagangan global dan harga komoditas internasional.

Prospek kinerja ekonomi global diperkirakan bias ke sisi bawah, dengan cakupan pertumbuhan yang lebih rendah dan inflasi yang lebih tinggi. Namun demikian, dampak negatif terparah mulai mereda sejak Oktober 2022. Prakiraan *upside risk* yang akan mendorong kinerja ekonomi antara lain:

- Peningkatan permintaan yang tidak direncanakan yang disebabkan oleh tabungan swasta/masyarakat yang tinggi sebagai dampak dari kebijakan fiskal di saat pandemi dan kenaikan upah pekerja yang baik mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi lebih khususnya konsumsi jasa dan pariwisata. Namun dorongan permintaan yang kuat ini dapat memicu kenaikan pada inflasi inti yang pada akhirnya dapat berdampak pada penerapan kebijakan moneter yang lebih ketat.
- Pelonggaran tekanan di pasar tenaga kerja akibat rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga dapat meredam inflasi akibat kenaikan upah pekerja. Hal ini tentunya akan meredam konsumsi masyarakat yang berlebih sehingga akan menurunkan harga barang secara bertahap.

Sementara itu, banyak hal yang dapat menjadi *downside risk* terhadap prospek ekonomi global dan meningkatkan inflasi lebih lanjut yaitu:

- Pemulihan ekonomi Tiongkok terhenti: Di tengah tingkat kekebalan masyarakat terhadap Covid-19 yang masih rendah dan kapasitas rumah sakit yang tidak memadai akan berdampak pada faktor kesehatan yang dapat menghambat pemulihan secara signifikan.
- Perang di Ukraina meningkat: Eskalasi perang di Ukraina tetap menjadi sumber utama kerentanan, terutama untuk Eropa dan negara-negara berpenghasilan rendah. Risiko kenaikan harga energi cukup besar di tengah kebutuhan negara-negara Eropa menghadapi musim dingin di

Tabel 7.1. *Global Economic Outlook*

Wilayah	2022	2023	2024
World	3,4	2,9	3,1
US	2,0	1,4	1,0
Euro Area	3,5	0,7	1,6
Japan	1,4	1,8	0,9
Tiongkok	3,0	5,2	4,5
India	6,8	6,1	6,8

Sumber: World Economic Outlook

tahun ini dan kemungkinan adanya peningkatan permintaan energi dari Tiongkok. Selain itu, gagalnya kesepakatan pengiriman biji-bijian dari laut hitam akan memberikan tekanan inflasi pada harga pangan terutama untuk negara – negara berkembang.

- Inflasi yang persisten: Kenaikan upah, harga minyak, gas, makanan yang lebih tinggi dari perkiraan, dapat meningkatkan inflasi lebih tinggi lagi.
- Fragmentasi geopolitik: Perang di Ukraina dan sanksi internasional yang ditujukan untuk menekan Rusia agar mengakhiri perang, berisiko memecah ekonomi dunia menjadi blok-blok dan semakin memperkuat ketegangan geopolitik sebelumnya, seperti yang terjadi pada perdagangan AS-China.

7.2. PROSPEK EKONOMI TRIWULAN I 2023 DAN TAHUN 2023

Pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan I 2023 diperkirakan masih melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan positif tersebut antara lain didorong oleh peningkatan mobilitas dan konsumsi masyarakat dari Provinsi Kalimantan Barat maupun luar provinsi pada masa perayaan Imlek dan Cap Go Meh yang meriah setelah 2 tahun tidak diselenggarakan (khususnya di Pontianak dan Singkawang). *Magnitude* dampak kenaikan harga BBM September 2022 terhadap perlambatan konsumsi diperkirakan akan mereda secara bertahap pada triwulan I 2023. Pemanfaatan *open border* Kalimantan Barat-Serawak yang lebih luas dan pencabutan PPKM pada akhir tahun 2022 turut mendorong mobilitas dan konsumsi.

Dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi positif pada triwulan I 2023 antara lain diperkirakan bersumber dari LU perdagangan, transportasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini sejalan dengan peningkatan kegiatan konsumsi maupun mobilitas masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dan luar provinsi dalam rangka merayakan Imlek dan Cap Go Meh, serta menyambut Ramadhan. LU pertanian dan industri pengolahan yang selama ini menjadi

penopang perekonomian diperkirakan akan kembali mendorong kinerja ekonomi pada triwulan I 2023. Hal ini didorong oleh beberapa faktor antara lain (1) produksi TBS yang melanjutkan tren pertumbuhan di tengah kondisi cuaca yang kondusif, meskipun sedikit melambat akibat siklus tahunan, (2) perkiraan siklus panen padi pada triwulan I, (3) utilisasi pabrik CPO yang terjaga di tengah ketersediaan bahan baku, serta (4) industri pengolahan *Smelter Grade Alumina* (SGA) yang beroperasi dengan kapasitas optimal.

Pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat triwulan I 2023 yang lebih tinggi diperkirakan berpotensi tertahan oleh produksi bahan baku dan olahan karet yang melanjutkan tren kontraksi di tengah penurunan produktivitas karet alam dan alih lahan ke komoditas lainnya. Izin tambang bauksit yang masih ditangguhkan dan keterbatasan sisa kuota ekspor bauksit mentah, turut berisiko menahan pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat yang lebih tinggi pada triwulan I.

Sejalan dengan perkiraan perekonomian triwulan I 2023, perekonomian Kalimantan Barat tahun 2023 diperkirakan tumbuh positif, walapun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Kinerja lapangan usaha utama dan tingkat konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih tumbuh menjadi faktor pendorong perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2023. Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan LU perdagangan, transportasi, dan akomodasi makan minum diperkirakan akan mendorong pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat tahun 2023. Hal ini antara lain didorong oleh konsumsi dan mobilitas masyarakat yang persisten, di tengah pencabutan PPKM dan *festive seasons* yang lebih meriah. Selain itu, LU pertanian, industri pengolahan, serta konstruksi diperkirakan akan tumbuh dan mendorong pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat tahun 2023. Hal ini sejalan dengan tingkat produksi di LU pertanian dan industri pengolahan yang diperkirakan masih tumbuh dan terjaga, terutama komoditas TBS, CPO, dan alumina. Sedangkan, LU konstruksi diperkirakan tumbuh sejalan dengan keberlanjutan konstruksi proyek-proyek pemerintah dan swasta *mutiyears*. Di sisi lain, pertumbuhan yang lebih

tinggi pada sisi LU berisiko tertahan oleh potensi risiko kemarau panjang di triwulan II dan triwulan III 2023 serta potensi risiko banjir pada triwulan IV 2023. Fenomena ini dapat mengganggu produktivitas dan proses panen komoditas pertanian seperti TBS. Keterbatasan kuota ekspor bauksit mentah semester I 2023 dan moratorium ekspor bauksit pada semester II 2023 diperkirakan turut menahan pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat 2023.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga (RT) diperkirakan tumbuh positif pada tahun 2022. Peningkatan kinerja konsumsi RT sejalan dengan penurunan dampak pandemi Covid-19 di tengah kebijakan restriksi yang semakin longgar. Hal ini kemudian mendorong peningkatan konsumsi dan mobilitas masyarakat yang lebih tinggi pada hari besar keagamaan dan nasional (HBKN). Fenomena peningkatan konsumsi ini telah terlihat pada perayaan HBKN Imlek dan Cap Go Meh periode 22 Januari sampai dengan 5 Februari 2023. Aneka bentuk perayaan dan festival sepanjang Imlek dan Cap Go Meh menjadi daya tarik utama pariwisata (mobilitas) dan pendorong konsumsi berbagai kalangan masyarakat. Namun demikian, risiko penurunan ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan perekonomian daerah, diperkirakan dapat menahan pertumbuhan konsumsi RT yang lebih tinggi. Ekspektasi masyarakat ini turut diwarnai oleh faktor ketidakpastian perekonomian global.

Kinerja investasi diperkirakan tumbuh positif pada tahun 2023. Hal tersebut didorong kelanjutan realisasi investasi terutama pada investasi proyek-proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Kalimantan Barat. Wacana percepatan PSN *refinery* alumina PT. BAI pada tahun 2023 menjadi salah satu faktor pendorong investasi. Wacana pembangunan infrastruktur pendukung Pelabuhan Kijing dan keberlangsungan pembangunan Kawasan Industri Ketapang (KIK) juga menjadi faktor pendorong kinerja investasi. Potensi peningkatan permintaan CPO dari Tiongkok sejalan dengan pelonggaran *zero covid policy*, dapat menjadi insentif bagi pelaku usaha industri pengolahan dan pertanian untuk melakukan investasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja investasi ke depan, diperlukan

dorongan dan upaya realisasi investasi beberapa *refinery* alumina yang telah terdaftar. Hal tersebut diharapkan turut meningkatkan serapan bauksit lokal Kalimantan Barat, mengingat pelarangan ekspor bauksit mentah yang akan diterapkan pada Juni 2023.

Ekspor pada tahun 2023 diperkirakan melambat. Hal ini antara lain sejalan dengan prakiraan keterbatasan kuota ekspor bauksit mentah semester I 2023 dan moratorium ekspor bauksit pada semester II 2023. Kinerja ekspor produk olahan karet diperkirakan masih tertahan pada tahun 2023, sejalan dengan keterbatasan bahan baku karet alam yang berlanjut. Di sisi lain, *zero covid policy* yang ditiadakan berpotensi meningkatkan permintaan Tiongkok terhadap komoditas Kalimantan Barat khususnya *Crude Palm Oil* (CPO). Volume ekspor alumina yang terjaga turut menahan perlambatan kinerja ekspor tahun 2023. Hal ini sejalan dengan *refinery* alumina di Ketapang yang beroperasi optimal.

Impor diperkirakan tumbuh positif pada tahun 2023 seiring dengan kebutuhan barang bahan baku dan barang modal. Hal ini antara lain didorong oleh kebutuhan akan bahan baku pencucian bauksit (soda api) pada proses produksi alumina. Selain itu, turut didorong oleh kebutuhan impor barang modal seiring dengan investasi pelaku usaha dan proyek *multiyears* yang berlanjut.

Terkait prospek ekonomi Kalimantan Barat tahun 2023 tersebut, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, antara lain:

1. Pemulihan ekonomi dunia yang terhambat akibat percepatan normalisasi kebijakan moneter dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang disertai pengenaan berbagai sanksi.
2. Penurunan harga dan permintaan komoditas ekspor utama Kalimantan Barat akibat peningkatan pasokan komoditas global, pemulihan produksi substitusi, dan perlambatan aktivitas perekonomian negara tujuan utama ekspor.
3. Terhambatnya pembangunan berbagai proyek infrastruktur Kalimantan Barat.

4. Realisasi investasi Program Strategis Nasional (PSN) dan pelaku usaha yang terhambat.
5. Realisasi belanja pemerintah daerah dan pusat yang terhambat.
6. Anomali cuaca dan bencana alam (kebakaran hutan/lahan, kemarau panjang dan banjir) yang dapat berdampak pada produksi tanaman pangan dan perkebunan.
7. Terhambatnya aktivitas pemupukan seiring dengan harga pupuk anorganik yang relatif tinggi pada semester II 2022.
8. Penurunan ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terhadap perbaikan perekonomian masa mendatang yang berisiko menahan aktivitas konsumsi dan investasi.

7.3. PRAKIRAAN INFLASI DAERAH TRIWULAN I 2023 DAN TAHUN 2023

Tekanan Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan I 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan penurunan harga BBM non-subsidi sejak Januari 2023 di tengah peningkatan konsumsi masyarakat pasca pencabutan PPKM pada akhir Desember lalu. *Scarring effect* akibat kenaikan harga BBM September tahun lalu yang memantik kenaikan harga sektor transportasi dan sektor terkait lainnya diperkirakan sedikit mereda pada triwulan I 2023. Hal ini sejalan dengan kebijakan penurunan harga BBM non-subsidi oleh pemerintah sebagai respon atas penurunan harga minyak dunia. Hal ini kemudian juga berdampak pada penurunan tarif transportasi angkutan antar kota, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Sebagai Informasi, bensin merupakan komoditas yang berkontribusi signifikan dalam menentukan dinamika inflasi di Kalimantan Barat dengan pangsa terbesar yaitu sekitar 4,5% dari total nilai konsumsi di 3 (tiga) kota gabungan sample inflasi. Dengan demikian perkembangan harga bensin akan mempengaruhi dinamika inflasi.

Perkiraan inflasi yang lebih rendah tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan inflasi kelompok makanan dan minuman yang lebih moderat. Musim panen di beberapa sentra produksi komoditas hortikultura baik di Kalimantan Barat maupun di luar Kalimantan Barat diprediksi menjadi faktor penahan kenaikan harga komoditas makanan dan minuman. Berbagai dukungan fiskal berupa pelaksanaan operasi pasar, Gelar Pangan Murah (GPM), dan bansos dalam bentuk sembako yang dijalankan secara konsisten oleh TPID Kalimantan Barat ditengarai akan menahan laju inflasi Kalimantan Barat.

Namun demikian, potensi peningkatan inflasi ke depan tetap perlu diwaspadai khususnya di sektor makanan, minuman, dan tembakau. Potensi kenaikan inflasi antara lain dipengaruhi oleh perayaan Imlek dan Cah Go Meh yang lebih meriah dan masif pasca pencabutan PPKM akhir tahun lalu. Kalimantan Barat, khususnya Singkawang dan Pontianak, merupakan destinasi nasional utama bagi etnis Tionghoa dalam festival perayaan Cap Go Meh yang telah dimulai sejak 1 (satu) hari pasca Imlek hingga puncaknya tanggal 5 Februari 2023. Hal ini menyebabkan kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara meningkat pesat pada periode ini. Selain itu, perayaan bulan suci Ramadhan pada bulan Maret juga akan memberikan tekanan harga akibat peningkatan konsumsi. Curah hujan tinggi yang berpotensi menyebabkan banjir serta kenaikan cukai rokok sejak Januari 2023 juga menjadi perhatian utama dalam realisasi inflasi di sektor makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan laporan. Lebih lanjut, terdapat potensi kenaikan harga komoditas beras dan minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng terjadi akibat kelangkaan persediaan minyak goreng curah dengan merk "Minyakita" di Kalimantan Barat. Adapun potensi kenaikan harga beras dipengaruhi oleh rencana pemerintah yang akan menaikkan *ceiling price* harga gabah dan beras per 27 Februari 2023.

Sejalan dengan potensi inflasi di sektor makanan, minuman, dan tembakau, sinyal inflasi terkait transportasi dan bahan bakar rumah tangga juga perlu diwaspadai. Peningkatan harga tiket pesawat

udara pada seluruh maskapai juga berkontribusi pada inflasi sektor transportasi akibat kenaikan *demand* di periode Imlek dan Cap Go Meh. Selanjutnya, terdapat potensi kenaikan harga sepeda motor. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan pada periode perayaan Imlek dan Cap Go Meh dan juga peningkatan dari sisi *supply* akibat banyaknya program promo untuk pembelian unit kendaraan bermotor di Kalimantan Barat. Di sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kenaikan harga komoditas LPG global, mendorong kenaikan harga LPG nonsubsidi (12 kg) di tingkat pengecer. Permasalahan terkait mekanisme distribusi gas juga masih menjadi tantangan dan berpengaruh dalam dinamika pembentukan harga gas LPG nonsubsidi di Kalimantan Barat.

Dinamika inflasi pada triwulan I 2023 juga diperkirakan didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga tukang bukan mandor dan emas perhiasan. Inflasi tukang bukan mandor disebabkan banyaknya *event* lomba hias rumah dan jalanan dalam rangka imlek dan Cap Go Meh. Sementara kenaikan harga emas perhiasan didorong oleh peningkatan *demand* di tengah perayaan HBKN yang lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan harga emas perhiasan di Kalimantan Barat juga didorong oleh peningkatan harga emas di tingkat global seiring kebijakan pencabutan *zero covid policy* Tiongkok yang dinilai mendorong tingkat pembelian emas.

Sejalan dengan perkiraan inflasi pada triwulan I 2023, inflasi Kalimantan Barat secara keseluruhan tahun 2023 juga diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Moderasi tersebut antara lain didorong oleh penurunan daya beli masyarakat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin menantang di 2023. Kebijakan penurunan harga BBM non-subsidi di awal tahun 2023 oleh pemerintah sebagai respon atas penurunan harga minyak dunia, juga turut mendukung moderasi tersebut. Namun demikian, faktor-faktor pendorong inflasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya perlu terus diwaspadai. Beberapa risiko yang dapat berpengaruh

terhadap pergerakan inflasi selama keseluruhan tahun 2023, antara lain kelancaran produksi dan distribusi bapokting, anomali cuaca dan bencana banjir, laju kenaikan harga komoditas, serta HBKN dan *festive season* yang dilaksanakan secara lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya diperkirakan dapat mempengaruhi realisasi inflasi tahun 2023.

Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan terkait pengendalian inflasi. Bank Indonesia tetap konsisten dengan *stance* kebijakan moneter *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Merujuk Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Februari 2023, Bank Indonesia mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75% untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran $3,0 \pm 1\%$ pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran $3,0 \pm 1\%$ pada semester II 2023. Selain itu, Bank Indonesia juga akan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat kuatnya mata uang dolar AS dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat.

7.4. REKOMENDASI

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pengendalian inflasi yang stabil, maka dibutuhkan koordinasi, sinergi, dan partisipasi aktif langsung dari seluruh elemen yang terlibat dalam menghadapi dan mengantisipasi risiko yang berpotensi memperlambat ekonomi. Untuk itu, dalam upaya mewujudkan Perekonomian Kalimantan Barat yang kuat, maka hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. **Mempercepat realisasi APBD dan stimulus fiskal** secara tepat waktu dan tepat sasaran, terutama dana bansos, untuk menggerakkan perekonomian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara cepat pasca pandemi berakhir.

2. **Mempercepat proses pengadaan proyek-proyek strategis** di awal tahun.
3. **Untuk memperkuat fundamental ekonomi, mengoptimalkan pemberdayaan UMKM** melalui penciptaan permintaan oleh Pemerintah Daerah melalui himbauan kepala daerah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), instansi dan perbankan di daerah untuk menggunakan produk-produk lokal/UMKM, baik kerajinan (kain, batik atau tenun) dan makanan yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK).
4. **Mendorong pemanfaatan teknologi digital** dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan membantu pelaku usaha, terutama UMKM, dalam mendapatkan akses pasar yang lebih luas, termasuk untuk mendukung stabilisasi harga.
5. **Mendorong Penggunaan Transaksi Elektronik** melalui alat pembayaran yang aman, efisien dan dapat dipercaya. Bank Indonesia menghimbau agar masyarakat dapat membiasakan menggunakan metode transaksi *cashless*/elektronik, baik melalui transfer, uang elektronik maupun QRIS (*QR code Indonesian Standard*) sehingga lebih efisien, mudah untuk dikelola, dan mengurangi penggunaan uang kertas di masyarakat. Di samping itu, akselerasi program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) perlu untuk terus didorong sehingga dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), *governance*, serta efisiensi dan efektivitas transaksi pemerintah daerah.
6. **Mendorong diversifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lainnya** yang memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal, terutama yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan dan *zero waste*.

Sementara itu, upaya dalam melakukan **Pengendalian Inflasi Daerah**, selain terus mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan bekerja sama dengan *stakeholder* terkait, juga berupaya terus meningkatkan peran TPID baik Provinsi maupun Kota/Kabupaten melalui

4K (Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga dan Komunikasi Efektif) yang secara rinci antara lain:

1. Ketersediaan Pasokan

- Melakukan **pemantauan perkembangan ketersediaan pasokan pangan** secara rutin, baik ditingkat produsen maupun distributor.
- Melakukan **identifikasi surplus/defisit ketersediaan pasokan pangan di sentra produksi** melalui penguatan koordinasi antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat
- **Mengawal/menjaga potensi pasokan pangan baru (panen)** kedepan dan yang tengah dalam proses produksi di Provinsi Kalimantan Barat.
- **Mengidentifikasi dan membuat alternatif sumber pasokan pangan dari luar Provinsi Kalimantan Barat** apabila terjadi gangguan pasokan dari daerah produsen melalui kerja sama antar daerah.
- **Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bulog Divre Kalimantan Barat** dalam hal ketersediaan/stok beras cadangan pemerintah.
- Memperkuat dan memperluas implementasi "Pasar Tani".
- **Memfasilitasi interaksi antara petani/pedagang yang mempunyai produksi/stok surplus dengan market/konsumen yang membutuhkan** baik intra maupun dengan daerah di luar Kalimantan Barat.
- Integrasi program pengendalian inflasi dari hulu-hilir seperti **peningkatan produksi melalui penggunaan teknologi**.
- **Pengembangan sistem penyimpanan komoditas makanan dan minuman untuk menjaga pasokan dan kestabilan harga**.

2. Kelancaran Distribusi

- **Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar dan lintas wilayah** terkait dengan kelancaran akses distribusi barang (terutama bahan pangan) melalui dinas teknis.

- **Memberikan kelonggaran moda transportasi yang mengangkut bahan pangan** melalui koordinasi dinas teknis lintas daerah untuk memastikan kelancaran akses distribusi barang.
- Perbaiki tata niaga dan distribusi logistik.

3. Keterjangkauan Harga

- **Menyelenggarakan pasar murni/pasar penyeimbang pada momen-momen tertentu** yang secara historis harga komoditas mengalami kenaikan dengan fokus komoditas pangan strategis. Penyelenggaraan pasar murni tersebut bertujuan sebagai penyeimbang harga komoditas di pasar yang dihitung oleh BPS.
- **Melakukan koordinasi dengan TPID dan satgas pangan dalam rangka mencegah upaya penimbunan maupun anomali harga komoditas strategis**

4. Komunikasi Efektif

- **Senantiasa melakukan pengkinian informasi harga dan stok komoditas pangan strategis yang selanjutnya dituangkan dalam website resmi pemerintah daerah**
- **Secara berkala melakukan komunikasi kebijakan** untuk memberikan jaminan dan kepastian kepada masyarakat terhadap ketersediaan pasokan, baik komoditas pangan maupun komoditas lainnya sehingga inflasi terkendali.
- **Himbauan belanja bijak** untuk menjaga ekspektasi masyarakat dan tidak panik dalam membeli suatu komoditas dalam jumlah yang terlampau masif.



Halaman ini sengaja dikosongkan



••• DAFTAR ISTILAH •••

Clean money policy adalah kebijakan Bank Indonesia untuk menarik uang tidak layak edar dan menyediakan uang layak edar bagi masyarakat.

CPO (Crude Palm Oil) atau dikenal sebagai minyak sawit mentah. Minyak sawit atau minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang dapat dikonsumsi, yang didapatkan dari mesocarp buah pohon kelapa sawit.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun perbankan dari masyarakat yang berupa giro, tabungan, atau deposito.

Disagregasi Inflasi adalah penguraian komponen inflasi menjadi 3 kelompok (*inti*, *volatile foods*, dan *administered prices*) berdasarkan faktor yang mempengaruhinya.

Ekspor adalah keseluruhan barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Impor adalah seluruh barang yang masuk ke suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) adalah salah satu komponen pembentuk IKK. Indeks ini menunjukkan tingkat keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi saat ini.

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu. Sejak Januari 2020 menggunakan tahun dasar 2018 = 100.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) adalah indeks yang menunjukkan tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang.

Industri adalah suatu kegiatan yang mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya, menjadi yang lebih tinggi nilainya termasuk kegiatan jasa industri, pekerjaan perakitan (*assembling*) dari bagian suatu industri.

Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dalam satu periode. Umumnya inflasi diukur dengan perubahan harga sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang tercermin pada perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Inflow adalah uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia, misalnya melalui kegiatan setoran yang dilakukan oleh bank umum.

Investasi adalah kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.

Liaison adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Month to Month (mtm) adalah perbandingan data antara suatu bulan dengan bulan sebelumnya.

Netflow adalah selisih antar *inflow* dan *outflow*.

Non Performing Loan (NPL) adalah kredit di perbankan yang masuk dalam kriteria kurang lancar, bermasalah, diragukan, dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Outflow adalah uang kartal yang dikeluarkan Bank Indonesia melalui proses penarikan tunai bank umum dari giro di Bank Indonesia atau pembayaran tunai melalui Bank Indonesia.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku adalah penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan pajak tidak langsung dari seluruh lapangan usaha.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya. Tahun dasar yang digunakan saat ini adalah 2010 = 100.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kelayakan daerah. Dana perimbangan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara. Keberadaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Republik Indonesia dengan negara tetangga.

Quarter to Quarter (qtq) adalah perbandingan data antara suatu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

Share of Growth adalah kontribusi suatu lapangan usaha atau komponen ekonomi terhadap total pertumbuhan PDRB.

Standard International Trade Classification (SITC) adalah sistem penggolongan produk yang dikembangkan pada tahun 1962 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SITC dibuat dengan tujuan untuk mengklasifikasikan produk yang diperdagangkan tidak hanya didasarkan atas sifat material dan fisik produk tetapi, juga sesuai dengan tahap pengolahan serta fungsi ekonomi produk tersebut dalam rangka memfasilitasi analisis ekonomi

Year on Year (yoy) adalah perbandingan data antara suatu tahun dengan tahun sebelumnya.

••• **TIM PENYUSUN** •••

Penanggung Jawab

Nur Asyura Anggini Sari

Editor

Abidin Abdul Haris

Tim Penyusun

Ari Setyo Wibowo

Aris Rudianto

Steven Theja

Gousantya Riustopo

Hendy Pebrian Azano Ramadhan Putra

Lia Larasita

Alfita Intan Putri Permata Damayanti



Halaman ini sengaja dikosongkan





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Tim Perumusan dan Implementasi KEKDA
Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Ahmad Yani No.2, Pontianak
Telp : 0561 - 734134
Faks : 0561 - 732033